



BULLETIN RENSTRAJAK

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2024

Penerbit:

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ISSN 3063-8364



773063

836046

**BULLETIN****RENSTRAJAK**

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2024



“Kebijakan yang linier antara pusat dan daerah adalah fondasi dari kesuksesan pembangunan kita. Ketika arah kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat berkesinambungan dan sejalan dengan prioritas daerah, maka kita akan mampu bergerak lebih cepat mewujudkan cita-cita bersama”

DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.PD
(KEPALA BSKDN KEMENDAGRI)

**LINIERITAS ARAH KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM RANGKA MENYUKSESKAN ASTA CITA**

**EVALUASI RENSTRA 2020 - 2024 DAN PENYUSUNAN
RENSTRA 2025 - 2029 BSKDN KEMENDAGRI**

VISI

Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif

MISI

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (research based policy);
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mewujudkan kelembagaan Strategi Kebijakan yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

BULLETIN **RENSTRAJAK**

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2024



DITERBITKAN OLEH :

**Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri**

ALAMAT REDAKSI :

**Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

E-MAIL :

bskdn@kemendagri.go.id

WEBSITE :

bskdn.kemendagri.go.id/website

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

PENASEHAT :

Dr. Yusharto Huntounggo, M.Pd

PENANGGUNG JAWAB :

Dr. Noudy R.P Tendean, S.IP, M.Si

PIMPINAN REDAKSI :

Tomy Veryanto Bawulang, S.Pd., M.Ed.,Lead, Ph.D.

SEKRETARIS REDAKSI:

Rachman Kosasih, S.T

REDAKTUR PELAKSANA:

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

TIM REDAKSI:

Tomy Veryanto Bawulang, S.Pd., M.Ed.,Lead, Ph.D.

Rachman Kosasih, ST

Yos Saputra, S.Kom

Gunawan Adi Saputra Silalahi, S.STP

Mohammad Rizky Luthfiah Aziz, S.H.Intl., M.I.Pol.

Anselmus Herisno Dwicahyo,SE

Gogo Ricky Martin Purba, S.Tr.IP.

Annisa Putri Riyanto, S.IP.

Dea Afdila, S.Tr.IP.

Muhammad Rean Fajri, S.Tr.IP.

Toriq Dwi Citra Permata, S.Tr.IP.

Ferry Pradana, S.Tr.IP.

Zaeb Awaluddin Zikri, S.Tr.IP.

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

Dwi Indarti, S.Kom.

Lina Widayanti, A.md.Ak.

Futi Istiningtyas, SE.

Ibrahim Purindra, S.AP.

Supriyoko, SE.

TIM KREATIF DESAIN:

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

Fajar Haramukti, S.Sn.

Sandy Prasetyo S.Kom.

Haryanto, ST

Siti Aisah

PENYUNTING:

Rachman Kosasih, ST

Mohammad Rizky Luthfiah Aziz, S.H.Intl., M.I.Pol.

Anselmus Herisno Dwicahyo,SE

Gogo Ricky Martin Purba, S.Tr.IP.

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Bulletin Renstrajak BSKDN Kemendagri yang berbahagia,

Pertama tama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat dan rahmatnya kita dapat menerbitkan bulletin edisi ke IV pada bulan Oktober s.d Desember tahun anggaran 2024. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebagai lembaga yang berdedikasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat. Melalui kajian serta analisis mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kebaruan dan relevan untuk keberhasilan dalam menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai proses penelaah kaidah keilmuan serta prinsip-prinsip praktik penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, efektif dan melayani.

Adapun beberapa kegiatan utama di edisi ke IV pada bulan Oktober s.d Desember tahun anggaran 2024, diantara lain Linearitas Arah Kebijakan, Pusat dan Daerah Dalam, Rangka Menyukkseskan Asta Cita serta Evaluasi Renstra 2020-2024 dan Penyusunan Renstra 2025-2029 BSKDN Kemendragi.

Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN Kemendagri tertuang dalam Bulletin Renstrajak, disusun agar memudahkan semua pembaca dalam proses dan hasil kegiatan. Kami Bagian Perencanaan berharap agar Bulletin Renstrajak BSKDN Kemendagri dapat menghasilkan informasi yang telah terdokumentasi secara lengkap. Bulletin ini tentunya butuh dukungan dari semua pihak untuk dapat menjaga konsistensi dan kualitas.

Selamat membaca Bulletin Renstrajak untuk mengetahui kegiatan pada Bagian Perencanan.

Salam Planner.



**Kepala Bagian Perencanaan,
Tomy Veryanto Bawulang, M.Ed.,Lead, Ph.D.**



01

Susunan Umum

| | |
|-----------------------|---|
| Susunan Dewan Redaksi | 1 |
| Pengantar Redaksi | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| Literasi Perencanaan | 4 |

02

Laporan Utama

| | |
|---|-------|
| Linieritas Arah Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Rangka Menyukseskan Asta Cita | 5 - 6 |
| Evaluasi Renstra 2020-2024 dan Penyusunan Renstra 2025 -2029 BSKDN Kemendagri | 7 |

03

Serba Serbi Bagren

| | |
|----------------------|----------|
| Serba Serbi Oktober | 8 - 43 |
| Serba Serbi November | 44 -86 |
| Serba Serbi Desember | 87 - 106 |

04

Info Bagren

| | |
|--------------------------|-----------|
| Galeri Bagren | 107 - 108 |
| Kuliner Nusantara | 109 - 110 |
| Bagren Squad | 111 |
| Member Of The Month 2024 | 112 - 118 |

Literasi Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan dalam pemerintahan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan ini dilakukan untuk membentuk operasi administratif internal pemerintah atau operasi ekonomi secara keseluruhan. Proses ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebijakan yang ada, serta perumusan alternatif kebijakan. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam tahap ini.

Bagian Perencanaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri umumnya berfungsi untuk merumuskan, merencanakan, dan mengoordinasikan kebijakan - kebijakan strategis yang berkaitan dengan urusan dalam negeri. TUSI Bagren di atur dalam Permendagri 137 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri

Hal tersebut diatur dalam Pasal 701 Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penataan sistem dan prosedur, sistem pengendalian intern pemerintah serta penyusunan laporan kinerja evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama, dan penyiapan rancangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 702 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- penyiapan bahan dan pengelolaan data dan informasi, monitoring program dan anggaran, evaluasi kinerja serta sistem pengendalian intern pemerintah;
- penataan sistem dan prosedur, serta penyusunan laporan kinerja; dan
- penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama, serta fasilitasi penyusunan peraturan perundang - undangan dan produk hukum.




BSKDN Kemendagri dan Pakar Bahas Strategi Linieritas Kebijakan dalam Lokakarya Nasional

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertema “Linieritas Arah Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Rangka Menyukseskan Asta Cita”. Acara yang berlangsung di Hotel Novotel Mangga Dua Square ini menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kepentingan guna membahas strategi mencapai keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kebijakan yang linier antara pusat dan daerah adalah fondasi dari kesuksesan pembangunan kita. Ketika arah kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat berkesinambungan dan sejalan dengan prioritas daerah, maka kita akan mampu bergerak lebih cepat mewujudkan cita-cita bersama,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntuyungo dalam sambutannya pada lokakarya tersebut, Jumat, 6 Desember 2024.





Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, kebijakan yang linier antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilandasi dengan bukti yang akurat, sehingga dalam penerapannya dapat berdampak terhadap upaya mewujudkan Asta Cita. “Setiap kebijakan harus dilandasi dengan bukti yang cukup, bisa dengan hasil penelitian, dilakukan pengukuran atau survei untuk kita mulai proses pengambilan kebijakan yang nantinya diharapkan dapat mendukung terwujudnya Asta Cita,” ungkap Yusharto.

Dalam hal ini, Yusharto mengatakan, Asta Cita terdiri dari delapan tujuan pembangunan strategis yang mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemantapan ketahanan nasional, hingga tata kelola pemerintahan. Dia mengatakan, setiap pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita. Dirinya berharap kontribusi daerah dalam mendukung Asta Cita tersebut dapat terus ditingkatkan.

Peran Pemerintah daerah untuk Asta Cita yang pertama yaitu menyelenggarakan program pendidikan dan sosialisasi Pancasila, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pemilihan Umum), pengawasan dan penegakan hak asasi manusia, dan seterusnya” terangnya.

Sejalan dengan itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro, , menyoroti pentingnya linieritas perencanaan daerah dengan perencanaan nasional. Menurutnya, kunci untuk keluar dari status negara berpenghasilan menengah adalah inovasi di segala bidang, termasuk strategi ekonomi dan teknologi. Keselarasan kebijakan antar tingkat pemerintahan menjadi langkah awal untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menambahkan, keberhasilan negara-negara seperti Korea Selatan dan Chili dalam mencapai status negara maju dapat menjadi contoh bagi Indonesia, khususnya dalam mengutamakan inovasi dan pemerataan pembangunan. “Jadi memang kata kunci untuk kita maju, terutama kalau saya mengutip laporannya Bank Dunia Tahun 2024 itu adalah inovasi. Tapi maksudnya inovasi segala bidang terutama strategi ekonomi, strategi industri,” jelasnya.



Sementara itu, di lain pihak, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko turut membahas peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dia mengatakan, pengentasan kemiskinan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keadilan dan ideologi. Untuk itu, linieritas kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan berjalan efektif hingga tingkat daerah.

“Kemiskinan seolah-olah persoalan teknis, (padahal) tidak, kemiskinan juga adalah soal ideologi, soal psikologi juga,” tegasnya.

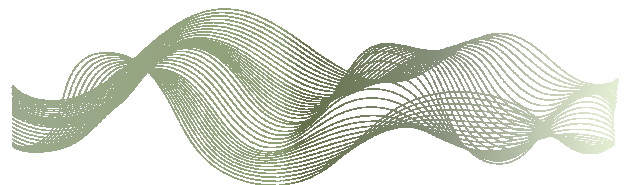
Sebagai informasi tambahan, Lokakarya tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya meliputi Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kemendagri Muchlis Hamdi, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Nurliah Nurdin dan Direktur Konservasi Energi (ESDM) Hendra Iswahyudi.

harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam memastikan setiap kebijakan relevan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dia menekankan bahwa kebijakan yang sinergis memungkinkan pemerintah bergerak lebih cepat dan efektif dalam mencapai Asta Cita.



“Sinergisitas antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dengan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dan sesuai dengan kondisi lokal,” ungkap Yusharto

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Asta Cita mencakup delapan tujuan utama pembangunan, seperti pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan sosial dan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan Asta Cita dibutuhkan koordinasi yang erat berbagai tingkatan pemerintahan. Untuk itu, dalam forum ini, Yusharto mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk terus memperkuat peran sebagai pelaksana kebijakan nasional yang adaptif terhadap karakteristik lokal.

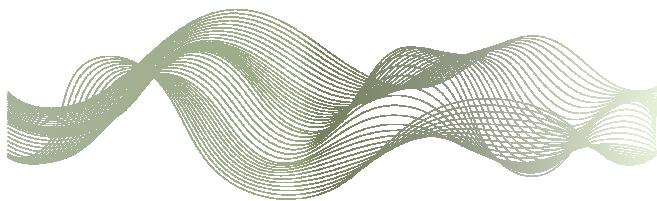




“Melalui ruang ini, mari kita buka ruang dialog dan diskusi, agar kita semua dapat semakin memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan kebijakan yang lebih terkoordinasi, lebih harmonis dan lebih berpihak pada rakyat,” terangnya.

Dirinya mengatakan, melalui forum ini setiap Pemda juga dapat berbagi praktik terbaik dan pengalaman dalam menjalankan kebijakan yang selaras dengan Asta Cita. Diskusi interaktif antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. “Saya berharap melalui acara ini, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah,” ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Yusharto juga mengatakan, pihaknya akan terus mendampingi daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan arah pembangunan nasional. Sinergisitas ini diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Mari kita berbagi pengalaman, berbagi praktik terbaik, dan berdiskusi tentang bagaimana kita bisa lebih memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia,” pungkasnya.



Evaluasi Renstra 2020-2024 dan Penyusunan Renstra 2025-2029 BSKDN Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti digitalisasi pemilihan umum (pemilu) agar pelaksanaan ke depan dapat hemat, efisien, dan transparan, dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (Renstra BSKDN) 2025-2029.

"Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan lampu hijau untuk kita melakukan perubahan terhadap penyelenggaraan pilkada yang dinilai tidak efisien dan membutuhkan biaya yang sangat besar," kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Renstra 2025-2029 bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi panduan strategis yang mampu menjawab tantangan pemerintahan di masa mendatang.

Oleh sebab itu, kata dia, Renstra 2025-2029 berfokus pada sinkronisasi kebijakan, literasi digital, dan penguatan data untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

"Ini kami harapkan bisa menjadi salah satu tonggak bagaimana BSKDN diberikan kepercayaan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk bisa memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan," ujarnya.



Sementara itu, Yusharto mengatakan bahwa evaluasi terhadap renstra tersebut akan dilakukan oleh pihaknya sebagai dasar untuk melangkah lebih baik dari periode-periode sebelumnya.

Hasil rapat evaluasi Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dan penyusunan Renstra 2025-2029 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) biasanya mencakup beberapa poin penting, antara lain:

a. Evaluasi Capaian Renstra 2020-2024

- **Kinerja Program dan Kegiatan** Menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Renstra 2020-2024 tercapai sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Ini termasuk hasil yang sudah diraih dan tantangan yang dihadapi.
- **Efektivitas dan Efisiensi:** Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta sumber daya dalam melaksanakan program-program tersebut.
- **Pencapaian Sasaran Strategis:** Menilai apakah sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan pada awal perencanaan tercapai atau perlu disesuaikan.
- **Pembelajaran dan Rekomendasi:** Identifikasi keberhasilan yang perlu dilanjutkan dan kendala yang harus diperbaiki untuk periode perencanaan berikutnya.

b. Penyusunan Renstra 2025-2029

- **Visi dan Misi Baru:** Menetapkan arah strategis yang lebih relevan dengan perkembangan kebijakan dan tantangan masa depan, baik di tingkat nasional maupun global.
- **Prioritas Kebijakan:** Menentukan prioritas kebijakan baru, mengingat dinamika perubahan dalam sektor pemerintahan, sosial, dan ekonomi.
- **Indikator Kinerja:** Penyusunan indikator kinerja yang lebih jelas dan terukur untuk memantau kemajuan di setiap tahun pelaksanaan.
- **Sinergi Antar Sektor:** Meningkatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah, serta pihak terkait lainnya untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif.
- **Penyelarasan dengan RPJMN dan RPJPD:** Memastikan bahwa Renstra 2025-2029 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta kebijakan pemerintah yang berlaku.
- Selain itu, dalam rapat tersebut, biasanya juga akan dibahas mengenai penyesuaian kebijakan atau program yang dibutuhkan berdasarkan hasil evaluasi serta perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Serba Serbi Oktober

Rapat pertemuan Kick Off Pengembangan Knowledge Hub

Rapat dilaksanakan di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta pkl 09.00-14.00 WIB. Hadir pada rapat perwakilan BSKDN Kemendagri, perwakilan Pusdatin Setjen Kemendagri, perwakilan Pufasker Setjen Kemendagri, perwakilan Kemenkeu, dan Tim Pakar AI dari SKALA

pada rapat dilaksanakan pembahasan kebermanfaatan AI bagi lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layana . Adapun Chatbot yang saat ini digunakan di website lembaga pemerintah masih merupakan AI tingkat dasar dengan eterbatasan dalam memproses dan memberikan jawaban yang sesuai.

Diperlukan AI dengan kemampuan deep learning yang dapat menganalisis data dan memahami karakteristik pengguna. Ini akan meningkatkan kualitas interaksi dan layanan publik.

Diperlukan AI dengan kemampuan deep learning yang dapat menganalisis data dan memahami karakteristik pengguna. Ini akan meningkatkan kualitas interaksi dan layanan publik.

rencana akan dikembangkan pilot project AI untuk lembaga pemerintah. Bagian Perencanaan siap mengawal kerja sama pemanfaatan AI sesuai dengan kebutuhan penguatan kapasitas lembaga BSKDN





Rapat Diseminasi dan Sosialisasi Pedoman Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemendagri

. Rapat dilaksanakan pukul 13.00 s.d selesai via zoom di pimpin oleh perencana ahli muda Biro Perencanaan Setjen Kemendagri diikuti oleh staf bagian perencanaan.

Rapat ini bertujuan untuk Diseminasi dan Sosialisasi Pedoman Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemendagri dengan tujuan meningkatkan nilai SAKIP Kemendagri secara umum pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 untuk sementara nilai AKIP BSKDN mengalami peningkatan menjadi Predikat B (nilai 60-70) dengan kata lain Baik yang menggambarkan bahwa AKIP sudah BAik pada 1/3 unit kerja khususnya unit kerja utama dan perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerjaserta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja dilaksanakan sampai unit kerja level eselon II.

Ruang lingkup penilaian AKIP meliputi : Penilaian kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja yang baik yang memberikan dampak dalam pencapaian kinerja berikutnya, Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Pada tahun 2023 nilai AKIP BSKDN Predikat CC (Nnilai 50-60) dengan penjelasan Cukup (memadai) terdapat gambaran bahwa AKIP cukup Baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Serba Serbi Oktober

Pembekalan peserta Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pkl. 08.30 s.d 12.00 WIB via zoom meeting yang dipimpin oleh Biro Kepegawaian yang dihadiri oleh calon P3K dan Narasumber dari BKN RI.

Pembekalan Peserta Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2025 bertujuan untuk memastikan peserta agar dalam proses seleksi tidak ada kesulitan dan dapat dipahami prosedur oleh seluruh peserta.

Dokumen pelamar P3K berupa "PasFoto, KTP, Ijazah Asli, Transkrip Nilai Asli, Surat Lamaran, Surat Pernyataan, Penyetaraan ijazah Asli Perguruan Tinggi Luar Negeri, Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi, Surat Keterangan Aktif Bekerja, Surat Keterangan Aktif Bekerja paling singkat 2 tahun terakhir, Surat Keterangan dari Dokter, Surat Tanda Registrasi Asli.

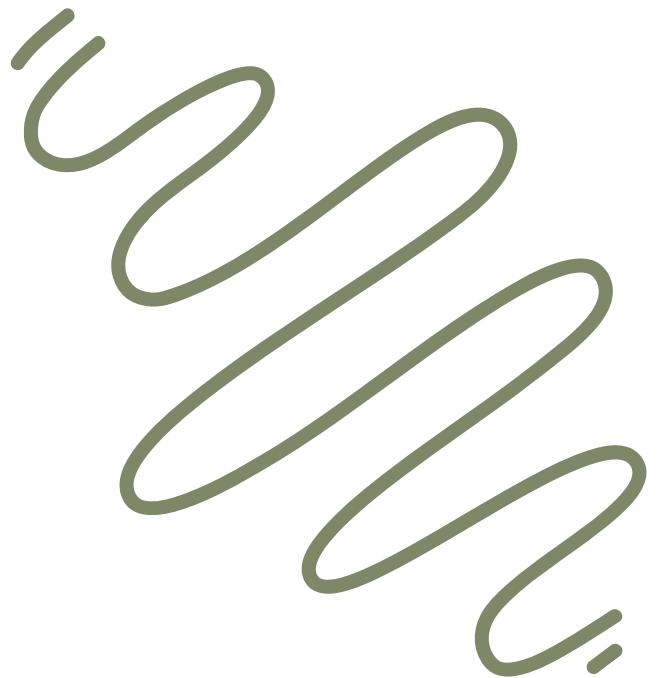


Rapat konfirmasi prognosis realisasi Belanja Pegawai Kemendagri s.d akhir tahun 2024

Rapat dilaksanakan pkl. 09.00 s.d 12.00 WIB di Ruang Rapat Biro Perencanaan yang dipimpin oleh Biro Perencanaan dan dihadiri oleh Perwakilan UKE I Kemendagri. Proyeksi belanja pegawai BSKDN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.23.832.114.026, meliputi:

- Gaji pegawai BSKDN s.d bulan Desember;
- Tunkir, Uang Makan dan Lembur pegawai BSKDN s.d bulan November;
- Gaji IPDN 31 (9 orang) 4 bulan s.d bulan Desember;
- Tunkir dan uang makan pegawai IPDN 30 (12 orang) 2 bulan November dan Desember;
- Gaji P3K (7 bulan) BSKDN s.d bulan Desember;
- Tunkir, Uang Makan dan Lembur P3K BSKDN (6 bulan) s.d bulan November.

BSKDN terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.091.869.974 s.d akhir tahun 2024



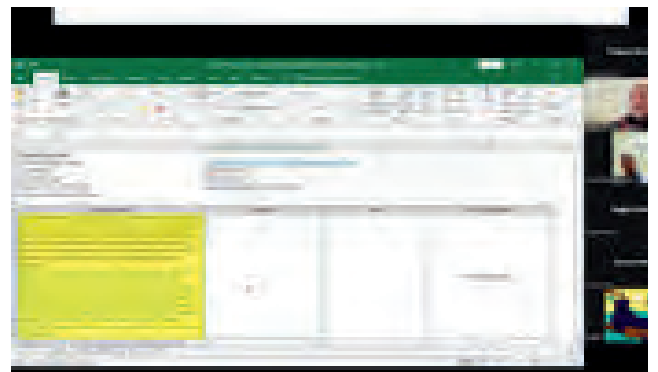
Serba Serbi Oktober

Pembahasan Draft Matriks IM Kerjasama OECD

Rapat dilaksanakan via zoom pukul 13.00 s.d 14.30, dihadiri oleh Perwakilan seluruh Komponen yang ada di Kemendagri

Pada rapat dilaksanakan penyampaian program kerja sama Pembahasan draft Matriks Initial Memorandum (IM) Kerjasama Organization of Economic Co-operation Development (OECD), Memorandum kerjasama dengan OECD berfokus pada latar belakang dan konteks yang mendorong kolaborasi, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong inovasi, dan memperkuat kebijakan publik yang inklusif. Ruang lingkup kerjasama mencakup bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dokumen ini juga menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta menetapkan timeline untuk pelaksanaan kerjasama dan rincian anggaran yang diperlukan

Pada rapat ini Biro perencanaan menyampaikan batas penginputan Matriks IM Kerjasama OECD pada tanggal 20 oktober 2024.





Audiensi dengan Ironwood Australia

Rapat dilaksanakan pkl 15.30 s.d 17.30 bertempat di Ruang Video Conference, dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN dan dihadiri oleh perwakilan dari Ironwood Institute (Sdri. Rini dan Sdri. Tina), Plh. Kapus III, dan perwakilan Bagian SDMO.

Pada rapat dilaksanakan diskusi seputar perkenalan kelembagaan Ironwood Institute yang merupakan lembaga pelatihan vokasi dan sertifikasi yang berpusat di Adelaide, Australia, dan berfokus pada bidang Studi Agrikultur. Ironwood juga berfokus pada penelitian dan pengembangan inovasi bidang Hidrokultura. Ironwood terafiliasi dengan beberapa perguruan tinggi ternama di Australia, termasuk dengan Adelaide University, di mana Ironwood menyediakan program pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan master degree pada prodi Magister Agribisnis

Pada rapat dibahas skema kerja sama yang sesuai dengan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN, termasuk di antaranya: peningkatan kapasitas ASN dalam bidang penguatan kebijakan pertanian dan pengelolaan air. Kerja sama pelatihan ini akan melibatkan pemerintah daerah dengan mengacu pada perolehan tingkat inovasi daerah di bidang pertanian. Ironwood siap memfasilitasi pengurusan visa training yang sekarang prosesnya diperketat sehubungan dengan pembatasan masuknya imigran ke Australia

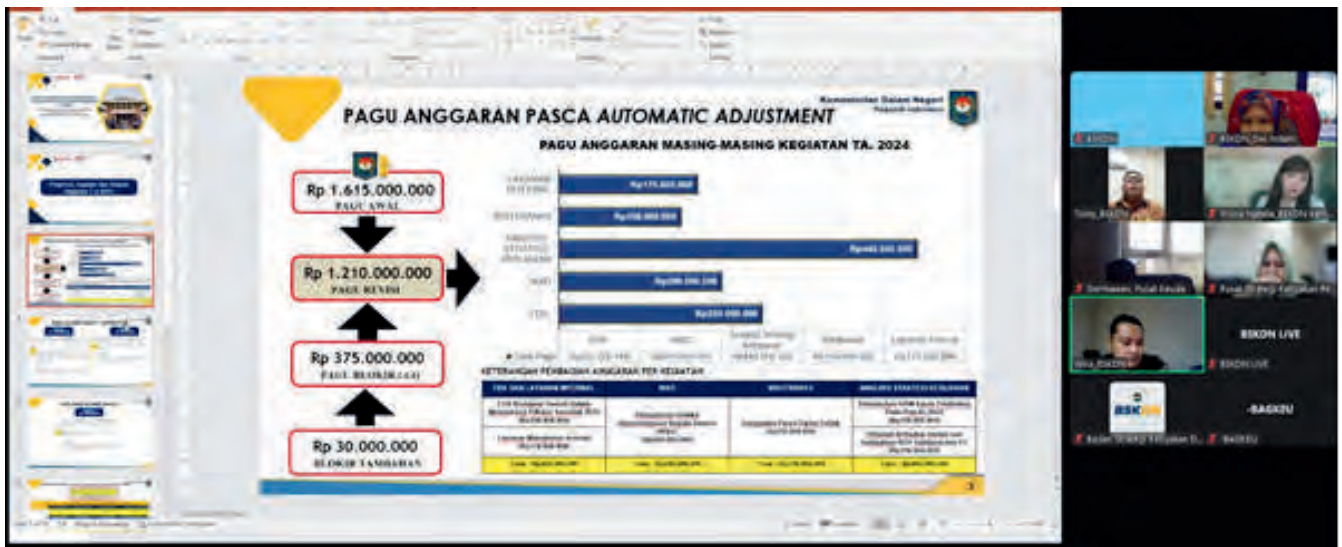
Rencana kerja sama lainnya juga mencakup Seminar Internasional, di mana para pakar dan peneliti bidang Agribisnis dapat melaksanakan knowledge sharing dengan menjadi pembicara, juga disosialisasikan adanya Jurnal Bina Praja yang diharapkan agar para penulis jurnal ilmiah bidang pertanian dapat mengirimkan naskah akademiknya untuk terbit pada jurnal yang diampu BSKDN tersebut

Serba Serbi Oktober

Rapat Evaluasi Serapan Mingguan

Rapat dilaksanakan pkl. 15.30 s.d 16.00 WIB melalui zoom meeting dipimpin oleh Plh. Sekretaris BSKDN yang dihadiri oleh Perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN

Rapat evaluasi serapan mingguan bertujuan untuk setiap minggu ada peningkatan realisasi di Pusat maupun Bagian. Data realisasi ini akan dibuat bar chart dengandata minggu lalu sebagai baseline (dalam persentasi) dan minggu ini sebagai progress (dalam persentasi) termasuk data accrual dan sp2d untuk dilaporkan Pimpinan.



Rapat monitoring dan evaluasi terpadu penerapan SPM di Sorong Papua Barat Daya

Rapat dimulai pukul 09.00 WIT di Ruang Rapat Gubernur Papua Barat Daya, dibuka oleh Plh. Sesditjen Bina Bangsa dan Plh. Asisten I.

Pada rapat dilakukan sosialisasi penerapan SPM. Ditjen Bina Bangsa menyampaikan paparan terkait perkembangan pelaporan SPM di wilayah Papua yang masih rendah. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa lokasi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk melihat kondisi langsung pemberian SPM kepada masyarakat

Rencana kerja sama lainnya juga mencakup Seminar Internasional, di mana para pakar dan peneliti bidang Agribisnis dapat melaksanakan knowledge sharing dengan menjadi pembicara, juga disosialisasikan adanya Jurnal Bina Praja yang diharapkan agar para penulis jurnal ilmiah bidang pertanian dapat mengirimkan naskah akademiknya untuk terbit pada jurnal yang diampu BSKDN tersebut



Serba Serbi Oktober

Pembahasan buka blokir Automatic Adjustment Tahap II TA.2024

Rapat dilaksanakan pkl. 12.00 WIT s.d 15.00 WIT via zoom meeting dipimpin oleh Biro Perencanaan dan diikuti oleh Bagian Perencanaan. Terhadap Bimtek pada Lokakarya agar disesuaikan kembali terkait bimtek tersebut untuk tidak ada pada TOR dikarenakan RAB tidak ada kegiatan Bimtek.



Terhadap paket EO dan vendor yang msh dalam bentuk Paket dapat disertakan detail RAB untuk menjadi dokumen pendukung. Kegiatan Pusat Inovasi "Kegiatan penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah" perlu ditambahkan data dukung pada Paket yang terdapat di RAB dan didetailkan. Bagian perencanaan siap mengawal dan mendukung proses buka blokir Automatic Adjustment Tahap II TA.2024



Rapat Monitoring dan Evaluasi Terpadu Penerapan SPM di Puskesmas Remu Kota Sorong dan Kantor Bupati Sorong

Puskesmas Remu Kota Sorong

- Rapat dilaksanakan pkl. 09.00 s.d 12.00 WIT di ruang rapat Puskesmas Remu Kota Sorong yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, dihadiri oleh perwakilan UKE I Kemendagri, Kementerian K/L dan Bagian Perencanaan BSKDN
- Rapat Monitoring dan Evaluasi Terpadu Penerapan SPM di Puskesmas Remu bertujuan untuk konsolidasi dan sosialisasi agar Puskesmas Remu dapat mencapai sasaran dan menemukan solusi untuk permasalahan yang ada di Puskesmas
- Terkait data laporan SPM kesehatan harus diperkuat kembali karena masih 21,55% dari target dan masuk kategori "Belum Tuntas"



Kantor Bupati Sorong

- Rapat dilaksanakan pukul 13.00 s.d 15.00 WIT di ruang rapat Bupati Sorong yang dipimpin oleh Bapak Asisten Bupati, dihadiri team Monev SPM, K/L terkait, dan Bagian Perencanaan BSKDN
- Rapat bertujuan untuk pembahasan rendahnya partisipasi input data pelaporan SPM di lingkup Kabupaten Sorong terutama dari Dinas Satpol PP dan Dinas Perumahan.
- Ditjen Bina Bangda diminta daerah untuk dapat membina dalam proses input karena terdapat kesulitan teknis yang dialami Pemda.



Serba Serbi Oktober

Rapat Pembahasan Rencana Penyerahan Kajian Strategi Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik Dalam Pemerintah Daerah dan Draft Artikel Jurnal

Rapat dilaksanakan di Ruang rapat lt. 6, Gedung B.J. Habibie pukul 09.00 s.d 12.00, dihadiri oleh Perwakilan dari Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN. Pada rapat dilaksanakan persiapan penyerahan Kajian Strategi Percepatan Transformasi Digital Layanan Publik Dalam Pemerintah Daerah dan Draft Artikel Jurnal yang akan dilaksanakan di BSKDN pada hari yang sama di jam 15.30 yang akan dihadiri oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN.

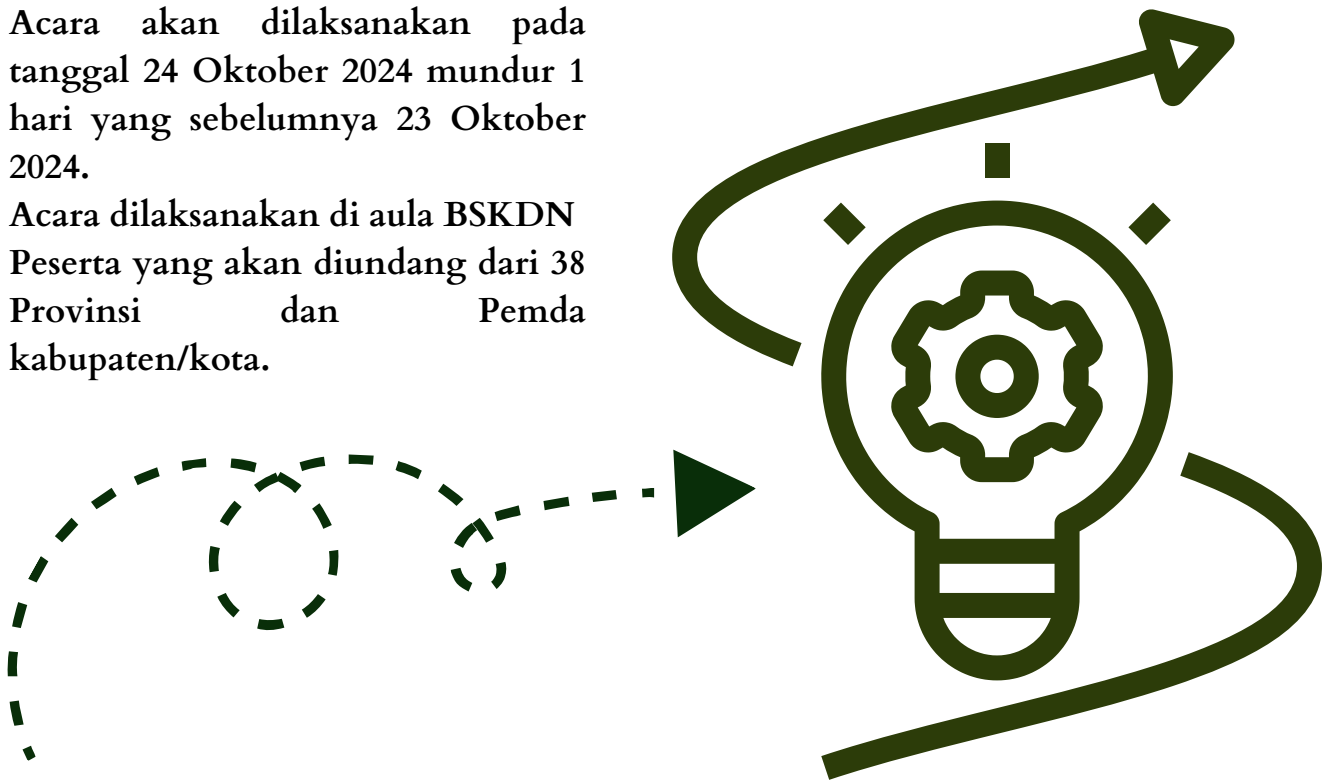
Pada rapat persiapan ini pihak BRIN menyiapkan berkas kajian startegi percepatan Transformasi Digital Layanan Publik Dalam Pemerintah Daerah dalam bentuk buku, adapun plakat untuk di serah-terimakan kepada pihak BSKDN.



Rapat Persiapan Seminar Sinergisitas Inovasi Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Rapat dilaksanakan pukul 10.15 s.d 11.00 di Ruang Rapat Pusat Inovasi diwakili oleh staf perencanaan. Rapat ini bertujuan untuk Persiapan Seminar Sinergisitas Inovasi Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Dalam rapat ini terkait persiapan seminar sinergitas inovasi daerah urusan wajib pelayanan dasar ditentukan:

- Tema yaitu “Seminar Sinergitas Inovasi Daerah Pelayanan Dasar”
- Acara akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024 mundur 1 hari yang sebelumnya 23 Oktober 2024.
- Acara dilaksanakan di aula BSKDN
- Peserta yang akan diundang dari 38 Provinsi dan Pemda kabupaten/kota.



Serba Serbi Oktober

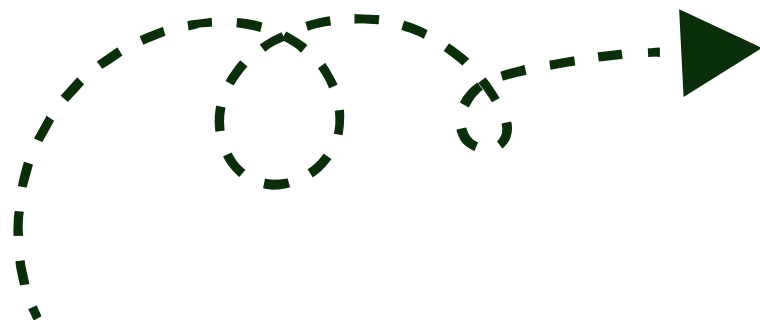
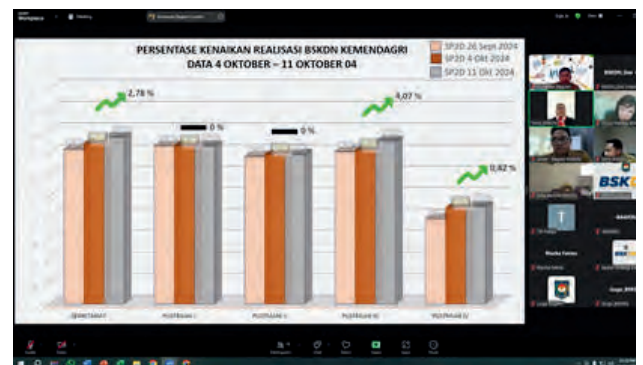
Rapat Serapan Evaluasi Mingguan

Rapat dilaksanakan pukul 15.00 s.d 16.00 WIB via zoom meeting yang dipimpin oleh Plh. Sekretaris Badan dan dihadiri para perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN. Rapat ini bertujuan untuk evaluasi realisasi anggaran, agar mengetahui penikatan dan progresnya.

Adapun progres terkait realisasinya:

- Sekretariat: SP2D 26 Sept 2024 sebesar 71,96%, SP2D 4 Okt 2024 sebesar 74,66%, SP2D 11 Okt 2024 sebesar 77,44% (mengalami kenaikan sebesar 2,78%)
- -Pustrajak I: SP2D 26 Sept 2024 sebesar 73,46%, SP2D 4 Okt 2024 sebesar 73,46%, SP2D 11 Okt 2024 sebesar 73,46% (tidak terdapat kenaikan)
- Pustrajak II: SP2D 26 sept 2024 sebesar 68,53%, SP2D 4 Okt 2024 sebesar 69,54%. SP2D 11 Okt 2024 sebesar 69,54% (Tidak Terdapat Kenaikan)

- Pustrajak III: SP2D 26 Sept 2024 sebesar 70,87%, SP2D 4 Okt 2024 sebesar 71,45%, SP2D 11 Okt 2024 sebesar 75,52% (mengalami kenaikan sebesar 4,07%)
- Pustrajak IV: SP2D 26 Sept 2024 sebesar 39,59%, SP2D 4 Okt 2024 sebesar 44,75%, SP2D 11 Okt 2024 sebesar 45,17% (mengalami kenaikan sebesar 0,42%)



Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pembinaan JFAK di Lingkungan Pemerintah Daerah Untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif

Rapat dilaksanakan pukul 13.30 s.d 15.00 di Aula BSKDN, dipimpin oleh Kabag SDMO dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing Pusat dan Bagian lingkup BSKDN. Rapat ini bertujuan untuk Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pembinaan JFAK di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai kerja sama dengan Lembaga SKALA

Dalam rapat ini dibahas beberapa poin sebagai berikut:

- Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 tempat di Command Center BSKDN
- Peserta yang diundang terdiri dari provinsi Aceh, NTB, NTT, Kaltara, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Banten, Jabar, Jakarta dan sekitarnya
- Pelaksanaan acara terdiri dari 2 sesi yaitu sesi Talkshow dan Diskusi Kelompok

- Pembagian kelompok dibagi menjadi 3 yaitu Kelompok peraturan dan kebijakan, penguatan kapasitas, penganggaran
- Diskusi kelompok akan dipaparkan oleh salah satu peserta yang dipilih sehingga dapat dikonfirmasi kelompok lainnya dan menerima masukan
- Peserta acara tersebut nantinya akan dibuatkan Whatsap Grup sebagai sarana membagi informasi
- Pemilihan moderator dan notulen akan diinformasikan lebih lanjut
- Pelaksanaan acara tersebut akan ditayangkan pada streaming zoom meeting dan youtube
- Informasi selanjutnya kemungkinan akan dilaksanakan rapat persiapan lanjutan



Serba Serbi Oktober

Rapat Reviu APIP Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran RKA-K/L BSKDN Kemendagri TA. 2025

Rapat dilaksanakan pkl. 09.00 WIB s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat Bagian Perencanaan dipimpin oleh Tim Reviu APIP Itjen Kemendagri yang dihadiri oleh Staf Bagian Perencanaan dan perwakilan dari Pusat maupun Bagian.

Pagu Alokasi Anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri TA. 2025 sebesar Rp58.608.338.000,- dengan rincian Alokasi Anggaran untuk Program Pembinaan kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa sebesar Rp10.840.000.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp47.768.338.000,-

Terhadap Perhitungan PUPR dalam hal ini Pembangunan Renovasi Gedung BSKDN (tidak merubah struktur bangunan/ bentuk dan dalam pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dimana Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR 2022 Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara Hal. 122 Tabel.1 Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana dengan metode interpolasi sebesar Rp. 350.000.000

Bagian Anggaran Biro Perencanaan telah memberikan informasi bahwa terkait Celarance TIK akan diakomodir dari Pusdatin Setjen Kemendagri secara kolektif



Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pemanfaatan Aplikasi SIRIKA Kemendagri

Rapat dilaksanakan pkl. 09.30 s.d 12.00 WIB di Ruang Rapat Biro Perencanaan dibuka oleh plh Kepala Bio Perencanaan, dihadiri oleh seluruh perwakilan komponen di lingkungan Kemendagri baik daring maupun luring

Aplikasi SIRIKA dapat diakses melalui halaman Website : <http://sirika.kemendagri.go.id/>. Peserta rapat menyampaikan masukan dan saran terhadap Aplikasi SIRIKA, terutama terkait kemudahan, jaringan yang stabil, serta integrasi dengan Aplikasi perencanaan lain, seperti aplikasi Krisna BAPPENAS, Aplikasi SAKTI Kemenkeu, dan Aplikasi E-Monev Kemenpan-RB

Biro Perencanaan akan memfasilitasi pendampingan terhadap satker dalam rangka tata cara penginputan pada aplikasi SIRIKA. Aplikasi SIRIKA baru hanya terintegrasi dengan aplikasi E-sakip Kemenpan-RB, dan masih banyak kendala teknis yang harus di konsolidasikan kembali

Disarankan juga untuk diadakan sosialisasi Aplikasi SIRIKA kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendagri. Akan segera dilaksanakan Bimtek Aplikasi SIRIKA kepada semua operator di tiap-tiap komponen



Serba Serbi Oktober

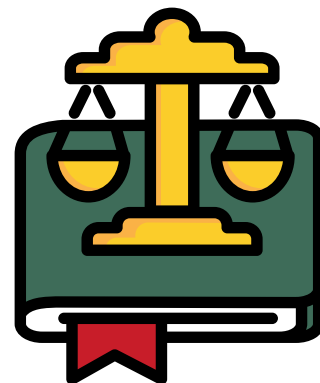
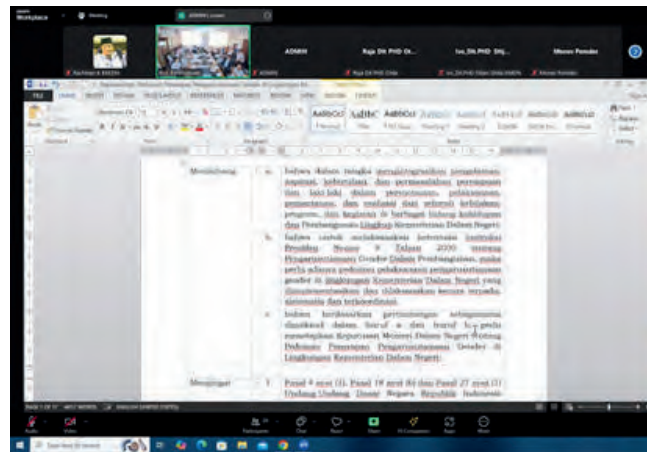
Rapat Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Kemendagri

Rapat dilaksanakan pkl. 13.30 s.d 16.00 WIB via zoom meeting dipimpin oleh Perencana Ahli Muda Bagian Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan, dihadiri oleh perwakilan komponen di lingkungan Kemendagri baik daring maupun luring

Rapat membahas draft Kepmendagri tentang Pedoman Penerapan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemendagri, serta Lampirannya.

Kepmendagri ini disusun amanat dari Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepmendagri ini digunakan sebagai acuan bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan Kemendagri dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan menguatkan pemahaman serta mendorong PUG menjadi salah satu perspektif utama di seluruh bidang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemendagri



Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pemanfaatan Aplikasi SIRIKA Kemendagri

Rapat dilaksanakan pkl. 09.30 s.d 12.00 WIB di Ruang Rapat Biro Perencanaan dibuka oleh plh Kepala Bio Perencanaan, dihadiri oleh seluruh perwakilan komponen di lingkungan Kemendagri baik daring maupun luring

Aplikasi SIRIKA dapat diakses melalui halaman Website : <http://sirika.kemendagri.go.id/>. Peserta rapat menyampaikan masukan dan saran terhadap Aplikasi SIRIKA, terutama terkait kemudahan, jaringan yang stabil, serta integrasi dengan Aplikasi perencanaan lain, seperti aplikasi Krisna BAPPENAS, Aplikasi SAKTI Kemenkeu, dan Aplikasi E-Monev Kemenpan-RB

Biro Perencanaan akan memfasilitasi pendampingan terhadap satker dalam rangka tata cara penginputan pada aplikasi SIRIKA. Aplikasi SIRIKA baru hanya terintegrasi dengan aplikasi E-sakip Kemenpan-RB, dan masih banyak kendala teknis yang harus di konsolidasikan kembali

Disarankan juga untuk diadakan sosialisasi Aplikasi SIRIKA kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendagri. Akan segera dilaksanakan Bimtek Aplikasi SIRIKA kepada semua operator di tiap-tiap komponen



Serba Serbi Oktober

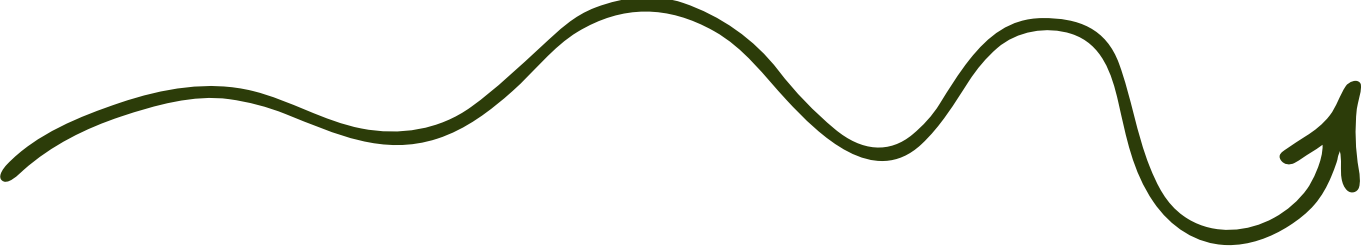

FDA Strategi Penguatan Sistem Antikorupsi di Desa

Forum ini bertujuan untuk memperkuat strategi antikorupsi di desa dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan ahli dari berbagai lembaga yang berfokus pada tata kelola dan transparansi dana desa. Kegiatan ini mengundang beberapa pembicara, di antaranya: Moch Nurhasim, M.Si (Dir. Kebijakan Politik, Keamanan, dan Hukum BRIN); Brigjen Pol. Kumbul Kuswidjanto, MM (Dir. Pembinaan Peran Masyarakat KPK); Ari Indarto, S.T., M.T. (Inspektur V Kemendes PDT); Rio Remota, S.P. (Kepala Desa Hanura, Kab. Pesawaran); dan Agus Sunaryanto, S.Pd. (Koordinator ICW).

Pokok Pembahasan diskusi adalah sebagai berikut: BRIN menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kebijakan politik dan tata kelola desa yang baik. Ia menjelaskan bahwa desentralisasi harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif agar kewenangan desa tidak disalahgunakan.

Pengawasan substantif sangat diperlukan untuk memastikan implementasi dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati. KPK menekankan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan desa merupakan kunci sukses dalam mencegah korupsi. Partisipasi aktif dari warga dalam mengawasi dan melaporkan penyimpangan penggunaan dana desa perlu didorong melalui program-program edukasi antikorupsi. KPK sendiri telah membangun mekanisme pengawasan berbasis partisipatif untuk memperkuat transparansi di tingkat desa.






Dari sisi Kemendes PDT, ditekankan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, besar alokasi dana desa mencapai lebih dari Rp 630 triliun dalam kurun waktu 2015 hingga 2024. Pengawasan oleh instansi terkait sangat diperlukan, mengingat banyaknya obyek audit yang harus diperhatikan. Diperlukan kolaborasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan, termasuk mengaktifkan peran pendamping desa untuk meningkatkan kapasitas dalam tata kelola keuangan yang baik.

Diceritakan juga best practice dari praktisi sebagai kepala desa, bahwa Kades Hanura berbagi praktik baik yang ia terapkan di Desa Hanura. Menurutnya transparansi dan akuntabilitas di desa perlu diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik dan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa.

ICW menyampaikan data terkait banyaknya kasus korupsi di desa yang diakibatkan oleh kelemahan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Berdasarkan hasil pengamatan ICW, adanya praktek keterlibatan elit desa yang dominan sering kali menjadi faktor utama penyimpangan dana desa. Direkomendasikan untuk adanya penguatan peran masyarakat sipil dan peningkatan kapasitas perangkat desa agar lebih memahami tata kelola yang sesuai dengan regulasi.

Bagian Perencanaan akan terus mengawal implementasi strategi antikorupsi di desa dengan memperkuat kolaborasi antar stakeholder serta masyarakat guna menghasilkan peningkatan kompetensi para aparatur desa dalam pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.



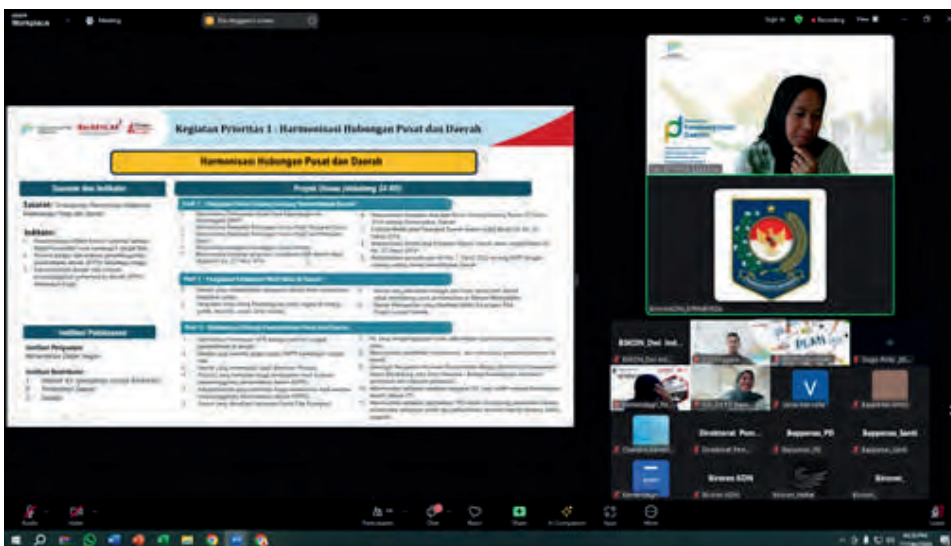
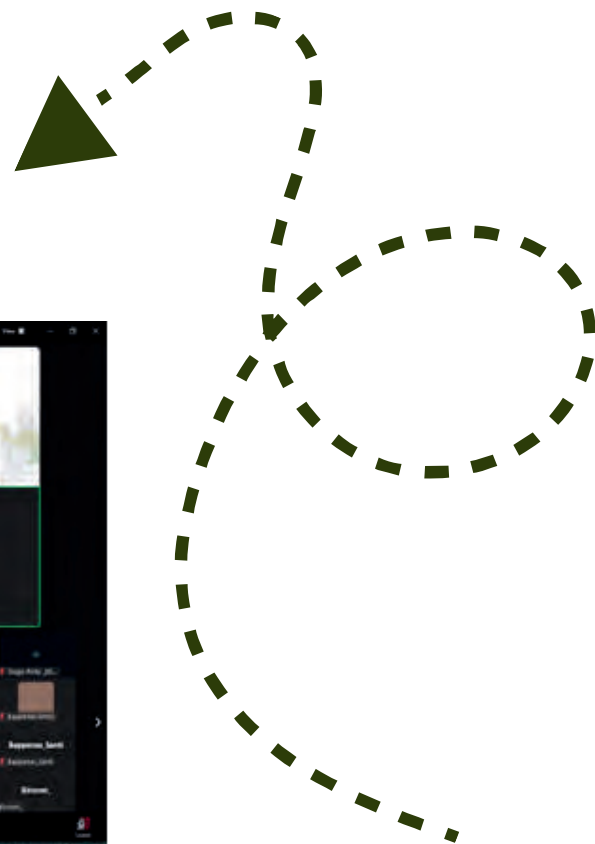
Serba Serbi Oktober

Pertemuan Pembahasan Indikator dan Usulan Rincian Output (RO) Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 lingkup Kementerian Dalam Negeri

Rapat dilaksanakan pkl. 13.30 s.d 16.00 WIB melalui zoom meeting dipimpin oleh Alen Ermanita Bappenas dan dihadiri oleh Perwakilan UKE I lingkup Kemendagri dan Tim Bagian Perencanaan BSKDN.

Kegiatan ITKPD pada Indikator Kegiatan Prioritas didrop karena dikhawatirkan ketersediaan data tiap tahun dari Kementerian/Lembaga belum tentu tersedia, tetapi ITKPD masuk dalam Rincian Output Prioritas Nasional dan harus dilakukan penajaman kembali.

Rincian Output Penguatan Strategi Kebijakan Pusat dan Daerah dan Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah harus dipastikan kembali target tiap tahunnya. Bagian Perencanaan siap mendukung dan mengawal Kegiatan Prioritas yang ada di BSKDN dengan dukungan dari Stakeholder terkait

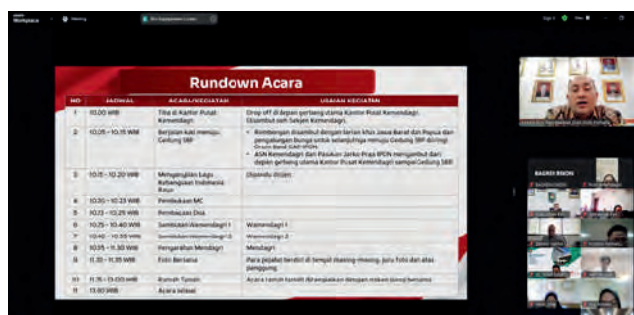


Rapat persiapan penyambutan Mendagri dan Wakil Mendagri

Rapat dilaksanakan pkl. 10.30 WIB s.d 12.00 WIB via zoom meeting yang dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri dihadiri para perwakilan UKE I Kemendagri dan Staf Bagian Perencanaan

Rencana penyambutan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pkl. 10.00 WIB s.d selesai namun terdapat informasi terbaru dari Ortala bahwa kemungkinan kegiatan akan dimajukan pada hari senin 21 Oktober 2024 dan akan diinformasikan lebih lanjut nantinya oleh Karo Kepegawaian, tempat pelaksanaan acara yaitu di plaza upacara kemendagri gedung C Sasana Bhakti Praja (SBP) pukul 10.00 s.d selesai menggunakan pakaian dinas harian.

Peserta undangan terdiri dari Es I lingkup Kemendagri dan BNPP, Es II lingkup Kemendagri dan BNPP, Pejabat Administrator lingkup Sekjen dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemendagri. Pelaksanaan penyambutan diawali dengan adanya pengalungan bunga dan tarian daerah Jawa Barat dan Papua yang dipersembahkan dari IPDN selanjutnya diiringan drumband GAP dari IPDN sampai gedung SBP.



| NO | WAKTU | KEGIATAN | LOKASI |
|----|-----------------|----------------------------------|---|
| 1 | 08.00-09.00 | Tiba di Kantor Pusat Kemendagri | Di area parkir di depan gedung utama Kantor Pusat Kemendagri |
| 2 | 09.00-10.30 WIB | Berangkat dari Gedung Gedung SBP | Stasiun satelit Gedung Kemendagri |
| 3 | 10.30-10.35 WIB | Menggunakan Laga | Di depan gedung |
| 4 | 10.35-10.38 WIB | Berkumpul di Sasana Bhakti Praja | |
| 5 | 10.38-10.40 WIB | Pembukaan MC | |
| 6 | 10.40-10.45 WIB | Pembacaan Doa | |
| 7 | 10.45-10.50 WIB | Sambutan (Kemendagri I) | Wawancara 1 |
| 8 | 10.50-11.00 WIB | Sambutan (Kemendagri II) | Wawancara 2 |
| 9 | 11.00-11.30 WIB | Mengucapkan Mendagri Mendagri | |
| 10 | 11.30-11.35 WIB | Foto Bersama | Pada platform terdapat di tempat obsewing meeting jawa feli dan alia jayabaya |
| 11 | 11.35-11.50 WIB | Berangkat Timor | |
| 12 | 11.50-09.00 | Akhir acara | Acara berakhir dengan sambutan dan foto bersama |

Serba Serbi Oktober

Rapat Evaluasi Serapan Mingguan

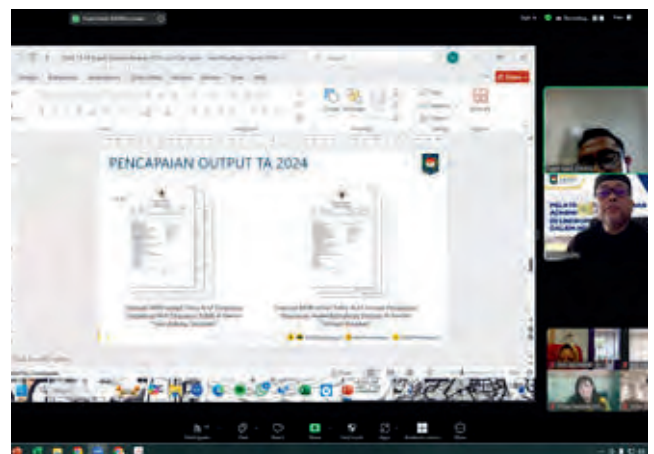
Rapat dilaksanakan pkl. 15.30 s.d 16.30 WIB via zoom meeting dipimpin oleh Plh. Sekretaris BSKDN dihadiri oleh perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN Kemendagri. Rapat Evaluasi Serapan Mingguan bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi dari 27/9/2024, 4/10/2024, 11/10/2024 & 18/10/2024 dalam 4 minggu tersebut terdapat peningkatan realisasi dari Pusat dan Bagian

Persentase kenaikan realisasi BSKDN

- Bagian sekretariat mengalami kenaikan sebesar 0,54%
- Bagian Pustrajak I mengalami kenaikan sebesar 2,66%
- Bagian Pustrajak II mengalami kenaikan sebesar 1,07%
- Bagian Pustrajak III mengalami kenaikan sebesar 1,05%
- Bagian Pustrajak IV mengalami kenaikan sebesar 1,16%

Persentase kenaikan realisasi bagian sekretariat BSKDN

- Bagian perencanaan mengalami kenaikan sebesar 1,56%
- Bagian umum mengalami kenaikan sebesar 0,82%
- Bagian keuangan mengalami kenaikan sebesar 0,16%
- Bagian SDMO mengalami kenaikan sebesar 2,27%






Rapat Pembahasan Kelengkapan Informasi MetaData ,serta Finalisasi Indikasi Indikator kegiatan dan Usulan RO Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029

Rapat dilaksanakan pkl. 13.00 s.d 17.00 WIB melalui zoom meeting yang dipimpin oleh Biro Perencanaan Kemendagri dan dihadiri oleh UKE I lainnya dan Bagian Perencanaan. Rapat Pembahasan Kelengkapan Informasi Meta Data, serta Finalisasi Indikasi Indikator kegiatan dan Usulan RO Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 lingkup Kemendagri bertujuan untuk berkoordinasi penajaman RO Prioritas Nasional BSKDN dalam RPJMN 2025-2029;

Hal-hal yang berkembang dalam rapat:

- Daftar Usulan RO RPJMN 2025-2029 yaitu Penguatan Strategi Kebijakan Pusat dan Daerah dan Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- Perubahan nomenklatur RO sebelumnya Penguatan Strategi Kebijakan Pusat dan Daerah menjadi Rekomendasi strategi kebijakan pelaksanaan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Dalam Negeri;

- Perubahan nomenklatur RO sebelumnya Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah menjadi Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah berkategori "Baik".
 - Kaitan dengan RO Prioritas Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah berkategori "Baik" yang sebelumnya pada level RO Prioritas di usulkan untuk menjadi Kegiatan Prioritas (KP);
 - Pada Kegiatan Prioritas Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah berkategori "Baik" akan dilakukan pembahasan pada forum.
 - Untuk ITKPD perlu dilakukan pembahasan lebih komprehensif untuk mendorong dan mendukung IKU Kemendagri serta percepatan proses penyusunan regulasi terkait dengan ITKPD.
- 

Serba Serbi Oktober

Rapat Kemajuan Pelaksanaan USAID ERAT Triwulan 4 Tahun Fiskal 2024

Rapat dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Fungsional Pranata Humas Muda Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Pusfasker) Setjen, serta dihadiri oleh Pimpinan USAID ERAT, Sdr. Erman Rahman dan Tim, dan perwakilan masing-masing Implementing Agency.

Pada rapat dipaparkan penguatan bahwa program USAID ERAT bermaksud untuk mendukung koherensi kebijakan nasional dan daerah melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi (M&E). Salah satu langkah utama adalah penyusunan background paper terkait desentralisasi untuk mendukung RPJMN 2025-2030. Selain itu, terdapat pengembangan produk hukum di daerah terkait perlindungan kelompok disabilitas di Sumatera Utara, Sumenep, dan Gowa.

USAID ERAT juga melaporkan bahwa telah dilaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan layanan publik, termasuk akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di beberapa daerah seperti Sumenep dan Lamongan, serta peningkatan akses informasi publik di daerah melalui kolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat. Kerja sama dengan sektor swasta juga diperkuat dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengentasan masalah stunting melalui donasi swasta.



USAID ERAT juga telah memetakan tantangan yang dihadapi oleh Pemda sehingga menghambat proses pembangunan daerah, termasuk meliputi tingginya mutasi pegawai dan kesulitan dalam koordinasi antarinstansi di tingkat daerah. ERAT bermaksud dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mencapai hasil yang lebih optimal. ERAT mendorong pemda untuk lebih fleksibel dalam melaksanakan program, sambil tetap berpedoman pada prinsip kerja kolaboratif dan pembelajaran adaptif (CLA)

ERAT juga menyampaikan upayanya dalam meningkatkan kualitas pembinaan tata kelola inovasi daerah, di mana saat ini pemda mengalami kebingungan dengan banyaknya kementerian/lembaga pengampu inovasi daerah, dari mulai BRIN, BSKDN Kemendagri, KemenPAN, maupun LAN. Diharapkan pembinaan inovasi akan lebih terintegrasi dan koordinasi antar K/L dapat ditingkatkan sehingga memudahkan proses pembinaan inovasi daerah.

Bagian Perencanaan akan terus memantau dan mendukung implementasi program USAID ERAT, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien, termasuk dalam hal pembinaan inovasi daerah yang lebih baik.

Pembelajaran implementasi USAID ERAT (1/2)

Perbaikan peraturan dan kelembagaan (sisi supply)

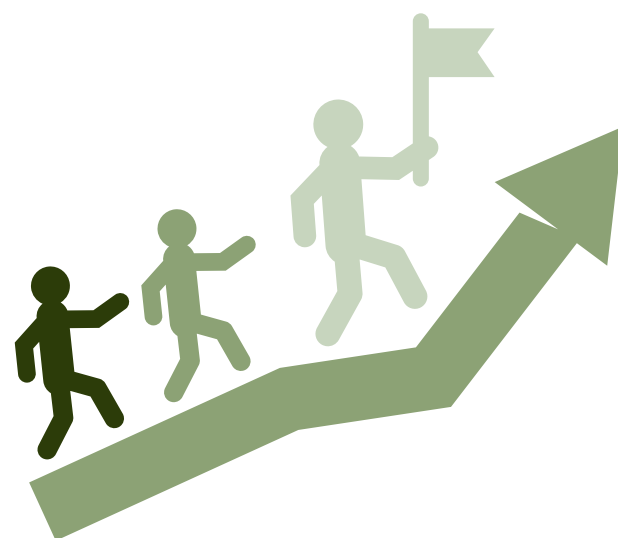
Peningkatan kesadaran publik dan pengakuan masyarakat (sisi demand)

"MODEL" AKSELERASI PRIORITAS DAERAH

1. Padu padan data
2. Verifikasi-validasi data melalui kolaborasi dengan desa dan stakeholder lain
3. Mobilisasi sumber daya publik (penganggaran), swasta, dari masyarakat
4. Pelaksanaan program dan inisiatif untuk mengatasi masalah

1. Mengatasi persoalan mutasi pegawai yang tinggi
2. Meningkatkan kesadaran pemda mengenai pentingnya partisipasi masyarakat
3. Membangun kesadaran dan partisipasi "masyarakat sipil" untuk menghubungkan komunitas dengan pemerintah

1. Memperbaiki kualitas target program
2. Sumber daya publik lebih efektif dan efisien
3. Mendorong kolaborasi



Serba Serbi Oktober

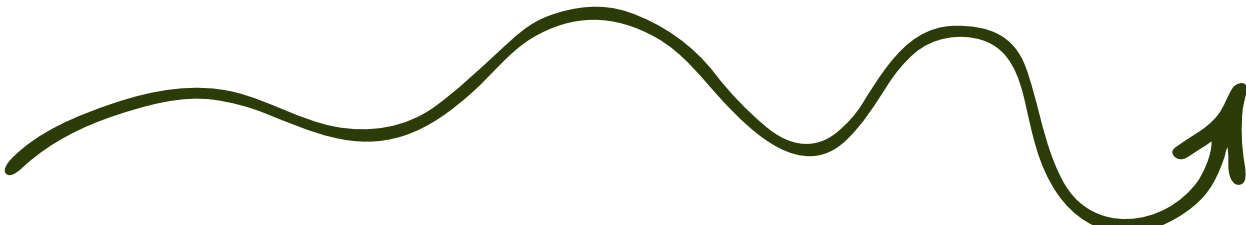

Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Rapat diadakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Rapat bertempat di Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko PMK, Kemendes, Kemenkum, KemenLHK, serta perwakilan masing-masing UKE I lingkup Kemendagri

Pembahasan dalam rapat difokuskan pada mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengaturan hak serta kewajiban pimpinan dan anggota BPD. Didiskusikan muatan pengaturan bahwa pengisian keanggotaan BPD harus dilaksanakan secara demokratis, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Untuk memastikan proses ini berjalan baik, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan yang terdiri atas perangkat desa dan masyarakat lainnya dengan jumlah yang proporsional.

Diskusi yang berlangsung juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat, terutama keterlibatan perempuan, dalam memperkuat legitimasi BPD sebagai lembaga perwakilan desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterwakilan dan inklusi gender dalam pengambilan keputusan desa.



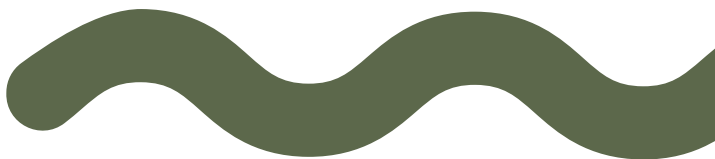


Pada pembahasan juga didiskusikan penambahan Pasal 78A dan 78B, mengenai hak-hak keanggotaan BPD terkait tunjangan dan peningkatan kapasitas. Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Tunjangan ini mencakup tunjangan pelaksanaan tugas, fungsi, serta tunjangan lain yang dibayarkan setiap bulan. Besarannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota. BPD juga mendapat biaya operasional yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan.

Pembahasan juga menyentuh pentingnya program peningkatan kapasitas, di mana anggota BPD mendapatkan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, serta kesempatan untuk kunjungan lapangan. Selain itu, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat memberikan penghargaan bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Disepakati bahwa penguatan kapasitas BPD melalui tunjangan, pelatihan, dan penghargaan sangat penting untuk memastikan kinerja lembaga berjalan dengan baik.

Draf awal menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah desa diatur oleh Kemendagri dengan berkoordinasi dengan Kemendes, namun hal ini diminta untuk di_pending_ oleh Kemendes karena perlu menunggu hasil koordinasi dengan Kemenkopolkam. Sedangkan KemenLHK memberikan beberapa perbaikan redaksi pada pengaturan seputar desa yang wilayahnya masuk dalam area konservasi, karena dalam PUU yang lebih tinggi penamaan yang digunakan adalah: Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Bagian Perencanaan akan terus memantau perkembangan dan pelaksanaan regulasi ini guna memastikan implementasi yang efektif dan akan dilakukan pencermatan terkait keterhubungan penerepan regulasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN, khususnya dalam menyusun strajak yang mendukung pembangunan desa.



Serba Serbi Oktober

Rapat Internalisasi Evaluasi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2019- 2024

Rapat dilaksanakan pukul 13.30 WIB s.d 17.00 WIB di ruang Aula BSKDN yang dipimpin oleh Kepala BSKDN dan dihadiri oleh bagian lingkup BSKDN. Rapat Internalisasi Evaluasi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2019- 2024 bertujuan untuk pemantauan dan evaluasi terkait capaian kinerja pada setiap komponen di BSKDN;

Dalam Rapat Internalisasi Evaluasi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2019- 2024 ada beberapa bahasan dari setiap komponen, adapun poin yang didapatkan sebagai berikut:

1. Pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Proyeksi Realisasi s.d Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.56.306.161.272 atau 99,97%.
2. Pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri s.d Bulan Oktober 2024 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp.(15.259.048) atau -0,03%, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Pusat Inovasi terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp.5.727.841;
- Pada Bagian Perencanaan terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp.5.574.031;
- Pada Bagian Umum terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp.1.194.061;
- Pada Bagian Keuangan terdapat potongan otomatis SPM sebesar Rp.2.677.971;
- Pada Bagian SDMO terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp.85.144.

Rumusan indikator kinerja BSKDN yaitu jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri.

Tidak adanya standar kualitas baku yang dapat dijadikan patokan bagi para 'user' termasuk Menteri Dalam Negeri untuk menilai kualitas sebuah rekomendasi strategi kebijakan;

Tidak adanya mekanisme terstandar untuk penelusuran (tracing) tindak lanjut rekomendasi atau disposisi Menteri Dalam Negeri kepada Unit Kerja Eselon I lainnya dalam lingkup Kemendagri. Hal ini menyebabkan BSKDN sulit untuk mengukur tingkat implementasi (Implementability), relevansi, serta kebermanfaatan kajian dan rekomendasi kebijakan yang di keluarkan oleh BSKDN dalam lingkup Kemendagri.

selanjutnya BSKDN diharapkan untuk terus mampu meningkatkan kualitas kinerja pada setiap komponen agar tercapai tujuan yang diharapkan.



Serba Serbi Oktober


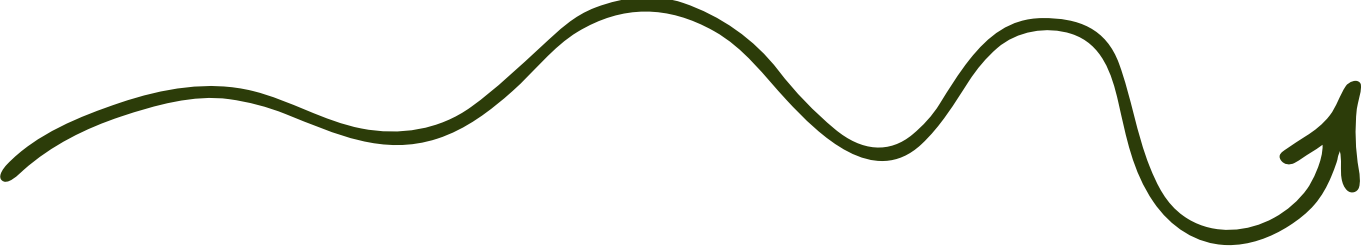
Rapat Persiapan Presentasi Kepala Daerah Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024

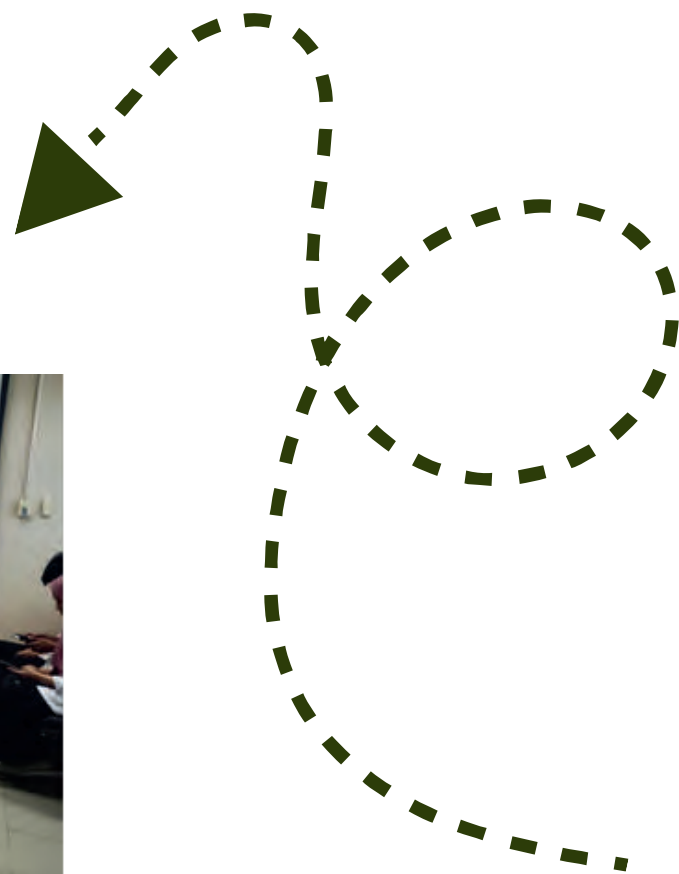
Rapat dilaksanakan pukul 13.00 s.d 14.45 pada ruang rapat lantai 5 pusat inovasi dipimpin oleh kepala pusat inovasi dan dihadiri oleh lingkup BSKDN dan bagian perencanaan. Rapat ini bertujuan untuk Persiapan Presentasi Kepala Daerah Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024;

Dalam rapat ini dibahas beberapa poin sebagai berikut:

- Kegiatan IGA ini sudah memasuki tahap ke-3 yaitu presentasi KDH yang akan dilaksanakan pada 28-30 Oktober 2024, selanjutnya tahap 4 validasi lapangan akan dilaksanakan pada 4-15 November 2024, tahap 5 penerimaan trophy akan dilaksanakan pada 5 Desember 2024.
- Pelaksanaan kegiatan tahap 3 akan dilaksanakan di Ruang RSU dan Situation Room pada lantai 3 gedung A Kementerian Dalam Negeri.
- Jumlah daerah yang akan diundang yaitu 55 (10 Provinsi, 22 Kabupaten, 11 Kota, 4 Perbatasan, 4 Tertinggal, dan 4 Papua);
- SK Tim terdiri dari 17-18 tim eksternal dan 17 yang telah terkonfirmasi sebagai juri penilaian;
- Juri akan disesuaikan kepakaran dan pokja dalam menilainya, terkhusus Papua akan pasti dinilai oleh BP3OKP dan perbatasan akan dinilai oleh BNPP;
- Waktu presentasi yaitu 15 menit untuk paparan dan 15 menit untuk tanya jawab;



- 
- 
- Terkait panitia kegiatan tahap 3 terdapat dari bagian perencanaan yaitu Moderator pada ruangan RSU yaitu kepala BSKDN, Plh. Ses BSKDN, dan Pak Awan Pusat Inovasi; Notulen ruangan situation room yaitu Fajri Bagren dan Ahdaniyah Pusat Inovasi; Konsumsi yaitu Citra Bagren, Bu Titi, Bu Ingan.
 - Mengenai anggaran untuk kegiatan ini sudah sangat dioptimalisasikan karena sudah banyak beberapa yang dikurangi dan dimaksimalkan penggunaan anggarannya. Anggaran yang diharapkan diawal 90jt untuk 6 orang juri sekarang telah dioptimalisasikan menjadi 90jt untuk 17-18 orang juri.
 - Terdapat pesan yang ingin disampaikan mengenai kerjasama Pusat Inovasi dengan perguruan tinggi diharapkan terdapat MOU yang telah masuk seperti dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Hassanuddin, dan terdapat 5 perguruan tinggi yang telah mengajukan kerjasama, bagian Pusat Inovasi berharap terkait hal tersebut untuk dapat tindak lanjuti.



Serba Serbi Oktober

Rapat Reviu APIP Terkait Buka Blokir Automatic Adjustment BSKDN TA.2024

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 17.00 WIB di ruang rapat Bagian Perencanaan yang dipimpin oleh APIP Itjen Kemendagri dihadiri Bagian Perencanaan. Rapat reviu APIP pembahasan buka blokir automatic adjustment tahap II BSKDN Kemendagri TA.2024 bertujuan untuk mereviu data dukung pada TOR dan RAB yang diusulkan

Perlu dilakukan perbaikan terhadap TOR dan RAB usulan buka blokir automatic adjustment tahap II dan melengkapi data dukung sesuai hasil reviu. Agar dalam penyusunan RAB mematuhi standar biaya sesuai dengan PMK No. 49/2023 & Permenkeu No. 113/2023. Pada kegiatan paket perjalanan dinas agar dirinci yang telah memiliki harga satuan dan terhadap kegiatan yang belum diatur dalam peraturan tersebut agar melampirkan data dukung komponen pembentukan harga yang disampaikan

Bagian Perencanaan siap mengawal proses buka blokir automatic adjustment tahap II BSKDN Kemendagri mengalami kenaikan sebesar 2,27%





Rapat Persiapan Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Pemberian Penghargaan IGA Tahun 2024

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat IV dan dipimpin oleh Kepala BSKDN, dihadiri oleh para juri dan perwakilan para juri secara daring, dan perwakilan BSKDN secara daring dan luring. Juri berjumlah 18 orang terdiri dari perwakilan Kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi dan media nasional.

Arahan Kepala BSKDN Kemendagri:

1. Mengingatkan amanat Mendagri agar dalam pelaksanaan Pemberian Penghargaan IGA Tahun 2024 objektif dan akuntabel.
2. Jumlah daerah yang telah menginput di aplikasi indeks inovasi daerah sebanyak: 529 daerah atau naik sebesar 0,4% dari tahun lalu (data sd 22 Agustus 2024), dengan rincian sebagai berikut:
 - Provinsi: 38 daerah
 - Kabupaten: 398 daerah
 - kota: 93 daerah
 - dan daerah yang tidak menginput: 17 daerah

Paparan Presentasi Kepala Daerah akan dilaksanakan 28 s.d 30 Oktober 2024 di dua tempat (RSU Kantor Pusat dan Command Center BSKDN, dan akan diikuti oleh 55 daerah.

Validasi ke lapangan akan dilaksanakan tanggal 4 s.d 15 November 2024 dibagi dalam 3 wilayah:

- Wilayah Barat: Sumatera
- Wilayah Tengah: Jawa dan Kalimantan
- Wilayah Timur: Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua

Daerah yang akan menjadi Nominator Penghargaan IGA Tahun 2024 berjumlah 42 daerah. Rapat dilanjutkan dengan paparan Analisis Kebijakan Muda Pusat IV. Pedoman Teknis Paparan Presentasi Kepala Daerah. Tata Tertib pelaksanaan Paparan Presentasi Kepala Daerah. Sistematika Paparan Presentasi Kepala Daerah dan Mekanisme penilaian Paparan Presentasi Kepala Daerah.

Serba Serbi Oktober

Workshop Pembinaan JFAK di Lingkungan Pemda untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif.

Acara diselenggarakan oleh Bagian SDMO bekerjasama dengan SKALA, bertempat di Command Center BSKDN Kemendagri dan diikuti oleh perwakilan unit kerja lingkup BSKDN dan beberapa perwakilan instansi terkait. Rapat ini dipimpin oleh Kepala BSKDN, dan dihadiri oleh pembicara dari beberapa instansi, termasuk Deputi Bidang Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, serta Pj. Sekda Provinsi Papua Barat

Dalam rapat ini, dibahas mengenai tata kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat akselerasi pelayanan dasar yang inklusif di Indonesia. Dibahas terkait pentingnya integrasi dan pembinaan yang lebih baik terhadap JFAK agar mampu mendukung kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat daerah.

Dipaparkan juga penjelasan mengenai upaya pembinaan JFAK secara nasional, di mana peran JFAK sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Sementara itu dibahas regulasi dan kebijakan yang terkait dengan Jabatan Fungsional, termasuk tantangan dalam harmonisasi kebijakan di antara kementerian dan lembaga, yang perlu ditingkatkan agar fungsi JFAK dapat lebih optimal.

Lebih lanjut dalam diskusi juga dibahas tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memanfaatkan JFAK. Disebutkan pentingnya pemahaman pimpinan daerah terhadap peran, tugas, dan fungsi JFAK, terutama dalam hal bagaimana pimpinan daerah dapat mengoptimalkan potensi JFAK untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Workshop ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) untuk meningkatkan kapasitas analisis dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan daerah (Pemda). Tujuan utama adalah mempercepat implementasi layanan dasar yang inklusif guna menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Bagian Perencanaan akan terus memantau dan mendukung implementasi program pembinaan JFAK, serta memastikan koordinasi yang lebih baik antara BSKDN dengan mitra kontributor kegiatan, yakni SKALA.



Serba Serbi Oktober

Rapat Evaluasi Serapan Mingguan

Rapat dilaksanakan pukul 15.00 s.d 16.30 via zoom meeting dipimpin oleh Plh. Ses. BSKDN dihadiri oleh lingkup BSKDN. Rapat ini bertujuan untuk evaluasi serapan mingguan. Dalam rapat ini dibahas beberapa poin sebagai berikut:

- Pusat 1 : pagu revisi 100% (Rp. 1.585.000.000), target realisasi s.d 31 Oktober 78,46% (Rp. 1.243.651.315), realisasi s.d 25 Oktober sebesar 73,46% (Rp. 1.164.370.315), deviasi 0% ;
- Pusat 2 : pagu revisi Rp.1.205.000.000 + pagu blokir Rp.200.000.000 total pagu 1.405.000.000, target s.d Oktober 1,07% (Rp. 14.995.996), realisasi 2,48% (Rp.34.790.996), deviasi 0% (Rp. 15.000)
- Pusat 3 : target realisasi s.d 31 Oktober sebesar 88,51% (Rp. 1.208.137.184), realisasi s.d 25 Oktober sebesar 77,54% (Rp. 1.058.363.684), deviasi 1,78%;
- Pusat 4 : realisasi s.d 25 Oktober sebesar Rp.142.558.000, deviasi per 25 Oktober Rp.465.170.104;
- Bagian keuangan: realisasi s.d 25 Oktober sebesar 79,56% , deviasi 0,04% (Rp.7.622.402), rencana penarikan dana bagian keuangan s.d 31 Oktober sudah terealisasi semua;
- Bagian SDMO: target s.d 31 Oktober 80,52% (Rp.805.162.011), realisasi s.d 25 Oktober sebesar 77,64% (Rp.776.373.960), deviasi 3,58% (Rp.28.788.051);
- Bagian umum: target Oktober 8,04% (Rp.1.403.141.198), terealisasikan s.d 21 Oktober sebesar 77% (Rp.931.121.924), realisasi tersisa Rp. 472.019.274, deviasi 3,40%;
- Bagian perencanaan: pagu Rp. 3.188.901.000, realisasi 72,82% (Rp. 2.322.195.250), target RPD Rp. 72.885.900, realisasi 90,36% (Rp. 65.863.179), deviasi (-Rp. 7.022.721)





Rapat Koordinasi Rekomendasi dan Vasilidasi Izin Perjalanan Luar Negeri

Rapat dilaksanakan di Hotel Orchardz Jayakarta, dihadiri oleh perwakilan dari BPSDM, Fasker, BSKDN, dan komponen kemendagri lainnya.

Perjalanan dinas luar negeri berupa peninjauan kerjasama, tindak lanjut, kunjungan persahabatan, promosi pameran pogensi dan budaya daerah, pendidikan dan pelatihan, studi banding,

Seminar/lokakarya/konferensi/pertemuan internasional, penandatanganan naskah kerjasama. Fasker Kemendagri sudah bekerjasama dengan beberapa universitas luar negeri yaitu Cambridge University, Oxford University, UCLA, DELFT University, Yongnam Korea University.

Perencanaan awal PDLN harus melakukan analisis kebutuhan, menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan di luar negeri, menjalin koordinasi dan pelaksanaan PDLN (tujuan manfaat, dan menentukan rencana tinjau).

Kriteria perjalanan dinas luar negeri berupa transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan perjalanan dinas, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja kemendagri dan pemda, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, kesesuaian pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja kemendagri dan pemda.

Bagian Perencanaan siap mendukung kerjasama kemendagri dengan mitra luar negeri demi kesuksesan dan kelancaran mencapai jejaring kerjasama yang luas, pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu.



Serba Serbi Oktober

Rapat tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 atas Audit Ketaatan dan Kinerja pada Unit Kerja

Rapat dibuka oleh di pimpin oleh Ibu indah dari tim Itjen Kemendagri, dan di hadiri oleh perwakilan dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Pusjakstra Keuda secara Zoom Cloud Meeting.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk itu akan dilaksanakan Rapat Bilateral Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 atas Audit Ketaatan dan Kinerja pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (periode tahun 2019 s.d 2023).

Berdasarkan hasil rakor dengan BPK dan Itjen Kemendagri pada tahun 2023 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri berdasarkan hasil temuan dari Dalnis/Ketua tim Irene Lindri Probosari/ Devita Damayanti masih terdapat 2 temuan yang belum terselesaikan berdasarkan kinerja yaitu : (1) IPKD yang belum sesuai dengan jadwal pada permendagri, dan (2) Belum ada SOP tentang penerapan SPIP di lingkungan BSKDN.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka pemberian penghargaan kepada Kementerian oleh BPK RI atas penyelesaian temuan baik kinerja maupun ketaatan selama periode tahun 2019 s.d 2023. Batas akhir untuk menyelesaikan hasil temuan sampai dengan tanggal 5 November 2024. Tindak lanjut yang dilakukan oleh BSKDN antara lain melengkapi data terkait dengan proses bisnis terkait dengan pengukuran IPKD sesuai dengan Permendagri IPKD,

Serba Serbi Oktober

Rapat Kerja dengan Mendagri dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNPP

Rapat kerja dengan Mendagri dan rapat dengar pendapat dengan kepala BNPP, dilaksanakan pukul 10.00 di ruang rapat Komisi II DPR RI

Perkenalan anggota komisi II DPR RI periode 2024-2029 oleh ketua komisi II dan Perkenalan wamen dan eselon 1 Kemendagri dan BNPP oleh Mendagri

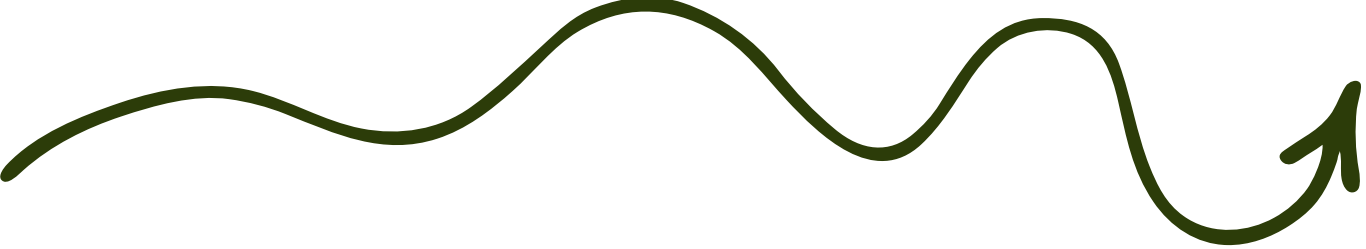

Paparan Program 100 hari Kemendagri yaitu :

- Mendukung penyelenggaraan Pilkada tahun 2024: Dukungan kepada DKPP , Dukungan kepada perangkat penyelenggara pilkada (KPUD, Bawaslu) , Memastikan pemenuhan Anggaran pilkada di daerah (baik penyelenggaraan maupun keamanan pilkada) , Memastikan pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pilkada dan Dukungan update data DP4.

- Jumlah data pemilih per 27 November 2024 sebanyak 207.110.768 jiwa.
- Rakor Forkopimda;
- Digitalisasi Pemerintahan (Layanan dukcapil);
- Layanan Adwil dan Pengelolaan Perbatasan;
- Mendukung program unggulan presiden dan wapres (asta cita)

Anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp. 4.792.328.518 dan BNPP sebesar Rp. 267.135.531.000

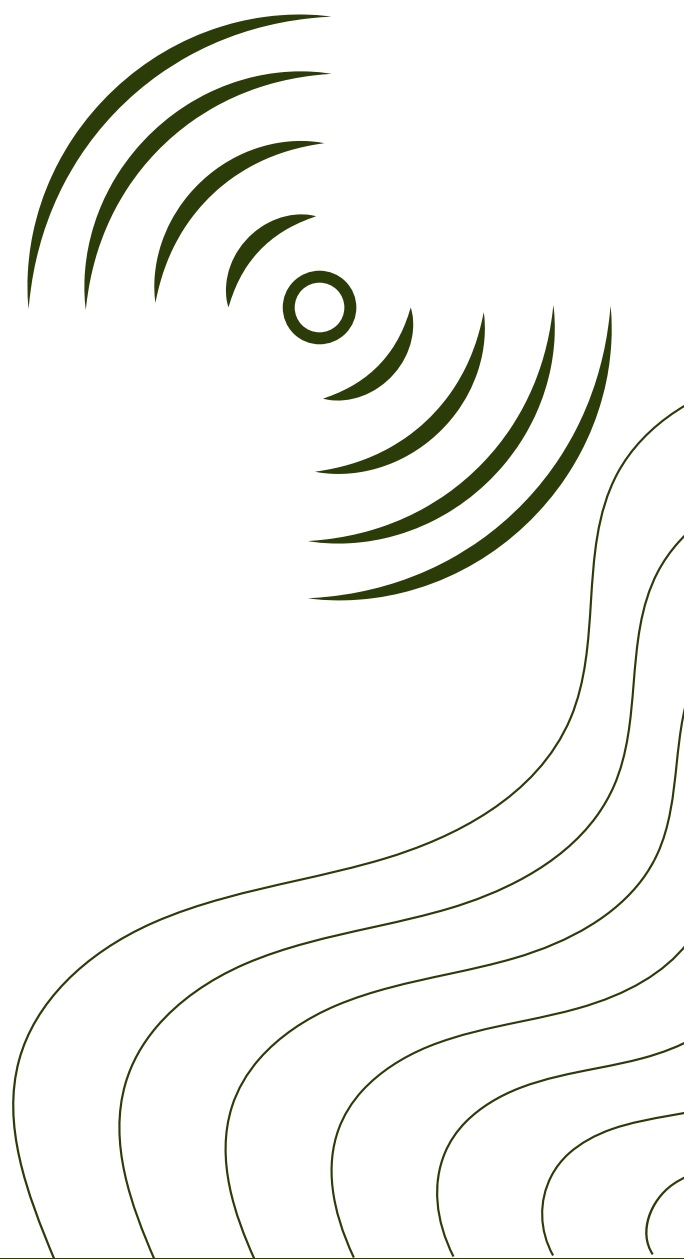
Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya penguatan sistem pemerintahan daerah melalui [program/policy]. Disarankan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan.



Menyepakati perlunya evaluasi menyeluruh atas implementasi kebijakan strategi untuk melihat dampaknya terhadap daerah. Menyusun rencana tindak lanjut untuk penyempurnaan kebijakan yang sedang berlangsung dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaannya di daerah.

Menyepakati perlunya evaluasi menyeluruh atas implementasi kebijakan strategi untuk melihat dampaknya terhadap daerah. Menyusun rencana tindak lanjut untuk penyempurnaan kebijakan yang sedang berlangsung dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaannya di daerah.

Kepala BNPP melaporkan kesiapan dan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi bencana di berbagai daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam penyediaan bantuan.



Serba Serbi November

Rapat Evaluasi Hasil Monev Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat IV dan dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya (Bp. Jonggie), dihadiri oleh para Pejabat Fungsional, Kasubag TU Pusat IV, pelaksana Pusat IV.

Tujuan Monev:

- Mendapatkan gambaran hasil pelaksanaan penerapan aplikasi Puja Indah pada daerah yang telah melakukan penandatanganan pernyataan komitmen.
- Mengetahui kendala dan kekurangan dari sistem sehingga dapat dilakukan penyempurnaan.
- Meningkatkan pemahaman admin daerah dan operator melalui asistensi.

Pelaksanaan Monev Puja Indah:

- Perjalanan dinas dalam rangka monev penerapan inovasi SPBE dengan platform puja indah.
- Penyebarluasan instrumen monitoring dan evaluasi melalui form daring: <https://bit.ly/KuisonerPI2024>, 25 Daerah telah mengisi form kuisoner

Kendala daerah dalam menindaklanjuti pernyataan komitmen yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut:\

- Terbatasnya anggaran di daerah
- Minimnya sarpras di daerah dalam mendukung operasional penerapan aplikasi Puja Indah seperti computer dan akses internet
- Adanya permasalahan SDM terkait pergantian SDM pada bidang yang mengoordinir penerapan aplikasi Puja Indah yang menyebabkan informasi maupun penerapannya terputus, Kekurangan SDM yang memahami penggunaan aplikasi.
- Banyaknya aplikasi yang telah dimiliki oleh daerah
- Khusus daerah dengan tahun PK sebelum 2021, terdapat kendala khusus yakni terhentinya proses kegiatan pasca covid 19 dan terputusnya informasi terkait proses penandatanganan PK penerapan puja indah.
- Masih ditemukan error dan bugs dalam aplikasi Puja Indah sehingga menyulitkan daerah dalam penginputan data

Perkembangan Daerah Penerapan Puja Indah: Pada periode 2018 s.d. 2024, 176 Daerah telah menandatangani Pernyataan Komitmen Penerapan Puja Indah.

Rencana Tindaklanjut Yang Akan Dilakukan :

- Untuk mengatasi kendala pada keterbatasan kapasitas SDM, pemerintah daerah didorong untuk segera melakukan percepatan penetapan SK Tim Penerapan Puja Indah dan menyelenggarakan Bimtek kepada admin Perangkat Daerah dan Operator dengan fasilitasi Kemendagri. Kemendagri menyelenggarakan layanan konsultasi dan bimbingan teknis bagi admin daerah, baik secara daring maupun luring.
- Untuk mengatasi minimnya anggaran di daerah penerapan, pemerintah daerah didorong untuk memasukkan penerapan aplikasi Puja Indah sebagai bagian dari program/kegiatan di daerah. Kemendagri akan berupaya meningkatkan anggaran dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Bimtek/Asistensi ke daerah penerapan.

- Pemerintah pusat dalam hal ini BSKDN mengeluarkan pedoman penerapan aplikasi puja indah yang memberikan petunjuk langkah-langkah penerapan aplikasi puja indah.
- Untuk mengatasi kendala Infrastruktur teknologi informasi/ jaringan yang minim, akan dilakukan pendataan daerah penerapan yang mengalami kendala tersebut dan akan dilakukan fasilitasi penyampaian kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Bakti Kominfo).
- Untuk mengatasi kendala pada aplikasi, pada TA 2024 akan tetap diusulkan anggaran terkait penyediaan dan penambahan tenaga ahli penyempurnaan dan maintenance aplikasi termasuk menyiapkan pengintegrasian data



Serba Serbi November

Rapat pembahasan Prosundagri 2025

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Hukum, dipimpin oleh Kabag Perundang-Undangan (PUU) Biro Hukum dan dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kemendagri

Pada rapat dilaksanakan pembahasan terkait usulan penyusunan regulasi masing-masing UKE I yang akan ditetapkan dalam Kepmendagri tentang Program Penyusunan PUU Kemendagri (Prosundagri) Tahun 2025. Adapun yang telah diusulkan dari BSKDN adalah: Revisi Permendagri 17/2016 tentang Pedoman Kelitbangan; Revisi Permendagri 38/2020 tentang IKKD; Revisi Permendagri 19/2020 tentang IPKD; Revisi Permendagri 104/2018 tentang Inovasi Daerah; serta Permendagri tentang IPKD (Total 5 usulan Permendagri)

Adapun telaahan dari Biro Hukum adalah sebagai berikut:

- Revisi Permendagri 17/2016 dan Revisi Permendagri 38/2020 belum bisa dimasukkan dalam Prosundagri 2025 karena sudah 2 tahun masuk dalam Prosundagri

- Revisi Permendagri 104/2018 tentang Inovasi Daerah perlu dilakukan pencermatan lebih lanjut dan Biro Hukum membutuhkan rancangan permendagri dimaksud dilengkapi dengan landasan argumentasi kebutuhan pengaturan yang baru diajukan
- Revisi Permendagri 19/2020 tentang IPKD dan Permendagri tentang ITKPD dapat diterima dan ditekankan agar selesai pada tahun 2025 mengingat kedua Permendagri tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas komponen lain dan untuk ITKPD menjadi perhatian Biro Perencanaan karena akan masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendagri



Rapat Finalisasi Hasil Presentasi Kepala Daerah Dan Persiapan Validasi Lapangan Dalam Rangka Innovative Government Award (IGA) TAHUN 2024

Rapat dibuka serta di pimpin oleh Kepala BSKDN dan dihadiri Kepala Pusat IV serta dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Ahli Muda Pusat IV dan perwakilan (Bagian Perencanaan) para Pejabat Fungsional (Lingkup Sekretariat dan Pusat IV), Kasubag TU Pusat IV, dan pelaksana Pusat IV serta dewan juri perwakilan masing” panitia juri penilai (via daring zoom)

Adanya masukan dari tim Juri Penilai salah satunya adalah dari IPDN (Prof. Hyronimus Rowa) terkait skor aspek dari Indikator Penilai dalam Form Penilaian Validasi Lapangan Untuk Aspek Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024, dalam opsional (Iya/Tidak untuk di pilah lagi terkait kesesuaian pernyataan dari indicator menjadi (Ada/ Tidak) dalam Skor Aspek Penilaian (subtotal jawaban “ya” pada aspek ke-i).

Rencana Pelaksanaan Batch Validasi Lapangan Klaster Wilayah serta pelaksanaan tgl 7 s.d 15 November 2024 sesuai dengan pembagian cluster batch dengan instansi serta tim penilai dan perwakilan pendamping oleh tim BSKDN masing” tim juri/ penilai dalam batch wilayah; Adapun Instrumen Aspek Penilaian Validasi Lapangan TA. 2024 yang terdiri dari:

- Aspek Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah (3 Indikator)
- Aspek Inovasi Unggulan Digital (4 Indikator)
- Aspek Inovasi Unggulan Non-digital (4 Indikator)

Penentuan Nilai Penerima Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 $NilaiIGA=50\%$
 $IIDFinal+50\%$
NilaiPresentasiKDH-ValidasiLapangan



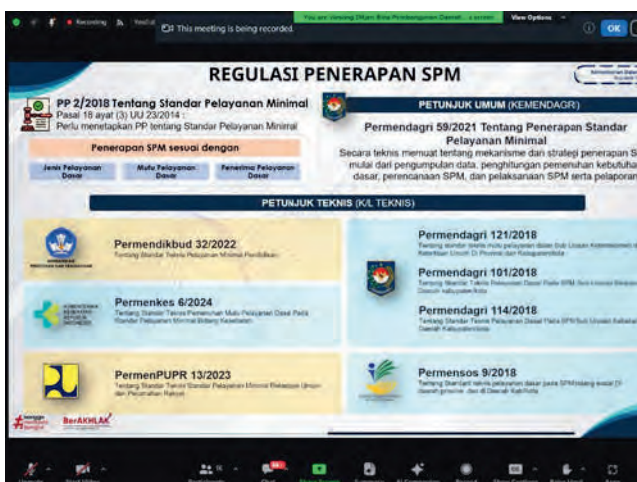
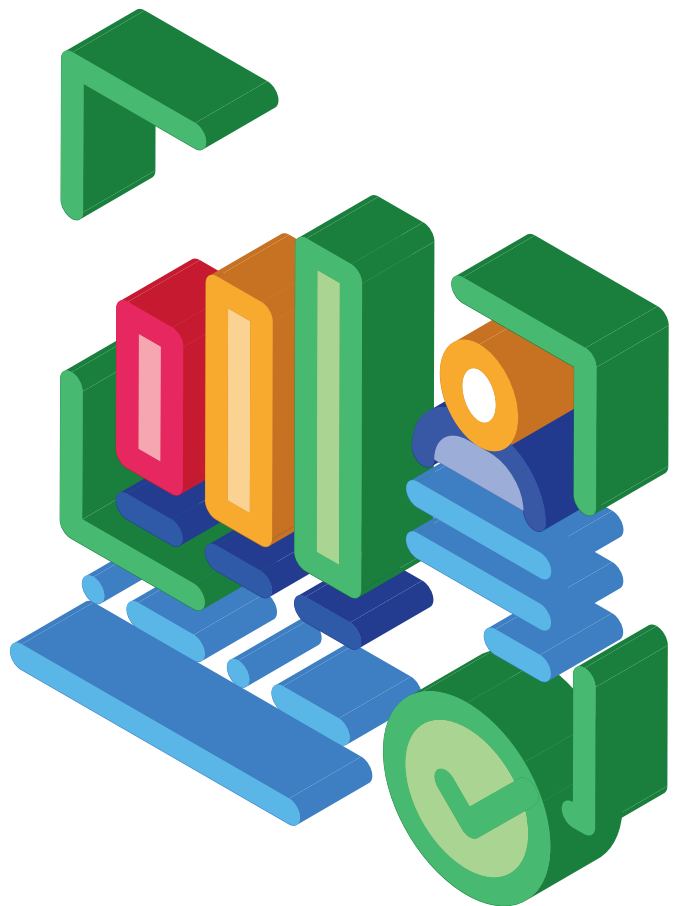
Serba Serbi November

Rapat Evaluasi Laporan SPM TW III 2024

Rapat dimulai pukul 09.00 WIB melalui zoom, dan dihadiri oleh seluruh Pemda yang membidangi SPM.

Rapat membahas tentang evaluasi pelaporan SPM pada TW III TA.2024 dan progress secara nasional. Ditjen Bina Bangda memberikan tanggapan secara langsung kepada Pemda yang membutuhkan panduan dan mengalami kendala dalam pelaporan SPM secara teknis.

Melalui forum tersebut Ditjen Bina Bangda memberikan arahan kepada seluruh OPD terkait peningkatan dalam melakukan pelaporan pelaksanaan SPM di daerah.



Rapat Pembahasan Awal Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan

Rapat dilaksanakan pukul 10.00 s.d 12.00 dilaksanakan di ruangan command center dipimpin oleh Plh. Ses. BSKDN dan dihadiri oleh lingkup BSKDN. Rapat ini bertujuan untuk Pembahasan Awal Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan;



Dalam rapat ini dibahas beberapa poin sebagai berikut:

- Terdapat 8 fokus perkembangan strategi kebijakan;
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif target kinerja 2025 15% 2026 18% 2027 21% 2028 24% 2029 27%;
- Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri target kinerja 2025 50% 2026 55% 2027 60% 2028 65% 2029 70%;
- Dimensi utama IKRK yaitu relevansi, Ketertelusuran, fisibilitas, dan ketersampaian;
- Tahun 2022-2023 terdapat 34 rekomendasi dengan rata2 pertahun 17 rekomendasi.



Serba Serbi November

Rapat Konfirmasi dan Penajaman Metadata Indikator dalam RPJMN 2025-2029 lingkup Kemendagri

Rapat dilaksanakan pkl. 13.00 s.d. 15.00 WIB melalui virtual zoom meeting tentang Konfirmasi dan Penajaman Metadata Indikator dalam RPJMN 2025-2029 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan Rapat Konfirmasi dan Penajaman Metadata Indikator dalam RPJMN 2025-2029 lingkup Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk memastikan kejelasan, ketepatan, dan relevansi indikator-indikator pembangunan yang akan digunakan.

Tantangan dan kendala kondisi penilaian dan penginputan IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) oleh Pemerintah Daerah saat ini yaitu apakah seluruh daerah telah mengakses aplikasi pengukuran IPKD dan bagaimana Status integrasi dengan SIPD. Melakukan konfirmasi kondisi ketersediaan data variabel pembentuk nilai masing-masing indeks daerah.

Update indeks pembentuk IPKD (progres revisi Permendagri IPKD):

- alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10%
- alokasi anggaran belanja infrastruktur sebesar 25%
- mandatory spending lainnya, seperti belanja pegawai maksimal 30%

Melihat bagaimana konsistensi IPKD sebagai indikator PP untuk lima tahun ke depan. Tinjauan terhadap informasi terkait cut-off data IPKD setiap tahunnya dan implikasi terhadap perhitungan capaian target. Terdapat dimensi terkait Opini BPK, apakah akan berpengaruh terhadap timeline perencanaan dan melakukan penentuan target IPKD. Untuk lima tahun kedepan bisa didorong penginputan RO regular



Rapat Rencana Penganugerahan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 Bekerjasama Dengan Provinsi Jawa Timur

Rapat dibuka serta di pimpin oleh Kepala Pusat IV serta dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Ahli Muda Pusat IV dan perwakilan (Bagian Perencanaan) para Pejabat Fungsional (Pusat IV), Kasubag TU Pusat IV, dan pelaksana Pusat IV serta dewan juri perwakilan masing” panitia juri penilai (via daring zoom) serta beberapa perwakilan daerah (via daring zoom)

Adapun hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah:

- **TEMA SEMINAR “Menumbuhkan Budaya Inovasi Daerah Melalui Replikasi Inovasi Daerah Secara Berkelanjutan” (Funding by USAID Erat) serta adapun narasumber terdiri dari:**
 1. Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya
 2. Kepala BRIDA Jawa Timur
 3. USAID Erat
 4. Kepala BSKDN

Peserta Daring : Seluruh Pemda;
Peserta Luring : 250 orang yg terdiri dari (Internal Kemendagri, Internal BSKDN, Eksternal Kemendagri (MITRA BSKDN), Tim Penilai, Pemerintah Daerah Penerima Penghargaan, Kabupaten Kota se - Prov Jawa Timur, Internal OPD Prov. Jatim, Internal BRIDA Jatim, Media

Expo Inovasi Daerah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2024 pukul 09.00 – 17.00 WIB Pembukaan expo akan dilaksanakan bersamaan dengan pembukaan kegiatan seminar Expo terdiri dari 31 booth (25 booth alokasi untuk wilayah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota serta Sebanyak 6 Booth untuk Pihak Sponsor dan Internal BSKDN) Kebutuhan Expo : 31 Booth (yang dibiayai dengan usulan buka blokir automatic adjusment)

Serta adapun yang akan di fasilitasi oleh BRIDA Prov. Jawa Timur antara lain (Hotel, EO/VENDOR, dan toolkit goodybag)

Serba Serbi November

Rapat Pembahasan Rancangan Kepmendagri tentang Pedoman Penerapan Pengarusutamaan Gender

Rapat dilaksanakan via zoom, dihadiri oleh perwakilan dari biro perencanaan, biro hukum, IPDN dan komponen kemandagri lainnya. Pada Rapat tersebut dibahas mengenai beberapa masukan untuk Rancangan kemandagri tersebut berupa:

- Agar dimasukkan substansi yang lebih spesifik terkait undang-undang cipta kerja (masukan biro hukum)
- Terkait substansi pada poin 1, terdapat masukan yaitu UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (masukan ditjen otda)
- Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-6536 tahun 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7.6033 Tahun 2023 agar masuk ke dalam klausul “memperhatikan” (masukan ditjen otda). Namun demikian menurut biro hukum agar tetap dimasukkan dalam klausul “mengingat”.

Penambahan dictum pada batang tubuh yaitu: (a)implementasi dan pelaksanaan kegiatan PUG di lingkungan kementerian dalam negeri mulai dilaksanakan tahun 2025 dan paling lambat selesai tahun 2045 (alternative masukan 1 dari biro organisasi dan tata laksana) (b)implementasi dan pelaksanaan kegiatan PUG termasuk dalam peningkatan dan pemenuhan pelayanan public ramah kelompok rentan di lingkungan kemandagri (alternative masukan 2 dari biro organisasi dan tata laksana).

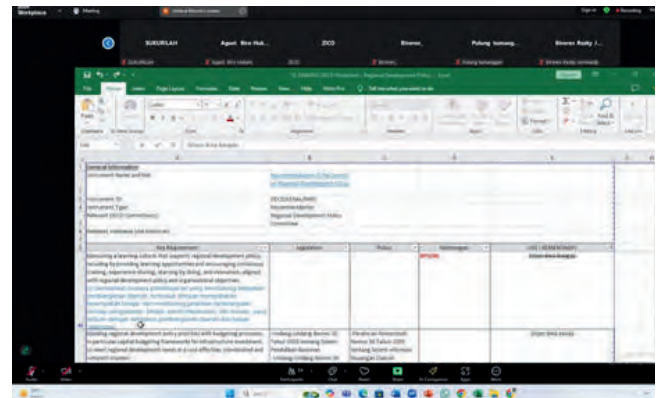
Bagian Perencanaan siap melakukan akselerasi dan pengawalan pada pelaksanaan penyelesaian Rancangan Kepmendagri tentang Pedoman Penerapan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan berkoordinasi lebih lanjut dengan biroren dan biro hukum.

Pembahasan Draft Matriks IM Kerjasama OECD

Rapat dilaksanakan via zoom pukul 13.00 s.d 14.30, dihadiri oleh Perwakilan seluruh Komponen yang ada di Kemendagri

Pada rapat dilaksanakan penyampaian program kerja sama Pembahasan draft Matriks Initial Memorandum (IM) Kerjasama Organization of Economic Co-operation Development (OECD), Memorandum kerjasama dengan OECD berfokus pada latar belakang dan konteks yang mendorong kolaborasi, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong inovasi, dan memperkuat kebijakan publik yang inklusif. Ruang lingkup kerjasama mencakup bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Biro ren memaparkan matriks dari semua komponen untuk di diskusikan bersama dan penyesuaian dengan tugas dan fungsi dari masing-masing komponen, Matriks ini juga menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta menetapkan timeline untuk pelaksanaan kerjasama.



Serba Serbi November

Rapat Evaluasi Serapan Mingguan

Rapat dilaksanakan pkl. 15.30 s.d 16.30 WIB via zoom meeting dipimpin oleh Perencana Ahli Bagren dihadiri oleh perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN Kemendagri.

Rapat Evaluasi Serapan Mingguan bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi dari Oktober hingga November tersebut terdapat peningkatan realisasi dari Pusat dan Bagian. Hasil yang diperoleh dari hasil rapat sebagai berikut:

- Bagian Pustrajak I : realisasi per 31 Oktober yaitu 78,46%, target per 30 November yaitu 87,41% target peningkatan sebesar 8,95% (+Rp. 141.862.500) deviasi masih pada 8,59% sudah terealisasi pada 8 November 0,36% (SP2D Rp. 5.600.000), terdapat 7 policy brief dengan 6 sudah diproses;
- Bagian Pustrajak II: realisasi per 31 Oktober yaitu 70,61%, target per 30 November 80,84% target peningkatan sebesar 10,23% deviasi masih 10,23% per 8 November realisasi masih 0, terdapat 4 policy brief;
- Bagian Pustrajak III: realisasi per 31 Oktober yaitu 88,51%, target realisasi per 30 November yaitu 91,77% target peningkatan sebesar 3,55% deviasi masih 3,55% (Rp. 44.510.500) per 8 November realisasi masih 0;
- Bagian Umum: realisasi per 31 Oktober yaitu 82,35%, target realisasi per 30 November yaitu 92,91% target peningkatan 10,56% deviasi masih -10,56% (-Rp. 1.283.821.712) ;
- Bagian SDMO: realisasi per 31 Oktober 77,65%, target realisasi per 30 November 94,51% target peningkatan sebesar 16,86% deviasi 14,21% realisasi per 8 November 2,65%;
- Bagian Keuangan: realisasi per 31 Oktober yaitu 85,48% target peningkatan 1,25% deviasi masih -1,25% (Rp. 282.556.800);
- Bagian Perencanaan: realisasi per 31 Oktober yaitu 73,06% target realisasi per 30 November yaitu 15,53% deviasi -Rp. 258.687.555 realisasi per 8 November Rp. 16.150.000 (transportasi koordinasi).

Rapat Pemeriksaan Kinerja pada BSKDN TA.2024

Rapat Pemeriksaan Kinerja pada BSKDN TA.2024 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dalam rangka pengukuran kinerja BSKDN berdasarkan hasil rekomendasi kebijakan.

Rapat dibuka oleh dan di pimpin oleh Bapak Plh Sekretaris Badan BSKDN, dan di hadiri oleh perwakilan dari seluruh pusat dan Bagian di lingkungan BSKDN.

Fokus Pemeriksaan Kinerja BSKDN TA 2024 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana "Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan Kemendagri" dengan indikator kinerja "Persentase rekomendasi strategis yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri".

Target yang digunakan sebagai tolok ukur capaian output adalah target yang termuat dalam dokumen perencanaan yaitu 65% yang dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dibagi dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri x 100%.

Berdasarkan Definisi tersebut maka disepakati hal sebagai berikut:

- Bentuk rekomendasi kebijakan meliputi, policy paper, policy brief, artikel kebijakan, Makalah kebijakan, Naskah Akademis, Telaah staf, Memo Kebijakan, Laporan Advokasi Kebijakan, atau Laporan Diseminasi Kebijakan.
- Rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri adalah disposisi Menteri Dalam Negeri yang diteruskan kepada Unit Kerja Eselon 1.

Serba Serbi November

Rapat Sosialisasi Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) di Gedung Sasana Bhakti Kemendagri

Rapat Sosialisasi Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dalam rangka menghindari duplikasi kegiatan statistik.

Rapat Sosialisasi Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dalam rangka menghindari duplikasi kegiatan statistik.

Rapat dibuka oleh dan di pimpin oleh Ibu Maharani dari Direktorat Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik dan di hadiri oleh perwakilan dari seluruh Komponen Kementerian Dalam Negeri

Fokus dalam Rapat Sosialisasi Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) adalah untuk menghindari duplikasi data kegiatan statistik dan sebagai tindak lanjut sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB, Menteri Kominfo, dan Menteri PPN/Bappenas (No. 21 Th. 2023, No. 8 Th. 2023, No. 1 Th. 2023).

Berdasarkan Kesepakatan Rapat, Romantik adalah aplikasi yang menghasilkan rencana kegiatan pengumpulan data yang menghasilkan output seperti indikator, statistik, indeks. Pusdatin Fokus pada pengolahan data dan memberikan data data seperti contohnya indeks, metadata, dan standar data. BPS juga memberikan dan menyediakan data data untuk mensupport kegiatan statistik yang akan dilakukan di Komponen Kemendagri.



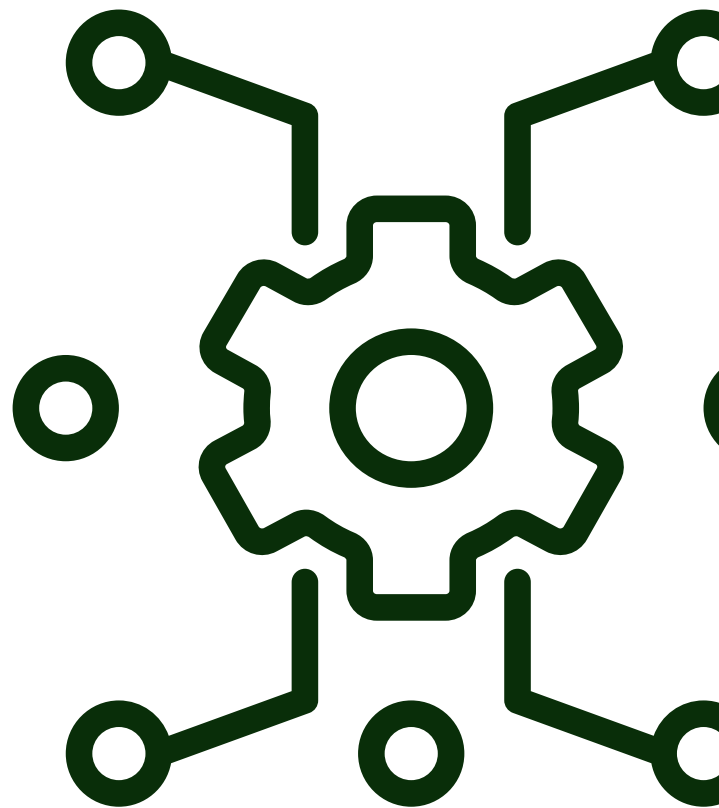
Rapat Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Program dan Anggaran

Rapat mengenai pembahasan program dan anggaran Kemendagri tahun 2025 dengan pimpinan Rapat Komjen Pol. Drs. Tomsu Tohir, M.Si.

Rapat dilaksanakan pukul 10.00-11.45 yang bertujuan untuk membahas perencanaan kegiatan yang mengakomodir komisi II DPR RI di tiap-tiap komponen lingkup Kemendagri.

Bentuk Kegiatan yang bersifat mengakomodir dilaksanakan oleh komponen mengundang 250 orang per-kegiatan.

BSKDN sebagai UK1 menawarkan kegiatan IGA (Innovative Government Award) dalam mengakomodir kegiatan Komisi II.



Serba Serbi November

Rapat Koordinasi Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kemendagri TA.2024

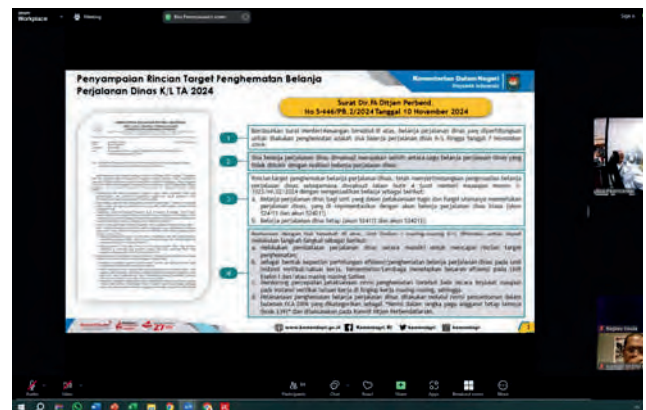
Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 13.00 WIB di ruang rapat Biro Perencanaan Kemendagri dipimpin oleh Kepala Bagian Anggaran Biroren yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri

Rapat Koordinasi Penghematan 50% Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kemendagri TA.2024 bertujuan untuk konsolidasi dan koordinasi penghematan anggaran perjalanan dinas BSKDN Kemendagri TA.2024

Berdasarkan Surat Dir.PA Ditjen Perbend. No S-446/PB.2/2024 Tanggal 10 November 2024 hal penyampaian rincian target penghematan belanja perjalanan dinas Kementerian /Lembaga TA.2024 bahwa Kemendagri mendapatkan target penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.20.943.637.000,- dan BSKDN mendapat penghematan sebesar Rp.157.965.000 (sesuai dengan surat KPPN IV Kanwil Kemenkeu

Sampai saat ini Bagian Perencanaan masih menunggu data dari Bagian Keuangan berdasarkan realisasi sampai tanggal 13 November 2024 dalam mengakomodir realokasi penghematan 50% perjalanan dinas sesuai arahan Presiden.

Bagian Perencanaan BSKDN siap mengawal proses Penghematan 50% Anggaran Belanja Perjalanan Dinas TA.2024 dari total pagu aktif



Rapat Catatan Hasil Reviu Revisi Buka Blokir AA Tahap II

Rapat mengenai catatan hasil reviu atas revisi buka blokir automatic adjustment tahap ii pada badan strategi kajian dalam negeri tahun 2024 dengan pimpinan Rapat Gunawan, S.Sos dan supervisor Tiolan Hutagalung, S.Sos, M.Si dari Itjen.

Berdasarkan Surat Plh Kepala Biro Perencanaan Nomor 900.1.2/1503/Ren/02, Kemendagri meminta reviu dari APIP terkait pembukaan blokir Automatic Adjustment dan pergeseran anggaran TA 2024 tahap II

Mempertimbangkan kembali belanja perjalanan dinas kegiatan survey persepsi publik di daerah alokasi anggaran Rp531.198.000,00 untuk dilaksanakan secara daring dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran. Melakukan perbaikan atas KAK/TOR dan RAB usulan pemanfaatan Automatic Adjustment, akun 521219 belanja barang non operasional lainnya pada kegiatan Ekspedisi pengiriman thropy Penilaian indeks inovasi daerah,

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-580/MK.02/2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, pemanfaatan buka blokir Automatic Adjustment Kemendagri TA 2024 Tahap II dialokasikan pada BSKDN sebesar Rp.2.164.269.000,00 untuk kegiatan penilaian inovasi daerah dan lokakarya nasional. Terdapat sisa pagu Rp.761.770.000,00 yang direncanakan untuk pergeseran anggaran ke Sekretariat Jenderal, serta disarankan peninjauan pada alokasi anggaran belanja jasa lainnya dan detail rincian belanja barang non-operasional.



Serba Serbi November

Rapat Koordinasi Penghematan 50% Anggaran Belanja Perjalanan Dinas lingkup Pusat dan Bagian BSKDN

Rapat dilaksanakan pkl. 15.00 s.d 17.00 WIB di ruang video conference dan zoom meeting dipimpin oleh Plh. Ses. BSKDN dan dihadiri oleh perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN Kemendagri.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan rapat sebagai berikut:

A. Skema 1

- Bagian Pustrajak I : pagu aktif 111.865.073 penghematan 50% (50.399.165)
- Bagian Pustrajak II: pagu aktif 58.879.619 penghematan 50% (22.906.438)
- Bagian Pustrajak III: pagu aktif 22.475.812 penghematan 50% (5.704.534)
- Bagian Pustrajak IV: pagu aktif 48.514.047 penghematan 50% (18.723.652)
- Bagian Umum: pagu aktif 74.51.840 penghematan 50% (31.542.548)
- Bagian SDMO: pagu aktif 52.682.535 penghematan 50% (20.807.896)
- Bagian Keuangan: pagu aktif 780 penghematan 50% (390)

- Bagian Perencanaan: pagu aktif 26.827.502 penghematan 50% (7.880.379)

B. Skema 2

- Bagian Pustrajak I : pagu aktif 113.815.073 penghematan 50% (21.362.890)
- Bagian Pustrajak II: pagu aktif 140.629.619 penghematan 50% (25.385.072)
- Bagian Pustrajak III: pagu aktif 24.405.812 penghematan 50% (7.951.501)
- Bagian Pustrajak IV: pagu aktif 344.874.047 penghematan 50% (56.021.736)
- Bagian Umum: pagu aktif 90.205.282 penghematan 50% (17.821.421)
- Bagian SDMO: pagu aktif 57.032.535 penghematan 50% (12.845.509)
- Bagian Keuangan: pagu aktif 780 penghematan 50% (117)
- Bagian Perencanaan: pagu aktif 81.907.502 penghematan 50% (16.576.754)

C. Perjalanan Dinas

- Perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan diusahakan dapat menerbitkan SP2D setelah perhitungan yang tepat
- Perjalanan dinas yang belum terlaksana mulai malam ini tanggal 13 November 2024 telah mengikuti penghematan 50%
- Perjalanan dinas yang tidak substansial dan judul yang fleksibel bisa digunakan untuk mendukung kegiatan Innovative Government Award (IGA)
- Seluruh pusat dan sekretariat melaksanakan perhitungan data dan nominal yang final dan dilaporkan kepada bagian keuangan maksimal hari 13 November 2024 pukul 18.00
- Pusat 4 akan mengkoordinasikan kegiatan IGA kepada Bapak Kepala BSKDN setelah itu akan ada rapat koordinasi final terkait kegiatan IGA.



Serba Serbi November

Rapat Penataan Kelembagaan Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 149 tahun 2024 tentang Kemendagri

Rapat Penataan Kelembagaan Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 149 tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri Tahun di Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memenuhi Indeks Reformasi Birokrasi.

Rapat dibuka oleh dan di pimpin oleh Bapak Kepala Biro Ortala Kemendagri Evan Nur Setyo Hadi, S.STP., M.A.P dan di hadir oleh perwakilan dari seluruh Komponen Kementerian Dalam Negeri.

Fokus dalam Rapat Penataan Kelembagaan Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 149 tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri adalah untuk memenuhi Indeks Reformasi Birokrasi dan menyesuaikan Nomenklatur di Permendagri Nomor 149 tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Kesepakatan Rapat, Perlu dilakukan perubahan pada unit sekretariat badan dari kondisi existing yang ada saat ini dan dapat menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang ingin digunakan. Untuk Badan yang belum sesuai, harus menyesuaikan dan hanya memiliki 3 Bagian dan 2 Sub Bagian. Untuk Struktural yang mengalami penyesuaian akan mendapatkan penyetaraan jabatan dan hak hak yang bersangkutan. Untuk opsi BSKDN untuk menambah bidang di bawa Kepala Pusat masih belum bisa diwujudkan karena untuk memenuhi Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) Kemendagri yaitu angka 82% demi mewujudkan Kenaikan Tunjangan Kinerja dari 80% ke 100% di Kementerian Dalam Negeri.



Rapat Evaluasi Prosundagri T.A 2024 dan Koordinasi Persiapan Prosundagri T.A 2025 yang dirangkaikan dengan diskusi Pengukuran Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan

Rapat dipimpin oleh Plh. Sekban BSKDN dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing Pusat dan Bagian lingkup BSKDN

Pada rapat dilaksanakan diskusi evaluasi penyusunan Permendagri yang masuk dalam Prosundagri T.A 2024, yaitu: Revisi Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah; Revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Revisi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan. Penyusunan ketiga revisi permendagri tersebut belum dapat diselesaikan di tahun 2024 karena perlu pendalaman substansi lebih lanjut, sehingga diarahkan untuk masuk pada Prosundagri T.A 2025

Disampaikan bahwa hasil koordinasi dengan Biro Hukum, untuk Revisi Permendagri 38 Tahun 2020 tentang IKKD belum dapat dimasukkan dalam Prosundagri 2025 karena sudah melewati dua tahun luncuran Prosundagri.

Juga disampaikan arahan Biro Hukum untuk mengedepankan simplifikasi dengan menggabungkan beberapa Permendagri yang serumpun. Adapun usulan Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD); usulan Revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Revisi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan, ketiganya untuk menjadi prioritas agar diselesaikan di tahun 2025

Pembahasan Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan (IKRK) akan menggunakan Survey Kepuasan Komponen untuk setiap rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan kepada komponen. Kemudian akan disusun Policy Outlook untuk memetakan apa yang bisa dilakukan pada tahun berikutnya dan menjadi dasar dalam membuat perencanaan kegiatan. Masing-masing Pusat dihimbau agar mengundang pakar hukum untuk kelancaran penyusunan Permendagri di tahun 2025

Serba Serbi November

Rapat Persiapan Rakornas Tahun 2024

Rapat Persiapan Rakornas Tahun 2024 dipimpin oleh Kabag Perencanaan dan dihadiri seluruh bagian perencanaan dan dilaksanakan pukul 09.00 s.d 11.00 di Ruang Rapat Bagren.

Hasil dari kegiatan rapat sebagai berikut:

Team Rakornas terdiri dari:

- PIC Sekretariat (pak deden) administrasi sekretaris umum (mba dwi),
- Sub team 1 PR Acara dan Undangan (PIC Kang Rizki) supporting: zaeb, ferry
- Subteam 2 Admin support (Koor Mas Yos) di untuk kontrak hotel mba lina, devi dan caca, untuk kontrak tool kit mba futi dan citra, kontrak EO mas supri, kontrak Vendor Mas ansel
- Sub team 3 anggaran (PIC : bang gunawan) supporting: bang gogo dan fajri
- Sub team 4 Materi, Notulensi dan Perumusan Hasil (PIC: mas ansel dg supporting mba vice, mas fuad, mas adi, mba halluma)

- Sub team 5 support umum (pamong, klinik, tenaga kebersihan) : koordinator Mas baim dibawah pak deden dan mba dwi .

Dijadikan Perhatian:

- rencana rakornas di tanggal 6 desember 2024
- siapkan Konsep undangan (internal dan eksternal), SK panitia, Radiogram (Konsep), audiance terpilah, undangan untuk pembicara
- Siapkan materi presentasi kaban ke pak menteri (laporan persiapan pelaksanaan)
- Report persiapan acara besok ke pa kaban 19 nov 2024
- Penandatanganan untuk ttd sppd (pak deden, pa eko)
- Untuk mengakomodir permintaan penambahan peserta dari daerah, dikomunikasikan dengan EO (membuat daftar online google form)
- Judul rakornas “Lokakarya Nasional Linieritas Arah Kebijakan Pusat dan Daerah dalam rangka Menyukkseskan Asta Cita“

Rapat Bimtek Penguatan Implementasi PUG Lingkup Kementrian Dalam Negeri Tahun 2024

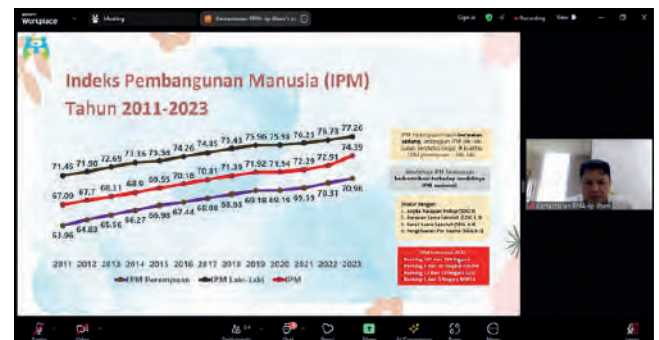
Rapat dipimpin oleh Kementerian PPPA dan dihadiri oleh perwakilan staf bagian perencanaan melalui Zoom Meeting pukul 08.30 s.d 16.00

Hasil dari kegiatan rapat sebagai berikut:

- Kesetaraan Gender masuk dalam Isu strategis RPJPN 2025-2045
- Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan memberi kesempatan kepada perempuan dan laki-laki untuk berperan dan manfaat yang setara dari pelaksanaan pembangunan nasional
- Regulasi diperlukan untuk merespon segala perubahan strategis dan menjawab permasalahan penyelenggaraan PUG saat ini di pusat dan didaerah terutama untuk mencapai target pembangunan kesetaraan gender dalam RPJPN 2025-2045

Penyebab penghambat dalam pembangunan yang inklusif yaitu :

1. Ketimpangan gender yang masih tinggi.
2. Adanya norma sosial dan budaya yang melanggengkan diskriminasi dan perlakuan yang salah



Serba Serbi November

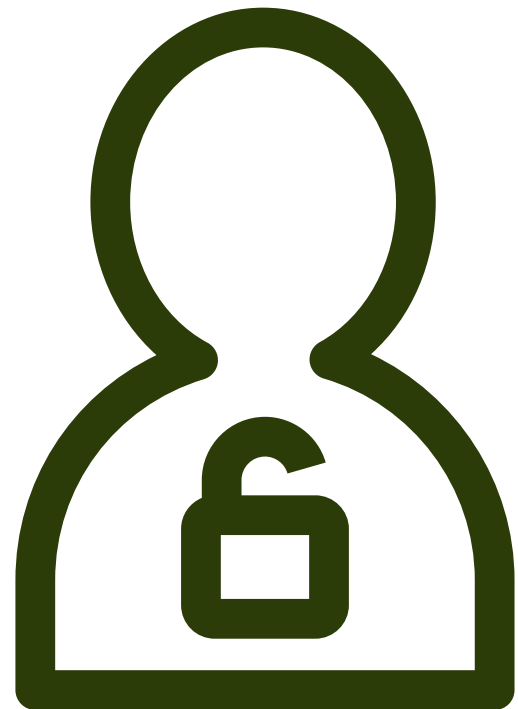
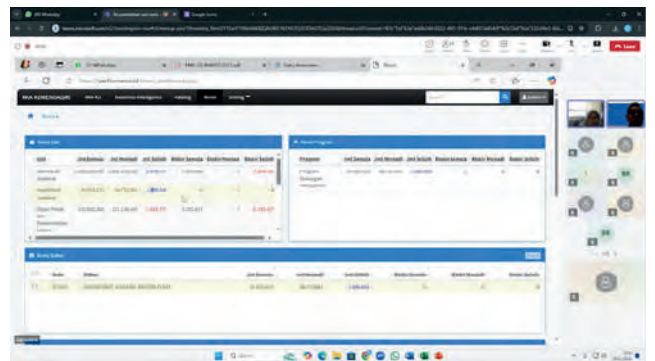
Rapat mengenai Pra Penelaahan bersama Kemenkeu terkait Buka Blokir Tahap II pada BSKDN TA. 2024

Rapat mengenai Pra Penelaahan bersama Kemenkeu terkait Buka Blokir Tahap II pada BSKDN TA. 2024 secara daring melalui mikrosoft teams mulai pukul 13.30-15.30

Hasil dari kegiatan rapat sebagai berikut:

- Sisa pagu blokir BSKDN sebesar Rp.2.926.039.000,00
- Pemanfaatan Buka Blokir Automatic Adjustment Kemendagri TA. 2024 Tahap II pada BSKDN sebesar Rp.2.164.269.000,00, dengan rincian:
 1. Penilaian Inovasi terpadu Lintas KL berbasis Indeks Inovasi Daerah Rp.364.269.000,00;
 2. Lokakarya Nasional Peran Strategis Kebijakan serta Lineritas Kebijakan Rp.1.800.000.000,00.
 3. Sisa pagu Automatic Adjustment BSKDN yang direncanakan akan di geser ke anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp.761.770.000,00;
 4. Kelengkapan data BSKDN sudah memenuhi seluruh kebutuhan data yang dibutuhkan Pra Penelaahan Kemenkeu

5. Terkait untuk peruntukan bahwa BSKDN sesuai peruntukan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri.



Rapat Persiapan IGA Tahun 2024

Rapat tentang Rencana Penganugerahan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 Bekerjasama Dengan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Gedung Aula BSKDN dengan Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Plh Sekretaris BSKDN dimulai pukul 08.30-11.00 WIB

Rencana tahapan pengukuran, penilaian dan pemberian penghargaan IGA tahun 2024 Yaitu: penjaringan, pengukuran, presentasi kdh, validasi lapangan, IGA 2024. Rencana pelaksanaan seminar inovasi daerah dengan tema seminar “Menumbuhkan Budaya Inovasi Daerah Melalui Replikasi Inovasi Daerah Secara Berkelanjutan” dengan jumlah peserta luring sebanyak 250 orang dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah secara daring

Rencana pendayagunaan 31 buah booth expo inovasi daerah yang tersedia Booth sebanyak 31 buah, dengan rincian :

Sebanyak 25 Booth untuk Provinsi (Meliputi Kabupaten dan Kota)
Sebanyak 6 Booth untuk Pihak Sponsor dan Internal BSKDN. Rencana Penganggaran melalui skema buka blokir kegiatan Innovative Government Award (IGA) tahun 2024 :

- Anggaran untuk pelaksanaan validasi inovasi tambahan urusan pemdagri Rp. 53.295.000
- Anggaran untuk pelaksanaan validasi lapangan diwilayah Papua Rp. 34.100.000
- Anggaran untuk pelaksanaan narasumber penilai presentasi kepala daerah Rp. 90.000.000
- Anggaran untuk pelaksanaan Ekspedisi pengiriman logistik ke Surabaya Rp. 8.874.000
- Anggaran untuk pelaksanaan penyediaan booth sebesar Rp. 93.000.000
- Anggaran untuk pelaksanaan penyediaan trophy sangat inovatif Rp. 77.000.000
- Anggaran untuk pelaksanaan sewa tambahan ruangan sebesar Rp. 8.000.000

Serba Serbi November

Rapat Bimtek Penguatan Implementasi PUG Lingkup Kementrian Dalam Negeri Tahun 2024

Rapat Bimtek Penguatan Implementasi PUG Lingkup Kementrian Dalam Negeri Tahun 2024 dilaksanakan pukul 09.00-16.00 di SBP Kemendagri gedung C lantai 3

- Hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut: Bentuk ketidakadilan gender terdiri dari : stereotype, marjinalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan yang dilakukan dirumah, diruang publik ataupun tempat kerja;
- Faktor kesenjangan gender terdiri akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
- Kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan menjadi salah satu fokus presiden dan wakil presiden yang terpilih masuk ke dalam visi “Bersama Indonesia Maju Bersama Indonesia Emas 2045” pada Asta Cita 1 (Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) dan Asta Cita 4 (Pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas;
- Kerangka kerja logis pembangunan kesetaraan gender terdiri dari input, process, output, outcome, dan impact ;
- GAP 9 langkah direvisi menjadi 4 langkah yaitu : tentukan satu isu gender strategis dari indikator pembangunan kesetaraan gender (misal: IPG, IDG, IKG), identifikasi faktor faktor penyebabnya, susun rencana aksi (menggunakan kerangka kerja logis) yang terdiri dari 5 elemen (input, aktivitas, output, outcome, impact), identifikasi kementrian/lembaga yang relevan;
- Anggaran semula Gender Budget Statement (GBS) dan ToR, revisi menjadi Gender Action Budget (GAB)



Rapat Penelaahan Usul Revisi Anggaran Lingkup Kemendagri TA. 2024

Rapat Mengenai Penelaahan Usul Revisi Anggaran Lingkup Kemendagri TA. 2024 pukul 14.00 secara daring via Ms. Teams. Berdasarkan Surat Mendagri kepada Menkeu No.900.2/4999/SJ tanggal 1 Oktober 2024 dan Surat Menkeu kepada Mendagri No.S-373/MK.2/2024 tanggal 2 November 2024 mengenai usulan pemanfaatan blokir Automatic Adjustment Kemendagri mendapat persetujuan Menkeu sebesar Rp 25.430.793.000,- dari usulan total sebesar Rp 43.469.193.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Dukungan penyelenggaraan Tusi Kemendagri sebesar Rp 12.544.178.000,-
- Pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan kemendagri sebesar Rp.12.886.615.000,-
- Usulan revisi anggaran tahap II BSKDN berdasarkan Nota Dinas Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.2/5778/SJ tanggal 11 November 2024, usulan pemanfaatan blokir Automatic Adjustment BSKDN tahap II yang disetujui sebesar Rp 2.164.269.000,-

- Penilaian Inovasi Terpadu Lintas K/L Berbasis Indeks Inovasi Daerah sebesar Rp.364.269.000,-
- Lokakarya Nasional Peran Strategi Kebijakan Serta Linieritas Kebijakan Pusat dan Daerah Tahun 2025-2029 sebesar Rp.1.800.000.000,-

Terdapat pergeseran blokir antar program di Internal BSKDN (dari Program Dukungan Manajemen ke Program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa) sebesar Rp.435.229.000,- dan pergeseran anggaran antar UKE I dalam program yang sama (Program Dukungan Manajemen) kepada Sekretariat Jenderal sebesar Rp.761.770.000,-, sehingga pagu BSKDN:

Pagu Program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa semula Rp.9.840.000.000,- menjadi Rp.10.275.229.000,- dengan blokir semula Rp.1.729.040.000,- menjadi Rp.0,-

Serba Serbi November

Rapat Rancangan Strategis Kemendagri Tahun 2025-2029

Rapat diselenggarakan oleh Bappenas, dihadiri oleh Kabag Program Bappenas dan Tim serta perwakilan komponen lingkup Kemendagri, rapat berisikan poin-poin kunci sebagai berikut

Konfirmasi mengenai indikator-indikator Renstra, meliputi:

Sasaran Program Pembinaan Inovasi Daerah;

- Rincian output daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri
- Rincian output daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik

Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

- Rician output Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- Rician output Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

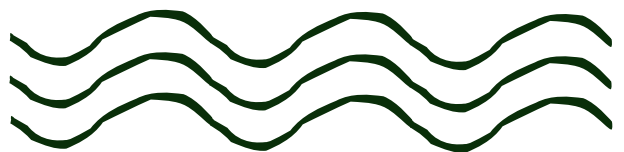
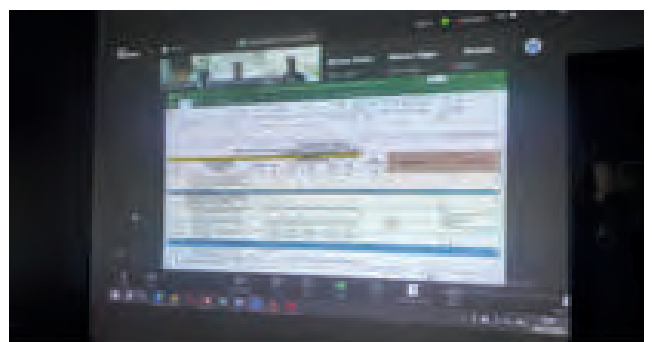
Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

- Rician output Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Identifikasi risiko mengacu pada pedoman manajemen risiko pembangunan nasional.

Bappenas menghimbau agar berhati-hati dalam memetakan nilai Indeks-indeks, nilai "RO tinggi sedangkan outcome tidak berdampak". Indikator jangan sampai tidak sinkron dengan BRIN.

Kolaborasi komponen sangat penting dalam pengambilan kebijakan, agar sesuai dengan Indikator yang sudah ditetapkan



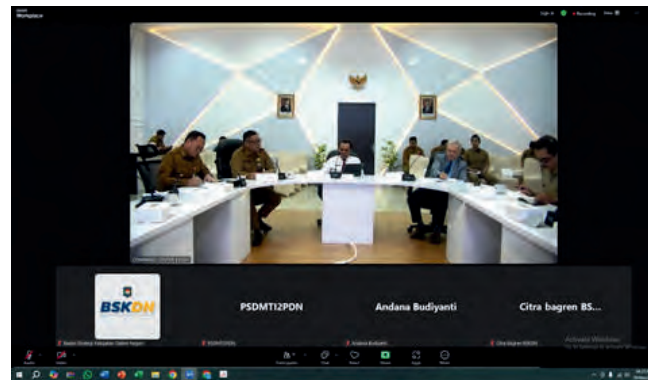
Rapat Penjajakan Kerja Sama dengan Mark Gilbert

Rapat dilaksanakan di Command Center Kantor BSKDN, dipimpin oleh Kepala BSKDN, dihadiri oleh Sekretaris BSKDN, Plh. Kepala Pusat I; Kepala Pusat II, Plh. Kepala Pusat III, dan Kepala Pusat IV

Pada rapat dilaksanakan diskusi tukar pikiran antara Bapak Kepala BSKDN dan para peserta, dengan Mark Gilbert selaku profesional konsultan yang berfokus di bidang desentralisasi dan pengelolaan keuangan daerah

Pada rapat dilaksanakan tanya jawab seputar tuisi BSKDN dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemda, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hasil pertemuan ini akan menjadi catatan untuk memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga think tank yang berbasis di Kanada melalui jaringan yang dimiliki Mark Gilbert

Bagian Perencanaan siap menindaklanjuti arahan Bapak Kepala BSKDN dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pusat Fasker Setjen dalam rangka penyiapan administrasi kerja sama luar negeri



Serba Serbi November

Rapat Bimtek Penguatan Implementasi PUG Lingkup Kementrian Dalam Negeri Tahun 2024

Rapat Bimtek Penguatan Implementasi PUG Lingkup Kementrian Dalam Negeri Tahun 2024 dilaksanakan pukul 09.00-16.30 di SBP Kemendagri gedung C lantai 3

Hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut:

- Bentuk ketidakadilan gender terdiri dari : stereotype, marjinalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan yang dilakukan dirumah, diruang publik ataupun tempat kerja;
- Kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan menjadi salah satu fokus presiden dan wakil presiden yang terpilih masuk ke dalam visi “Bersama Indonesia Maju Bersama Indonesia Emas 2045” pada Asta Cita 1 (Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) dan Asta Cita 4 (Pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas;
- Kerangka kerja logis pembangunan kesetaraan gender terdiri dari input, process, output, outcome, dan impact
- GAP 9 langkah direvisi menjadi 4 langkah yaitu : tentukan satu isu gender strategis dari indikator pembangunan kesetaraan gender (misal: IPG, IDG, IKG), identifikasi faktor faktor penyebabnya, susun rencana aksi (menggunakan kerangka kerja logis) yang terdiri dari 5 elemen (input, aktivitas, output, outcome, impact), identifikasi kementrian/lembaga yang relevan;
- Anggaran semula Gender Budget Statement (GBS) dan ToR, revisi menjadi Gender Action Budget (GAB)
- Kerangka Regulasi, integrasi gender dilakukan dengan menggunakan instrumen dampak penilaian gender dan menyusun norma aturan yang responsif gender, membuka akses dan partisipasi yang setara antara laki laki dan perempuan dalam proses konsultasi publik.

Kegiatan internalisasi berAKHLAK “menuju kemendagri berAKHLAK”

Kegiatan Internalisasi BerAKHLAK "Menuju Kemendagri BerAKHLAK Untuk Indonesia Emas 2045" di Hotel Grand Sahid Jaya. Kegiatan dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Pejabat Struktural dan pejabat fungsional tertentu, serta fungsional umum di lingkungan Kemendagri baik daring maupun luring.

Kegiatan dibuka oleh Hadi Prabowo (Rektor IPDN) mewakili Sekjen Kemendagri:

- Tujuan kegiatan untuk memujudkan Kemendagri BerAKHLAK dan mewujudkan Indonesia Emas 2045
- tidak hanya tahu arti BerAKHLAK tapi juga bisa memantapkan dan mempertahankan integritas
- integritas merupakan keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai norma dan nilai yang berlaku.
- Paparan Menuju Kemendagri BerAKHLAK Untuk Indonesia Emas 2045 CEO & Founder ESQ GROUP)

- Rumus Kinerja juara, kinerja = Kompetensi x Energi
- Tangga Prabowo: Indonesia Emas 1 (2020): Indonesia Berkarakter, Indonesia Emas 2 (2030): Indonesia Sejahtera, Indonesia Emas 3 (2045): Indonesia Adidaya, Indonesia Emas 4 (2085): Indonesia Atap Dunia
- Segitiga GKF (Gerak, Kata, Fokus)
- Kemendagri kementerian pertama yang meluncurkan BerAKHLAK setelah diterbitkannya UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Berpusat pada grand why: Strong why (IQ), Big why (EQ), dan Grand why (SQ)
- Modeling Kinerja Juara: Growth mindset, dan Manajemen talenta
- Rumus kebahagiaan: expectation vs appreciation
- Growth mindset, event + Response = Outcome

Laporan Sekjen Kemendagri yang diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri (Dian Andy Permana)

Serba Serbi November

Rapat Diskusi Pendalaman Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Rapat Diskusi Pendalaman Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilaksanakan via zoom meeting pada pukul 09.00-10.30 WIB dengan pimpinan rapat Bu Santi dari Direktorat Pembangunan Daerah Kedepujian Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas

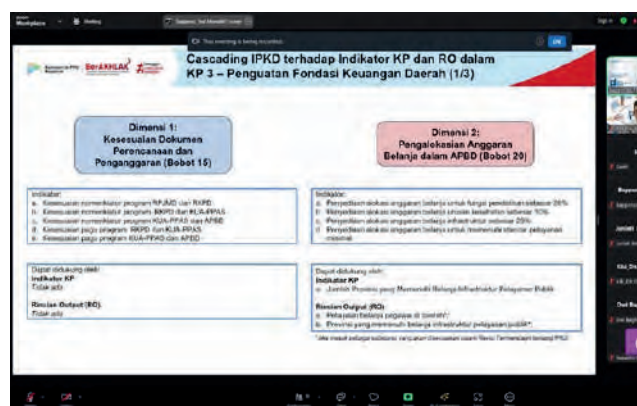
Penguatan fondasi keuangan daerah mengenai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup indikator kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD, RKPDN dan KUA-PPAS, KUA-PPAS dan APBD serta kesesuaian pagu prgram RKPD dan KUA-PPAS, KUA-PPAS dan APBD

Pengalokasian anggaran belanja APBD yang mencakup indikator penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, urusan kesehatan sebesar 10%, infrastruktur sebesar 25%, dan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

Mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah yang mencakup indikator ketepatan waktu dan keteraksesan

Mengenai penyerapan anggaran yang mencakup indikator anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Dasar yang digunakan dalam klasterisasi kemampuan keuangan daerah/kapasitas fiskal (klaster tinggi, klaster sedang dan klaster rendah)



Rapat Pembahasan pengukuran ITKPD Rancangan Renstra 2025-2029

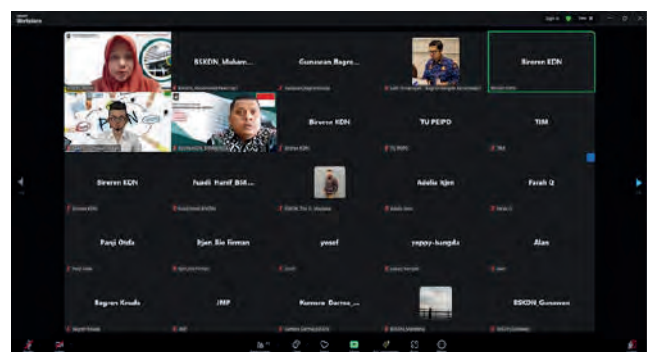
Rapat Pembahasan pengukuran ITKPD Rancangan Renstra 2025-2029 dilaksanakan via zoom meeting pada pukul 10.50 – 12.00 WIB dengan pimpinan rapat Mba Retno dari Biro Perencanaan Setjen

Tujuan Rapat Pembahasan pengukuran ITKPD Rancangan Renstra 2025-2029 adalah untuk menjadikan ITKPD menjadi IKU Menteri Dalam Negeri dengan mengadopsi sistem ITKPD yang telah diterapkan di BSKDN

pelaksanaan kegiatan penilaian ITKPD dilandasi oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.10.5-240 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengukuran ITKPD. Payung hukum tersebut akan dinaikan kedalam tingkat regulasi yang lebih tinggi dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) pada tahun 2025

Indikator yang digunakan dalam pengukuran ITKPD berasal dari 46 Indeks atau data sekunder lainnya yang diampu oleh 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di mana beberapa indeks digunakan secara utuh, beberapa indeks lainnya digunakan secara parsial, serta beberapa data dilakukan pengolahan mandiri agar sesuai dengan konsep ITKPD yang telah disusun.

Pada tahun 2025 berfokus pada dokumen pengukuran dan tahun selanjutnya menjadi output ITKPD tersebut



Serba Serbi November

Rapat Persiapan Pelaksanaan Lokakarya Nasional bersama tim kemitraan

Rapat dipimpin oleh Plh. Sekban BSKDN dan dihadiri dan dihadiri oleh perwakilan USAID ERAT, Tanoto Foundation, Ironwood Institute, SKALA, STIA LAN, dan Kompas TV

Lokakarya Nasional membuka peluang penting bagi business matching antara pemerintah dan pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, pelaku usaha dapat lebih memahami arah kebijakan pemerintah, sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan kebijakan yang berlaku. Sebaliknya, pemerintah juga dapat menjalin kemitraan yang strategis dengan sektor swasta, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam mendorong investasi dan pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Pihak BSKDN akan memfasilitasi bagi mitra yang perlu bantuan untuk membuat booth, akan tetapi tetap dibiayai oleh pihak mitra sendiri

Pada rapat dijelaskan alasan menjalin kemitraan dengan tamu undangan, karena masing-masing pihak memiliki peran strategis dalam mensukseskan program Presiden terpilih yaitu, Quick Win. Dan memberikan kesempatan bagi Mitra untuk berkomunikasi dan berdiskusi langsung bersama pemerintah daerah. Pada acara kegiatan Lokakarya akan disediakan booth untuk mitra yang berkenan mensosialisasikan brandnya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Konsep kegiatan terdiri dari 3 (tiga) sesi, yaitu ; a. Diskusi panel arah kebijakan pemerintah pusat dan peran pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan sesuai 7 program Quick Win presiden Prabowo, b. Diskusi dan Knowledge Transfer percontohan daerah yang berhasil mengimplementasikan strategi kebijakan dengan baik., c. Presentasi dari pihak Kemitraan tentang profil dan tujuan serta apa saja yang bisa dilakukan dengan pemerintah daerah secara singkat dan efektif.

Finalisasi Pembahasan Integrasi Aplikasi Sirika Kemendagri dengan Aplikasi e-Sakip Reviu Kementerian PAN dan RB

Rapat Pembahasan pengukuran ITKPD Rancangan Renstra 2025-2029 dilaksanakan via zoom meeting pada pukul 10.50 – 12.00 WIB dengan pimpinan rapat Mba Retno dari Biro Perencanaan Setjen

KemenPan-RB memberikan informasi mengenai rencana integrasi aplikasi e-sakip dan aplikasi SIRIKA.

Biro Perencanaan memberikan arahan kepada seluruh UKE I Kemendagri untuk mengunggah dokumen pendukung dalam penilaian SAKIP melalui aplikasi Sirika.

Bagian Perencanaan akan menindaklanjuti arahan Biro Perencanaan dalam mengumpulkan dokumen pendukung SAKIP BSKDN.



Serba Serbi November

Kuliah umum dengan Politeknik STIA LAN Jakarta

Audiensi dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN dengan menyampaikan tugas dan fungsi BSKDN dilanjutkan dengan tanya jawab seputar manajemen SDM lingkup BSKDN

Pada diskusi seputar manajemen kepegawaian BSKDN, dibahas terkait pengisian jabatan tertentu, merujuk pada Kredit Score yang menjadi unsur pertimbangan yang dikoordinir oleh Biro Kepegawaian untuk meninjau kinerja pegawai lalu disesuaikan dengan persyaratan keahlian dan pangkat minimum untuk mengisi jabatan tersebut

setelah sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan study tour melihat Command Center, Ruang Kerja Bagian SDMO, dan Studio Podcast, lalu dilaksanakan tanya jawab seputar penggunaan fasilitas-fasilitas kantor.



Rapat dalam rangka menidaklanjuti hasil Validasi Tambahkan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri TA 2024

Rapat Sidang Pleno Tim Penilai Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 Dilaksanakan di ruang command center pada pukul 10.00 – 11.00 dengan pimpinan rapat oleh Kepala Pusat 4

Inovasi daerah yang divalidasi adalah inovasi daerah yang dikirimkan ke kemendagri. Inovasi daerah yang dikirimkan merupakan inovasi yang diterapkan atau diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah sejak 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023

Inovasi daerah harus memenuhi asas dan kriteria inovasi daerah diantaranya yaitu asas pembaharuan, asas pemanfaatan, asas kepentingan publik, merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat direplikasi/aplikatif

Inovasi daerah bukan merupakan program/kegiatan inovasi yang dilakukan oleh K/L ditingkat nasional. Informasi yang disampaikan sesuai dengan bukti dukung yang diupload ke dalam sistem



Serba Serbi November

Rapat Pembahasan Rancangan Kepmendagri tentang Pedoman Penerapan Pengarusutamaan Gender

Rapat dilaksanakan via zoom pukul 09.00 s.d 11.30, dihadiri oleh Perwakilan seluruh Komponen yang ada di Kemendagri dan Perwakilan dari Kementerian PPA

Rapat ini membahas secara mendalam rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen) tentang Pedoman Penerapan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat tersebut, disepakati pentingnya mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kegiatan di Kementerian. Sebagai tindak lanjut, rancangan Kepmen ini akan segera diselesaikan dan diimplementasikan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam seluruh kebijakan dan program Kementerian Dalam Negeri.

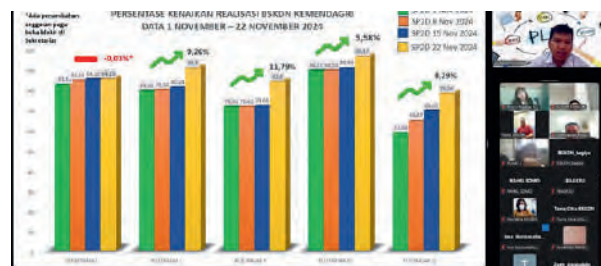
Pada rapat ini akan segera difinalisasi draft rancangan Kepmendagri dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari seluruh peserta rapat dan juga akan dilakukan sosialisasi secara luas kepada seluruh pegawai Kemendagri mengenai isi dan tujuan dari pedoman ini.



Rapat Evaluasi Serapan Mingguan

Rapat dilaksanakan pukul 15.30 s.d 17.00 via zoom meeting dipimpin oleh Perencana Ahli Pertama Bagren BSKDN dan dihadiri oleh lingkup BSKDN. Rapat ini bertujuan untuk evaluasi serapan mingguan. Dalam rapat ini dibahas beberapa poin sebagai berikut:

- Pusat 1 : target 87,41% (Rp. 1.385.513.815), realisasi 80,24% (Rp.1.347.097.500);
 - Pusat 2 : target Rp. 143.688.800 ,realisasi Rp.62.487.653 ;
 - Pusat 3 : target 97,49% (Rp. 1.252.714.684), realisasi 95,46% (Rp. 1.226.598.784);
 - Pusat 4 : target 83,02% (Rp.3.228.684.215) realisasi 78,03% (Rp.3.034.641.077);
 - Bagian keuangan: target 86,57% (Rp. 22.516.595.483) realisasi 86,10% (Rp. 22.238.756.783);
 - Bagian SDMO: target 94,51% (Rp.945.098.365), realisasi 86,40% (Rp.892.483.370);
 - Bagian umum: target 10,56% (Rp.1.709.960.216), realisasi Rp. 22.768.875 deviasi Rp. 851.893.192;
- Bagian perencanaan: target 81,65% realisasi 53,08%;
 - Perkembangan 1-22 Nov Pustrajak 1 (78,46% > 78,82% > 80,24% > 89,5%) tgl 15-22 mengalami kenaikan 9,26%;
 - Perkembangan 1-22 Nov Pustrajak 2 (70,61% > 70,61% > 71,01% > 82,8%) tgl 15-22 mengalami kenaikan 11,79%
 - Perkembangan 1-22 Nov Pustrajak 3 (88,51% > 88,51% > 89,59% > 95,17%) tgl 15-22 mengalami kenaikan 5,58%
 - Perkembangan Pustrajak 4 (57,64% > 63,67% > 68,65% > 76,94%) tgl 15-22 Nov mengalami kenaikan 8,29%
 - - Perkembangan 1-22 Nov Sekretariat (81,52% > 83,69% >84,32% > 84,29%) tgl 15-22 mengalami penurunan (-0,03%)



Serba Serbi November

Rapat Koordinasi Persandian (Keamanan Informasi)

Rapat diselenggarakan oleh Pusdatin, dihadiri oleh Kepala Pusdatin dan Tim serta perwakilan komponen lingkup Kemendagri. Rapat berisikan poin-poin kunci sebagai berikut:

a. Credential Leak

- Hasil Monitoring di darkweb terdapat 78.197 temuan dan kebocoran kredensial dari 382 Web Aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri

b. Probable corporate access

- Hasil pendalaman terdapat 655 temuan kebocoran kredensial dari 54 Web aplikasi yang diduga milik pegawai K/L

c. Vulnerability

- Dampak dari kebocoran kredensial dapat menemukan kerentanan yang terdapat pada web aplikasi

d. Report

- Pemberian report secara berkala ke K/L terkait merupakan bentuk upaya pencegahan yang telah dilakukan

Penanganan Insiden Keamanan Siber merupakan sebuah usaha untuk mendeteksi, melaporkan, menilai, menangani dan merespon serta mempelajari insiden keamanan siber. Respon Insiden Keamanan Siber merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk memitigasi, memperbaiki dan atau mengembalikan sebuah Sistem Elektronik ke kondisi normal.

• Persiapan

1. Tim Tanggap Insiden Siber
2. Komunikasi kepada para pihak
3. Topologi jaringan
4. Identifikasi asset terdampak (server, endpoint, jenis asset (kritikal atau tidak)
5. Identifikasi aplikasi terdampak
6. Identifikasi teknologi pada aplikasi terdampak
7. Tools-Tools yang akan digunakan.

Rapat Sidang Pleno Tim Penilai IGA

Rapat dipimpin oleh Bapak Kaban BSKDN, dihadiri oleh perwakilan masing-masing pusat dan Bagian lingkup BSKDN serta perwakilan dari masing-masing tim penilai.

Pada rapat disampaikan bagaimana presentase perkembangan Laporan Inovasi Daerah dan Partisipasi Inovasi seluruh Pemerintah Daerah yang relatif meningkat, dari awal dimulai sejak tahun 2018 – 2024, di sampaikan juga Pada tahun 2024 terdapat 17 Pemerintah Daerah yang belum menginput data Inovasi Daerahnya. Yang menjadi Instrumen Penilaian Presentasi Daerah yaitu;Aspek penguatan Ekosistem Inovasi Daerah (45%), Aspek Inovasi Unggulan (40%), Aspek Penguasaan Materi (15%).

Adapun hasil penilaian Presentasi dari tiap klaster daerah yaitu:

- Hasil Rekapitulasi Akhir Klaster Kabupaten : Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Balangan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bangka, Sampang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Blora, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Sidoarjo, Pamekasan
 - Hasil Rekapitulasi Akhir Klaster Kota: Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Bekasi,, Kota Padang Panjang, Kota Palembang, Kota Batu, Kota Pekalongan, Kota Makassar, Kota Bima
 - Hasil Rekapitulasi Akhir Klaster Daerah PerbatasanL: Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Sambas
 - Hasil Rekapitulasi Akhir Klaster Daerah Tertingga: Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Lombok Utara,Kabupaten Nias Utara
- Hasil Rekapitulasi Akhir Klaster provinsi : Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat,, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bali

Serba Serbi November

Rapat Diseminasi Pedoman dan Peningkatan Kualitas Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kemendagri

Rapat Diseminasi Pedoman dan Peningkatan kualitas Evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam Peningkatan Implementasi SAKIP di Lingkungan Kemendagri.

Rapat dibuka oleh dan di pimpin oleh Bapak Kepala Bagian Monev dan Pelaporan Kinerja Setjen Kemendagri dan di moderator oleh Ibu FIFI, dan di hadiri oleh perwakilan dari seluruh Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri baik secara Virtual atau offline.

Narasumber pertama dari Kemenpan dan RB Bapak Agus Fuji Hantara mengenai Optimalisasi capaian komponen perencanaan kinerja pada implementasi SAKIP. Narasumber kedua dari Kemenpan dan RB Ibu Hatmi mengenai Optimalisasi capaian komponen pengukuran dan pelaporan kinerja pada implementasi SAKIP.

Narasumber ketiga dari Kemenpan dan RB Bapak Arif Tri Haryanto mengenai Optimalisasi capaian komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada implementasi SAKIP. Narasumber keempat dari Kemenpan dan RB Bapak Veron Fauzi mengenai Strategi dan upaya upaya perbaikan dalam upaya peningkatan hasil evaluasi SAKIP di Lingkungan Kemendagri.

Kemendagri sudah menyusun pedoman evaluasi SAKIP dan telah di implementasikan di lingkungan kemendagri sesuai rekomendasi dari Kemenpan dan RB tahun 2022.

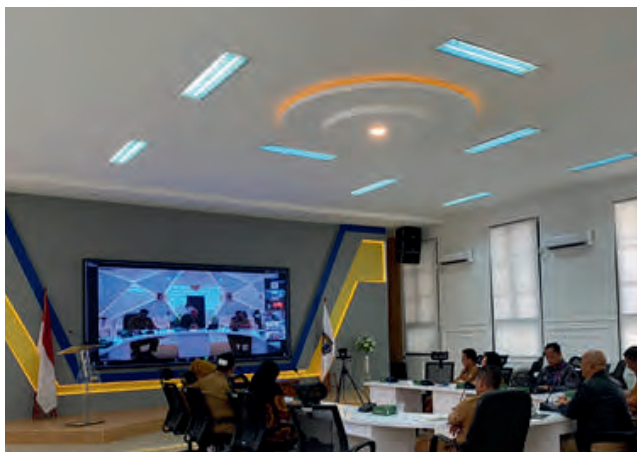
Kemendagri sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan nilai SAKIP yang sebagaimana pada tahun 2023 dengan Nilai BB.

Kemendagri segera melakukan revisi Renstra terhadap penilaian indikator kinerja serta melakukan cascading secara berjenjang dari mulai level tertinggi hingga level terendah.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kemendagri tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unit kerja eselon I hingga unit pelaksana teknis lingkup Kemendagri dan kampus IPDN di Daerah.

Melakukan koordinasi secara intens dengan inspektorat Jenderal Kemendagri dan Unit kerja lingkup Kemendagri terkait penajaman dan peningkatan implementasi SAKIP Kemendagri.

BSKDN telah melakukan inputing dokumen kedalam Aplikasi SIRIKA <http://sirika.kemendagri.go.id> dalam rangka Peningkatan kualitas Evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



Serba Serbi November

Webinar Pemanfaatan Artificial Intelligence Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Akuntabel

Kegiatan dilaksanakan pukul 08.30 s.d 11.30 melalui webinar Zoom Meeting dipimpin dengan moderator Diana. Hasil dari kegiatan “Pemanfaatan Artificial Intelligence Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Akuntabel” sebagai berikut:

- manfaat AI adalah menyesuaikan konten dan metode sesuai kebutuhan, sebagai platform online dan AI untuk proses kebijakan (formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan), mengidentifikasi pola dalam perkembangan analisis kebijakan, simulasi dan realitas virtual dan chatbot untuk interaksi yang lebih menarik.
- Tantangan AI adalah kesiapan SDM dalam menerima dan menggunakan teknologi, Harus memastikan keamanan data privasi, serta terlalu mengandalkan AI tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan diri
- Ancamannya terdiri dari masyarakat Indonesia yang belum cukup memahami AI, baru ada sedikit pakar, dosen, pengajar dalam bidangnya, serta kurangnya infrastruktur digital universitas maupun lembaga riset untuk melakukan penelitian dan pengembangan KA
- Peluangnya : bonus demografi Indonesia merupakan potensi ketersediaan SDM diberbagai sektor pengembangan dan penerapan KA
- Contoh adanya AI : Robot, ChatGPT, sandrina pada BRI, veronika pada Telkomsel, aplikasi terkini yang merubah gambar menjadi video bergerak, dll



Entry Meeting Evaluasi BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB di Lantai 3 Gedung C SBP Kemendagri, yang dipimpin oleh Kabag Monev Biro Perencanaan Setjen Kemendagri dan narasumber dari BPKP, serta dihadiri perwakilan dari UKE 1 lingkup Kemendagri.

BPKP memberikan informasi mengenai rencana pemeriksaan dokumen SPIP di lingkup Kemendagri, khususnya untuk UKE I yang menjadi sampel. Biro Perencanaan memberikan arahan kepada seluruh UKE I Kemendagri untuk mendukung pemenuhan data yang diperlukan oleh BPKP.

Bagian Perencanaan akan menindaklanjuti arahan Biro Perencanaan dalam mendukung pelaksanaan SPIP dan persiapan penyusunan dokumen Manajemen Risiko TA 2025.



Serba Serbi November

Rapat Persiapan Pelaksanaan Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024

Rapat dilaksanakan di ruangan command center pukul 09.00 s.d 12.30 dipimpin oleh kepala pusat 4 dan dihadiri oleh seluruh pihak yang terlibat. Hasil dari rapat persiapan IGA sebagai berikut:

Rapat dilaksanakan di ruangan command center pukul 09.00 s.d 12.30 dipimpin oleh kepala pusat 4 dan dihadiri oleh seluruh pihak yang terlibat. Hasil dari rapat persiapan IGA sebagai berikut:

- Rencana seminar terdapat 4 narasumber, 1) perguruan tinggi Universitas Brawijaya (peran perguruan tinggi dalam mendorong replikasi dan difusi inovasi), 2) kepala BRIDA Jatim (best practice replikasi inovasi daerah dan forum replikasi), 3) USAID Erat (rencana kerja fasilitasi pertukaran dan pembelajaran inovasi daerah melalui replikasi, perluasan, dan keberlanjutan inovasi), 4) Kepala BSKDN (Keynote Speech) ;
- Koordinasi mengenai rundown acara yang mendapat evaluasi penambahan acara ada dari Provinsi Jawa Timur yaitu santunan anak yatim piatu, serta mengenai layout panggung dan keberlangsungan acara agar tidak terdapat kendala dari pihak manapun.
- Pada tanggal 4 Des 2024 pelaksanaan seminar dan expo, 5 Des 2024 pelaksanaan penganugerahan IGA, 6 Des 2024 Finalisasi SPPD dan kepulangan tim IGA;
- Rencana undangan penganugerahan : pemda terinovasi (42), pemda sangat inovatif (76), pemda tertinggi regional dan tercepat melaporakan (11) total 129;



Rapat Persiapan Lokakarya Nasional

Rapat dilaksanakan di ruangan video conference pukul 13.30 s.d 15.00 dipimpin oleh Plh. Ses BSKDN dan dihadiri oleh EO, Vendor, Pihak hotel, dan pihak yang terlibat.

Hasil yang didapat pada kegiatan tersebut:

- Tema Lokakarya Nasional- Linieritas Arah Kebijakan Pusat dan Daerah Untuk Menyukseskan Asta Cita;
 - Rakornas dilaksanakan pada tanggal 6-7 Desember 2024 di Hotel Novotel Mangga Dua;
 - Jumlah Peserta 700 orang
 - Audience peserta dari kepala bappeda/BRIDA/bappitbanda,dll
 - Tema diskusi terdapat: Arah Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Strategi Linieritas Kebijakan Pusat Daerah dalam rangka Menyukseskan Asta Cita, Sinergi Kebijakan Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Implementasi Asta Cita, dan Fasilitasi Kemitraan Stategis Pemerintah Daerah
- Kemitraan terdiri dari: Tanoto Foundation, Monash University, Ironwood Institue, USAID, Koso Nippon, Indonesian Diaspora Network, SKALA, Kamar dagang dan Industri Indonesia, dan Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kemendagri;
 - Koordinasi mengenai kegiatan rakornas terhadap berbagai pihak untuk berjalannya acara.



Serba Serbi Desember

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur kemendagri

Kegiatan rapat dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur perencana lingkup kemendagri serta pemantapan penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Tahun 2026 di Hotel Grand Orchardz pukul 13.30-17.00

Kegiatan rapat berisikan mengenai pembahasan penyebab rendahnya kinerja perencanaan:

- kesenjangan teori dan kenyataan
- desain perencanaan yang bermasalah
- data yang tidak memadai dan tidak bisa diandalkan
- tidak mengantisipasi terjadinya gangguan (“disturbances”)
- kelemahan institusi (regulasi)
- ketiadaan kemauan politik
- terjadinya berbagai konflik kepentingan yang mendalam

Kegiatan juga membahas mengenai Kemendagri dan Demokrasi di Daerah dalam konteks urusan pemerintahan umum yang meliputi koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

Kemendagri dan Pemberantasan Korupsi Kasus Provinsi Jawa Tengah dalam Pilkada 2024: Paslon pemenang (hasil hitung cepat) didukung seluruh parpol (kecuali PDIP) yang menguasai = 87 kursi. Namun PDIP adalah parpol peraih kursi terbanyak (33 kursi) sehingga meraih posisi Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Jateng.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur kemendagri

Kegiatan rapat dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur perencana lingkup Kemendagri hari Ke-2 dimulai pukul 9.30-18.00 WIB

Kegiatan rapat membahas Pokok-Pokok Pengaturan Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran yaitu Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 ini menetapkan tata cara dan prinsip untuk menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

Pemanfaatan Sistem Informasi Krisna Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah melalui Penuangan Prioritas Pembangunan sampai pada rincian proyek, dengan mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan

Tantangan dalam Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

- Perubahan Prioritas Kebijakan: Perubahan kebijakan di tengah jalan, misalnya akibat perubahan pemerintahan, bisa mengakibatkan perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron.
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran sering kali memaksa pemerintah untuk menunda atau mengurangi cakupan program yang sudah direncanakan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi.
- Masalah Koordinasi: Kurangnya koordinasi antara departemen atau lembaga pemerintah yang berbeda bisa mengakibatkan duplikasi program atau konflik alokasi anggaran.

Serba Serbi Desember

Rapat Finalisasi Kepmendagri Pedoman PUG di Lingkungan Kemendagri

Rapat diselenggarakan oleh Biro Perencanaan, dihadiri oleh Tim Biroren Monev serta perwakilan komponen lingkup Kemendagri, rapat berisikan poin-poin kunci sebagai berikut:

Pedoman dimaksudkan untuk menjadi panduan dan kerangka kerja dalam menyelenggarakan PUG di lingkungan Kemendagri dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Pedoman mencerminkan komitmen Kemendagri untuk memastikan perspektif gender terintegrasi di dalam seluruh program, kegiatan, dan rincian output agar lebih berkualitas, efektif dan efisien.

- Memberikan arahan dalam mengintegrasikan perspektif gender di seluruh proses pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengawasan, dan pelaporan, sesuai dengan tugas, fungsi dan keuangan Kemendagri;

- Memberikan arahan substantif kepada seluruh pemangku kepentingan di Kemendagri dalam menyelenggarakan PUG agar lebih sistematis dan terintegrasi;
- Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkup Kemendagri.



Rapat Finalisasi Persiapan Rakornas: Lokakarya Nasional

Rapat dipimpin oleh Plh. Sekretaris BSKDN dengan menyampaikan tugas fungsi dan manfaat kegiatan Lokakarya Nasional yang dapat memperkuat identitas BSKDN kepada pemerintah daerah dan membantu memfasilitasi pemerintah daerah untuk bertemu kemitraan yang dapat memberi inovasi kebijakan yang strategis.

Bapak Plh. Sekretaris mengharapkan seluruh rekan kerja baik dari internal BSKDN maupun eksternal yang tergabung dalam kepanitiaan acara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan loading barang kedalam venue akan dilaksanakan pada malam hari tanggal 5 Desember, apabila ada perubahan waktu loading barang akan diberitahukan lebih lanjut.

Kemitraan yang sudah konfirmasi untuk melakukan presentasi dan membuka boots yaitu : Yayasan Nusantara Sejati/Koso Nippon Jepang; STIA LAN; Monash University; Ironwood Institute Australia/Pengembangan Potensi Indonesia; dan Tanoto Foundation.

Bagian Perencanaan akan melaksanakan check list kesiapan Lokakarya demi memastikan kelancaran kegiatan.



Serba Serbi Desember

Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan manajemen risiko

Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan manajemen risiko dilaksanakan pukul 09.00 s.d 12.00 melalui zoom meeting dipimpin oleh biro perencanaan dan dihadiri beberapa komponen dan staf bagren BSKDN

Hasil yang didapatkan pada pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari:

- Overview Manajemen Risiko : ISO 31000, ERM COSO, Kepmendagri 114-5467 Tahun 2022, dan AS/NZS 4360:2004;
- Pembentukan manajemen risiko: Unit pemilik risiko (UPR), Unit kepatuhan manajemen risiko, dan unit pengawas manajemen risiko;
- Risiko Inheren vs risiko residual, risiko inheren dilakukan sebelum pengendalian sedangkan risiko residual dilaksanakan setelah pengendalian;
- Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi,
- Evaluasi Risiko: mengevaluasi apakah satu risiko perlu dilakukan penanganan atau diterima, jika dilakukan penanganan maka risiko mana yang diprioritaskan;
- Alternatif Keputusan: tidak melakukan apapun, mempertimbangkan opsi perlakuan risiko, melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami risiko lebih baik, memelihara pengendalian yang ada, dan mempertimbangkan kembali sasaran
- -Tujuan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagu penyempurnaan proses manajemen risiko;
- Pelaksana pemantauan oleh pemilik risiko: realisasi kegiatan pengendalian, peristiwa risiko, level risiko aktual dan efektivitas pengendalian, serta unit kepatuhan memberikan umpan balik.

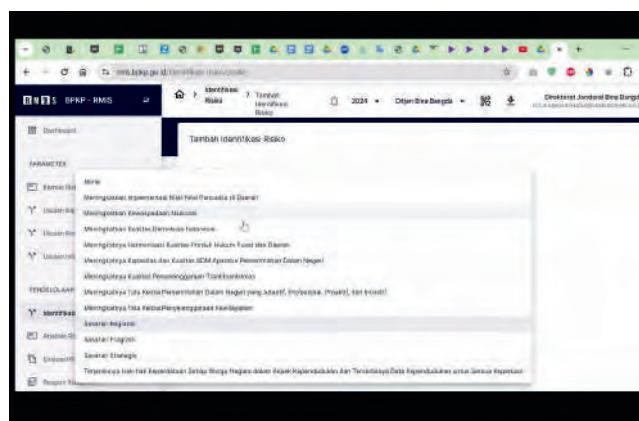
Kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi RMIS

Kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi RMIS dilaksanakan pukul 13.30 s.d 16.30 melalui zoom meeting dipimpin oleh biro perencanaan dan dihadiri beberapa komponen dan staf bagren BSKDN

Hasil yang didapatkan pada pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari:

- landasan hukum RMIS : PP No 60 Th 2008, Perpres Nomor 18 Th 2020, Perpres No 192 Th 2014, Peraturan BPKP No 5 Th 2021, dan Permenpan RB No 25 Th 2020;
- Penyempurnaan aplikasi existing : BPKP telah banyak menghasilkan aplikasi terkait penyelenggaraan manajemen risiko, pengembangan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aplikasi aplikasi tersebut belum maksimal, aplikasi existing dapat menjadi bahan pembelajaran terutama terkait dengan source code, dokumentasi pengembangan serta pengalaman pengguna sehingga aplikasi integrated RMIS.

- Keunggulan RMIS : Cepat (server pusat data nasional milik kemenkoinfo dapat diakses dengan cepat karena tersambung dengan backbone jaringan internet nasional dan alur data aplikasi dirancang untuk menghemat memori dan mempercepat proses kalkulasi), aman (telah lolos uji kerentanan yang terpisah dan dienkripsi 64bit), kapasitas besar (3 server berbeda masing masing 16 core CPU, 2TB storage dan 48gb RAM);
- Sosialisai ini menjelaskan mengenai bagaimana cara mengakses aplikasi RMIS pada laman rmis.bkp.go.id



Serba Serbi Desember

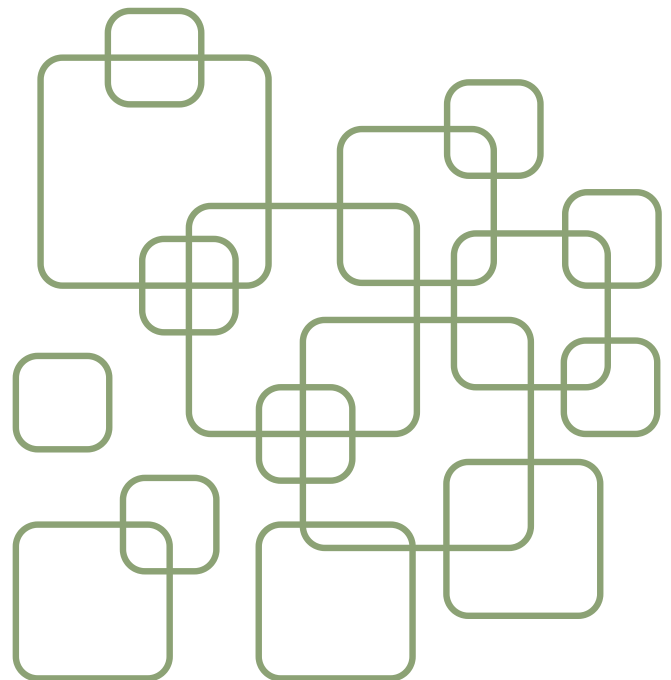
Rapat kerja Tim Koordinasi SPBE Kemendagri

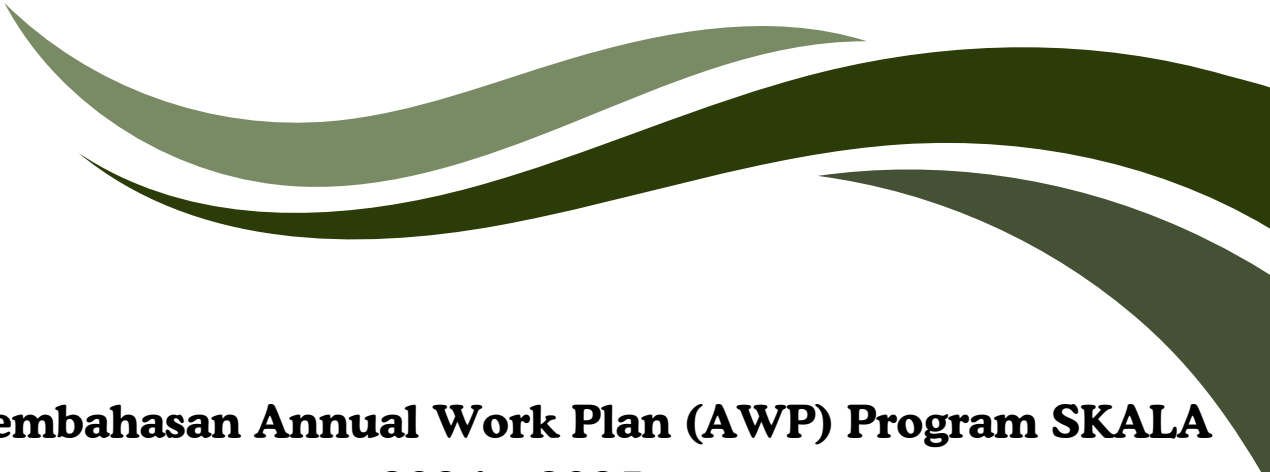

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB di Lantai 3 Gedung F Kemendagri, yang dipimpin oleh Pranata Komputer Ahli Muda, serta dihadiri perwakilan dari UKE 1 lingkup Kemendagri.

Pusdatin Kemendagri memberikan informasi terkait evaluasi dalam pelaksanaan Indeks SPBE lingkup Kemendagri dan rencana perbaikan di TA 2025

Dari beberapa indikator Indeks SPBE, BSKDN ditunjuk sebagai PIC dalam mengawal indikator "Manajemen Pengetahuan" dan "Manajemen Perubahan"

Setiap komponen diminta untuk mengusulkan nama yang akan ditunjuk sebagai tim koordinasi SPBE lingkup Kemendagri. Bagian Perencanaan akan menindaklanjuti arahan dari Pusdatin dalam mendukung Indeks SPBE Kemendagri





Rapat Pembahasan Annual Work Plan (AWP) Program SKALA 2024 – 2025

Rapat dilaksanakan di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri Pkl. 09.30 dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Sama Antar Negara Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Pusfasker) Setjen Kemendagri bersama Team Leader Program SKALA, dan dihadiri oleh perwakilan seluruh UKE I lingkup Kemendagri yang menjadi Implementing Agency. Pada diskusi didapati poin-poin sebagai berikut:

Dilaksanakan pembahasan seluruh Intermediate outcome dan Output kegiatan yang direncanakan oleh SKALA dan progress terkini dari setiap upaya pencapaian output. Disampaikan bahwa Implementing Agency dari kegiatan SKALA di Kemendagri di antaranya: Pusdatin Setjen terkait pengelolaan Satu Data; Ditjen Bina Bangda terkait penerapan SPM layanan public; Itjen terkait penguatan pengawasan penyelenggaraan pemda; dan BSKDN terkait peningkatan kapasitas Analisis Kebijakan dalam rangka mewujudkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif;

BSKDN memiliki dua rencana output yang telah tertuang dalam Dokumen AWP yang telah disepakati bersama, yakni yang termasuk dalam Area Fokus “Dukungan Penguatan Perencanaan Daerah untuk Penerapan dan Pemenuhan Layanan Dasar yang Inklusif” melalui rencana output kegiatan berupa Fasilitasi teknis penguatan kapasitas jabatan analisis kebijakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan untuk layanan dasar yang inklusif. Beberapa kegiatan yang sudah terlaksana di antaranya seminar peningkatan kapasitas Analisis Kebijakan yang sudah dikolaborasikan bersama Bagian SDMO Setban BSKDN. Selanjutnya BSKDN juga terlibat dalam upaya pencapaian Area Fokus “Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait penganggaran daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif” melalui output kegiatan berupa fasilitasi teknis penguatan kapasitas pimpinan daerah dalam penyediaan layanan dasar.

Serba Serbi Desember

Kegiatan Membangun Kompetensi ASN dalam Era Digitalisasi

Rapat dilaksanakan di aula bskdn pukul 09.00 s.d 13.00 dipimpin oleh kabag SDMO.

Kegiatan membangun kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam era digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Dalam era ini, ASN dihadapkan pada tantangan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka harus memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan digital. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk membangun kompetensi ASN di era digitalisasi antara lain:

- **Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Digital** Memberikan pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan platform digital yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, seperti sistem e-Government, big data, dan analitik.

- **Peningkatan Kemampuan Keamanan Siber** Dalam digitalisasi, ancaman terhadap data dan informasi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pelatihan tentang keamanan siber (cybersecurity) untuk ASN perlu dilaksanakan, agar mereka dapat melindungi data sensitif dan menjaga integritas sistem pemerintah.
- **Digital Leadership dan Manajerial ASN** tidak hanya perlu memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk memimpin dalam konteks digital. Pelatihan digital leadership dapat membantu ASN untuk memimpin tim dengan cara yang efektif dalam era digital, serta mampu mengelola perubahan dengan bijak.
- **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Digital** Evaluasi terhadap penggunaan teknologi dan kinerja digital ASN perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kompetensi mereka terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Agenda Penyerahan DIPA Kemendagri Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat SBP Gedung C. Lantai 3 Kemendagri. Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan dihadiri oleh Wamen 1, Wamen 2, seluruh UKE I Kemendagri dan BNPP

Pagu Alokasi Anggaran Kemendagri sebesar Rp. 4,79 T dan Pagu Alokasi Anggaran BSKDN Kemendagri sebesar Rp. 58,61 M. Langkah percepatan pencapaian kinerja Kemendagri dalam sisa waktu anggaran TA.2024

- Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan, khususnya terhadap kegiatan yang baru mendapat tambahan anggaran
- Melakukan pengendalian, pemantauan, koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh UKE I, UKE II dan UPT di daerah untuk pencapaian kinerja yang diharapkan

- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempermudah pelaksanaan dan pencairan anggaran.
- Meningkatkan koordinasi antara Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara dan Operator Satker





Serba Serbi Desember



Bimbingan Teknis bagi Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Rapat dilakukan di ruang Vidcon BSKDN pukul 09.00 dan dipimpin oleh Kepala Bagian SDMO Ibu Ira hayatunisma, SE., MM.,

Tujuan diadakan Bimbingan Teknis advokasi kebijakan untuk meningkatkan meningkatkan kualitas kajian-kajian yang dihasilkan lingkup BSKDN serta, dapat menghasilkan output rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Komponen Eselon I Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian atau lembaga diluar kemendagri.

Pengoptimalisasian kualitas peneliti pada Lembaga Administrasi Negara dilakukan dengan cara pengelompokan peneliti sesuai keahlian dan bidangnya masing-masing sehingga menghasilkan hasil kajian yang berkualitas.

Dalam melaksanakan advokasi kebijakan terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat advokasi kebijakan, yaitu: Memetakan dan menentukan fokus isu; Menentukan tujuan advokasi; memetakan stakeholders dan mengidentifikasi target Audiens; Membangun Support; Merumuskan pesan yang akan disampaikan; memilih metode komunikasi dan strategi advokasi; mengembangkan rencana pelaksanaan advokasi; dan melakukan monitoring dan evaluasi.



Rapat Tindak Lanjut Evaluasi SPBE Kemendagri

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB melalui zoom meeting, yang dipimpin oleh PAN-RB serta dihadiri perwakilan dari UKE 1 lingkup Kemendagri.

Rapat ini menjelaskan mengenai mekanisme integrasi data EGA SPBE - SIA SPBE, Alur singkat penggunaan Portal SIA-SPBE (Sistem Informasi Arsitektur SPBE) adalah sebagai berikut:

- Registrasi Pengguna, Pengguna (instansi pemerintah) mendaftar dan membuat akun pada portal.
- Input Data Instansi, Mengisi informasi terkait instansi, struktur organisasi, dan rencana implementasi SPBE.
- Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Membuat atau memperbarui arsitektur SPBE dan menyusun rencana penerapan SPBE (jangka pendek, menengah, dan panjang).
- Monitoring dan Evaluasi, Memantau progres implementasi SPBE, serta mengevaluasi kinerja dan belanja anggaran SPBE.
- Laporan dan Rekomendasi, Menyusun laporan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan SPBE.
- Koordinasi Antar Instansi, Kolaborasi dengan instansi lain untuk mendukung penerapan SPBE yang efektif.
- Perbaikan dan Pengembangan, Berdasarkan evaluasi, melakukan perbaikan atau pembaruan pada sistem SPBE.
- Portal ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPBE di seluruh instansi pemerintah.

Serba Serbi Desember

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum di Kemendagri

Rapat dilaksanakan di AONE Hotel Jakarta, Jl. K.H. Wahid Hasyim No.80, RT.15/RW.3, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada pukul 14.00 WIB s.d 18.00 WIB dan dipimpin oleh Kabag PUU Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, yaitu Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Asisten Deputi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, beserta perwakilan dari seluruh unit kerja eselon I di lingkup Kementerian Dalam Negeri;

Dalam rapat dibahas beberapa agenda penting terkait harmonisasi dan penyempurnaan Rancangan Permendagri, termasuk terkait penggantian istilah Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Prosundagri) menjadi Program Penyusunan Permendagri (Propemdagri). Propemdagri ini akan bersifat tahunan dan hanya mengompilasi usulan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Setiap tahunnya, Menteri Dalam Negeri akan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) mengenai Propemdagri tersebut. Sementara untuk produk hukum dengan tingkat lebih tinggi dari Permendagri, pemrakarsa diwajibkan menyampaikan usulannya kepada Sekretaris Jenderal agar dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pada rapat seluruh peserta rapat bersepakat untuk menyelesaikan finalisasi rancangan peraturan ini dalam waktu dekat. Langkah tindak lanjut akan dilakukan melalui koordinasi intensif antara Biro Hukum dan unit kerja terkait untuk memastikan implementasi yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dilaksanakan juga pembahasan pengaturan terkait pembentukan Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan (PUU) di lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Pemberian Penghargaan Pemda Pengelola Keuangan Daerah Terbaik Tahun Anggaran 2023 Tahun Ukur 2024

Acara dilaksanakan di ruang Command Center BSKDN Kemendagri. Rapat dibuka oleh Kepala BSKDN. Dihadiri oleh Plh Dirjen Keuda, para pejabat dari BPK, Kemenkeu, KPK, perwakilan Provinsi/Kab/Kota penerima penghargaan, dan para Kapus di lingkungan BSKDN, serta para undangan baik luring maupun daring

- Pemerintah Provinsi dengan Kategori Kapasitas Fiskal Rendah: Prov D.I Yogyakarta dengan skor 86,761
- Pemerintah Kabupaten dengan Kategori Kapasitas Fiskal Tinggi: Kab. Bangka dengan skor 85,291
- Pemerintah Kabupaten dengan Kategori Kapasitas Fiskal Sedang: Kab. Muna Barat dengan skor 84,102
- Pemerintah Kabupaten dengan Kategori Kapasitas Fiskal Rendah: Kab. Grobogan dengan skor 87,03
- Pemerintah Kota dengan Kategori Kapasitas Fiskal Tinggi: Kota Medan dengan skor 88,591

- Pemerintah Kota dengan Kategori Kapasitas Fiskal Sedang: Kota Denpasar dengan skor 80,117
- Pemerintah Kota dengan Kategori Kapasitas Fiskal Rendah: Kota Tasikmalaya dengan skor 85,769



Serba Serbi Desember

Kegiatan Internalisasi Core Values BerAKHLAK dan Peningkatan Kapasitas ASN Kemendagri dan BNPP

Rapat dilaksanakan pukul 08.00 s.d 12.00 di Aula BSKDN dan dipimpin oleh coach Syaiful

Hasil rapat kegiatan Internalisasi Core Values BerAKHLAK dan Peningkatan Kapasitas ASN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pembinaan Penanggulangan (BNPP) melalui program Kemendagri Merdeka Belajar bisa mencakup beberapa poin utama berikut:

a. Tujuan Kegiatan:

- Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK (Berkelakuan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan BNPP.
- Menyusun strategi untuk memperkuat kapasitas ASN agar lebih kompeten, profesional, dan responsif terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat.

b. Pencapaian:

- Peningkatan pemahaman ASN tentang pentingnya budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK.
- Implementasi program Kemendagri Merdeka Belajar yang bertujuan memberi kesempatan kepada ASN untuk mengikuti berbagai pelatihan dan program pendidikan guna meningkatkan kompetensi mereka.

c. Program Pelatihan dan Pengembangan:

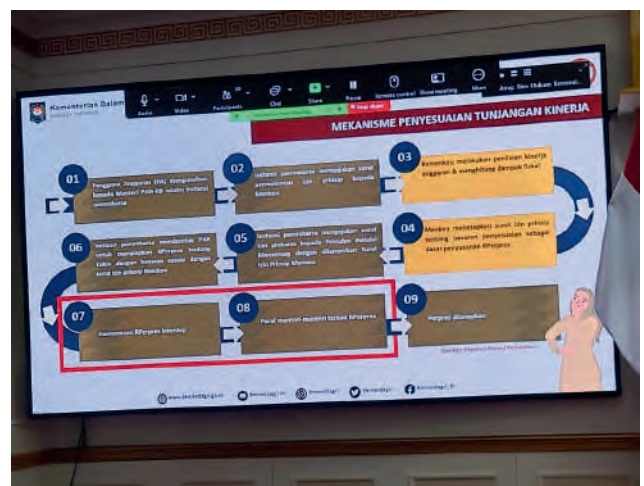
- Penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan berbasis Merdeka Belajar termasuk modul yang mengembangkan keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan tuntutan tugas dan dinamika kerja saat ini.
- Penyusunan kurikulum pelatihan yang berbasis pada kompetensi ASN serta penyesuaian dengan kebutuhan strategis dan pembangunan nasional.

Rapat Harmonisasi Ranperpres tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemendagri

Rapat dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri dan dihadiri oleh pejabat perwakilan Kemenkum, KemenPANRB, Kemenkeu, BKN, Pejabat JPT Ptra serta Administrator di lingkungan Setjen Kemendagri dan perwakilan seluruh UKE I Kemendagri

Pada rapat dilaksanakan pembahasan pasal per pasal dan diingatkan terkait distribusi Paraf Koordinasi yang perlu dilengkapi, yakni dari MenPANRB selaku pemrakarsa, BKN, dan Kemendagri. Dilaksanakan pembahasan redaksional yang dipimpin oleh Pejabat Ditjen PUU Kemenkum selaku fasilitator harmonisasi. Disampaikan bahwa setelah Perpres ini diberlakukan maka Kemendagri harus segera menyiapkan pengaturan teknis turunan dalam bentuk Permendagri

Substansi pada Ranperpres telah disepakati oleh seluruh peserta rapat dan dalam waktu dekat KemanPANRB akan menyampaikan Ranperpres kepada Presiden melalui Mensesneg.



Serba Serbi Desember

Evaluasi Renstra Bskdn 2020-2024 Dan Arah Kebijakan BSKDN 2025-2029

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d. 17.30 WIB dipimpin oleh Kepala BSKDN Kemendagri yang dihadiri oleh seluruh pegawai BSKDN Kemendagri.

Kegiatan Evaluasi Renstra BSKDN 2020-2024 Dan Arah Kebijakan BSKDN 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan kinerja pada setiap sector dilingkup BSKDN demi terwujudnya efektif dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Harapan untuk setiap Pusat dan Bagian dapat melakukan penghematan dalam anggaran pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Penyesuaian satu tujuan agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat tersinkronisasi sesuai dengan prosedur yang ada

. BSKDN harus memiliki tema sentral sebagai capaian utama yg terkait langsung dengan strategi kebijakan pencapaian asta cita yang dilaksanakan di seluruh wilayah indonesia.

Setiap pusat harus memiliki program besar yang dilaksanakan terkait dengan astacita dan program quick win presiden prabowo dan wapres gibran yang dilaksanakan secara konsisten selama 5 tahun dengan milestone dan target capaian yang terukur. Siapkan desai besar program tersebut lengkap beserta kak/tor payung, kerangka pendanaan dan prognosis biaya selama 5 tahun (dibreakdown tahunan), serta rumusan capaian indikator yang objektif dan terukur.

Masing masing pusat segera menyiapkan dokumen pada poin 2 dan siapkan dokumen peta jalan programnya untuk mengantisipasi apabila memungkinkan BSKDN mengajukan pinjaman luar negeri.



Rapat Penyampaian Struktur Rancangan Awal RPJMN 2025 – 2029 lingkup Kementerian Dalam Negeri mitra Bangda

Rapat dilaksanakan pukul 13.00 s.d 14.30 melalui zoom meeting dipimpin oleh Bapennas dan dihadiri oleh perwakilan seluruh UKE I

Hasil yang didapatkan melalui rapat ini terdiri dari:

a. Rancangan Tujuan Strategis Kemendagri Tahun 2025-2029

- Menguatnya implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stal politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia.

- Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan

- Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan

- Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan Pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik

b. Prioritas Nasional Rancangan RPJMN Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (Ditjen Polpum)

- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Ditjen Bina Adwil, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda)

c. Tindak Lanjut, Dalam rangka penyusunan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029, Kemendagri akan melakukan

- Finalisasi narasi Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029, termasuk penajamaan indikator dan RO Prioritas Kemendagri beserta target dan kebutuhan penganggarnya.

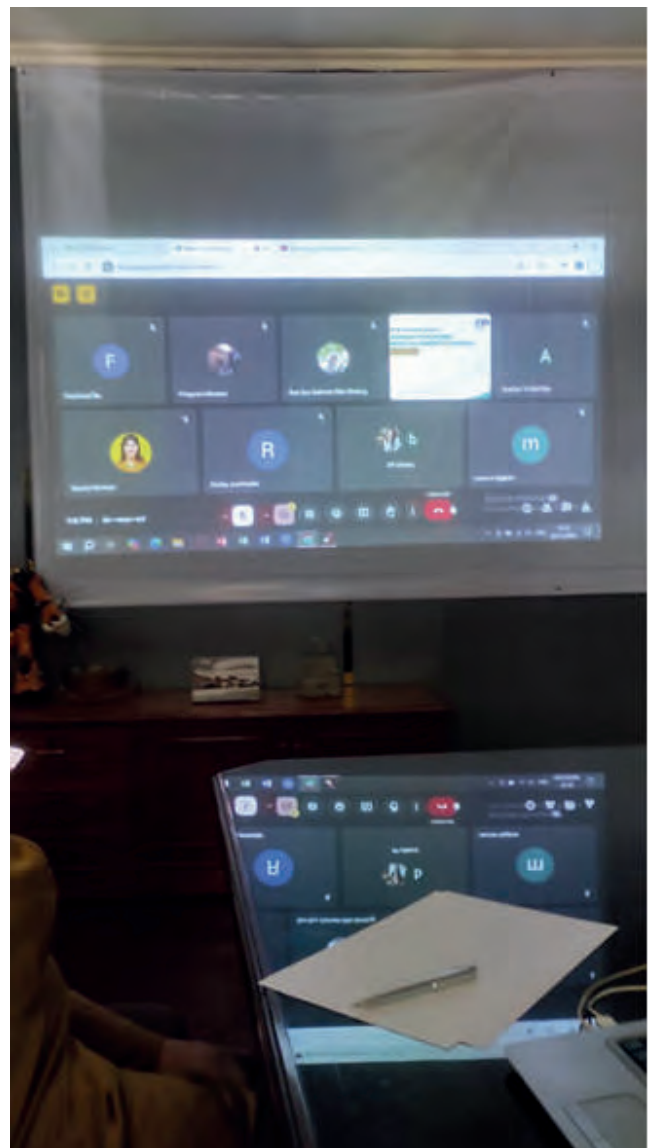
- Menyusun meta data dan manual indikator IKU, IKP, IKK, dan RO.

Serba Serbi Desember

Rapat Exit Meeting Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Manditi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

a. Refleksi dan Perbaiki Hasil Evaluasi Tahun 2023

1. Telah terdapat perbaikan pada sub unsur struktur dan proses yang menjadi kelemahan pada evaluasi tahun sebelumnya
2. Telah terdapat upaya signifikan dalam implementasi manajemen resiko pada hampir seluruh UKE-1, termasuk perbaikan atas identifikasi analisis risiko awareness atas resiko kemitraan, walaupun belum optimal
3. Strategi pencapaian sasaran belum didesain secara optimal, terlihat dari kekurangan pada penetapan indikator dan target
4. Desain pengendalian belum seluruhnya menggunakan informasi yang dihasilkan dari proses manajemen resiko
5. Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator





b. Pengendalian SPIP

1. Melakukan FGD dalam memfinalkan draft profit resiko 2025 dengan menggali lebih dalam proses bisnis, kondisi internal, dan kondisi eksternal program atau tugas fungsi pada UKE secara komprehensif
2. melakukan monitoring terhadap keterjadian risiko dan pengendalian yang dilakukan selama Tahun 2024
3. Menggunakan Risk Management Information System (RMIS) dalam pengelolaan risiko
4. Berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan dan menginternalisasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)
5. Melakukan perbaikan terhadap Kebijakan Manajemen risiko dengan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang MRPN dan beberapa area perbaikan kebijakan



galeri





Bagren

galeri





Baggren

Cobain Yuk! Rujak Cingur Khas Jawa Timur



Rujak cingur merupakan salah satu makanan tradisional dari Jawa Timur, terutama di daerah asalnya Surabaya. Menurut pegiat sejarah Kota Surabaya, keberadaan rujak cingur di Kota Surabaya berawal dari tahun 1930-an yang dibawa oleh pendatang dari Pulau Madura untuk bertahan hidup dengan berdagang kuliner yakni rujak cingur.

Dalam penyajiannya, rujak cingur dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyajian "biasa" dan matengan "matangan" . Penyajian "biasa" atau umumnya, berupa semua bahan yang telah disebutkan di atas, sedangkan matengan hanya terdiri dari bahan-bahan matang saja: lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendhoyo (kerahi yang direbus hingga lunak dan matang) dan sayur (kangkung, kacang panjang, tauge) yang telah direbus atau dikukus. Tanpa ada bahan mentahnya yaitu buah-buahan, Keduanya memakai saus atau bumbu yang sama.

Pempek: Makanan Tradisional Khas Palembang

Pempek, mpek-mpek, atau dalam bahasa Indonesia gaul empek-empek, adalah makanan khas Palembang, Sumatera Selatan. Proses pembuatannya yakni dibuat dari daging ikan Tenggiri bisa juga ikan gabus yang digiling lembut, dicampur tepung kanji atau tepung sagu, serta dengan penambahan komposisi bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Pempek biasanya disajikan dengan kuah yang disebut cuko yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas.

Cara memakan pempek yang benar adalah dengan menggunakan mangkuk kecil sebagai tempat cukonya (cuka dalam bahasa Indonesia) lalu pempek dicocolkan. Cuko kemudian diseruput untuk menambah rasanya nikmatnya. Pelengkap yang lain untuk menyantap pempek adalah mentimun segar yang diiris dadu dan mie kuning terkadang ada tambahan cabai bubuk untuk ekstra pedas.



Icip Makanan Khas Riau Ikan Baung Asam Pedas, Nikmat!



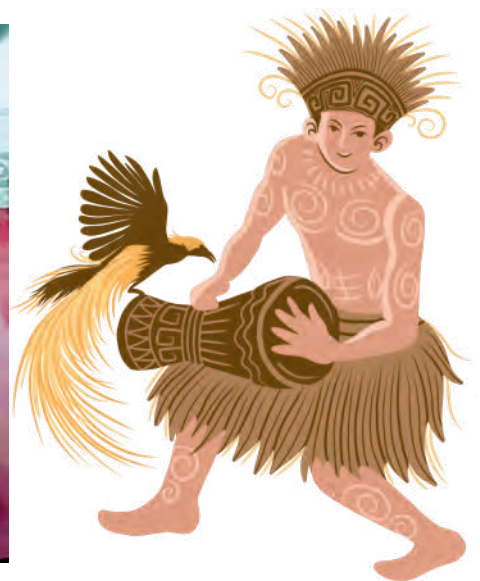
Makanan olahan ikan khas Riau selanjutnya adalah ikan baung asam pedas yang wajib kamu cicipi. Makanan ini cocok untuk kamu yang tidak suka kuah yang kental. Ikan ini di masak menggunakan rempah rempah yang akan sangat menyerap ke dalam ikan sehingga cita rasa yang dihasilkan juga akan sangat lezat.

Biasanya, ikan yang sudah dibersihkan akan direndam dengan asam Jawa atau asam kandis. Ikan ini sangat aman untuk kamu yang memiliki anak kecil karena tidak memiliki duri dan sangat lembut.

Makanan Khas Papua Pegunungan: Udang Selingkuh

Cita rasa udang selingkuh ini sangatlah unik, karena dagingnya lebih mirip lobster yang cenderung padat, lembut dan berserat. Rasa dagingnya juga gurih dan manis sehingga walau tidak dibumbui atau hanya dengan diberi garam saja, cita rasa khas dari makanan yang satu ini tetap akan terasa. Mengolahnya juga cukup mudah, karena udang selingkuh biasa dimasak dengan direbus, digoreng, atau juga dibakar. Dalam penyajiannya, sepiring udang selingkuh rebus biasanya disajikan bersama tumis kangkung.

Udang selingkuh memiliki kandungan kalsium dan protein yang tinggi. Selain itu, terdapat kandungan mineral berupa selenium, fosfor, magnesium, sodium, dan zinc dalam kadar yang sesuai dengan kebutuhan gizi manusia.



Bagren Squad



TOMY



DEDEN



GUNAWAN



RIZKI



LINA



CACA



DEA



KAMIL

Bagren Squad BSKDN



SUPRIYOKO



GOGO



BAIM



YOS



DWI



DEVI



FUTI



ANSEL



Member Of 20



Team Member Of The Month 2024

The Month 2024



Februari



Rizki Luthfiah Aziz, biasa di panggil Rizki lahir di Bandung, 10 Mei 1995. merupakan Staff yang memiliki tugas dalam lingkup kerjasama dan hukum di bagian perencanaan. memiliki hobi diving, gym, membaca, menonton film, berdiskusi. makanan Favorite takoyaki, cakue, menu kantin dan energen, dan minuman favorite air putih panas.

Team Member Of The Month Februari - Maret 2024

March



Gunawan Adi Silalahi, biasa di panggil Gun lahir di Sidikalang, 25 September 1995. merupakan Staff yang memiliki tugas dalam lingkup Program dan Anggaran di bagian perencanaan. memiliki hobi futsal dan bermain game. makanan Favorite kantin dan minuman favorite kopi.

April



Devi Ariefta Cahyani, biasa di panggil Devi lahir di Garut, 9 Mei 1999. merupakan Staff yang memiliki tugas dalam lingkup kerjasama dan hukum di bagian perencanaan. memiliki hobi menonton drama Korea . makanan Favorite Sate Taican dan minuman favorite Es Teh Manis.

Team Member Of The Month April - Mei 2024

May



Yos Saputra, biasa di panggil Yos lahir di Jakarta, 26 November 1981. merupakan Staff yang memiliki tugas Perbendaharaan di bagian perencanaan. memiliki hobi main games makanan Favorite sate dan minuman favorite Es Kelapa Muda.

June



Futi Istiningtyas, biasa di panggil Futi lahir di Jakarta, 7 Februari 1990. merupakan Staff yang memiliki tugas dalam membantu perbendaharaan di bagian perencanaan. memiliki hobi mendengarkan musik makanan Favorite Takoyaki dan minuman favorite Kopi.

July



Annisa Putri Riyanto, biasa di panggil Caca lahir di Jakarta, 11 November 1999. merupakan Staff yang dalam lingkup kerjasama dan hukum di bagian perencanaan. memiliki hobi Kulineran makanan Favorite Nasi Goreng Ikan Asin dan minuman favorite Es Teh Manis.

August



Gogo Ricky Martin Purba, biasa di panggil Gogo lahir di Siantar, 11 September 1998. merupakan Staff yang memiliki tugas dalam lingkup Program dan Anggaran di bagian perencanaan. memiliki hobi futsal dan olahraga. makanan kantin dan minuman favorite Kopi.

Team Member Of The Month Agustus - September 2024

September



Dea Afdila, biasa di panggil Dea lahir di Bengkalis, 27 April 1998. merupakan Staff yang dalam lingkup Monitoring dan Evaluasi Kinerja. memiliki hobi Menonton Film makanan Favorite Nasi Goreng dan minuman favorite Es Coklat

October



Dwi Indarti, biasa di panggil Dwi lahir di Jakarta, 16 Oktober 1991. merupakan Staff yang memiliki tugas dalam lingkup Program dan Anggaran di bagian perencanaan. memiliki hobi mendengarkan musik dan bermain basket. makanan Favorite Nasi Bebek dan minuman favorite Es Jeruk.

November



Rachman Kosasih, biasa di panggil Deden lahir di Jakarta, 7 Oktober 1973. merupakan Kassubag dalam melakukan Monitoring, pengumpulan data dan Evaluasi Kinerja. memiliki hobi Karate makanan Favorite Nasi Goreng dan minuman favorite Susu.

December



Lina Widayanti, biasa di panggil Lina lahir di Sukabumi, 7 Februari 1989. merupakan Staff yang memiliki tugas dalam lingkup Program dan Anggaran di bagian perencanaan. memiliki hobi Travelling. makanan Favorite Seblak dan minuman favorite air mineral dingin.

Team Member Of The Month Desember 2024

December



Supriyoko, biasa di panggil Supri lahir di Sukabumi, 12 Oktober 1981. merupakan Staff yang dalam lingkup Monitoring dan Evaluasi Kinerja. memiliki hobi. memiliki hobi Bermain Sepak Bola makanan Favorite Nasi Goreng dan minuman favorite Es Kelapa.

Tha

Yo



an h

U

!

